

Kewirausahaan Pendidikan
BAHASA INGGRIS
Berbasis Pendidikan Luar Sekolah

Dr. Saraka, M. Pd.

Kewirausahaan Pendidikan
BAHASA INGGRIS
Berbasis Pendidikan Luar Sekolah



Kewirausahaan Pendidikan Bahasa Inggris
Berbasis Pendidikan Luar Sekolah
Copyright @ Dr. Saraka, M. Pd.

Tata Letak: rl. lendo
Desain Sampul: Gie

Cetakan, 2020
x + 230; 14 x 20 cm
ISBN: 978-602-0787-61-9

RELASI INTI MEDIA

(Anggota IKAPI)

Jl. Veteran Gg. Manunggal RT/RW. 20/05 No. 638 C

Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp: 0274-4286584



Prakata

Sejak diproklamasikan kemerdekaan, usaha pembangunan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan dan hasilnya sudah bisa dinikmati dan dirasakan sampai sekarang. Pembangunan itu dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, baik kebutuhan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Dalam usaha tersebut, pendidikan selalu mendampingi dan menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pembangunan. Secara psikologis, pendidikan itu membawa perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai pada individu, kelompok dan masyarakat dan memungkinkan dia atau mereka terbuka dan melihat jalan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam pada itu, salah satu dari sekian permasalahan yang awet dan krusial dalam dunia pendidikan dari waktu ke waktu adalah tujuan yang akan dicapai dan upaya-upaya

untuk mencapainya. Di satu sisi, pendidikan diharapkan selalu selaras secara simbiosis dengan kebutuhan dunia kerja, namun di sisi lain dalam kenyataannya tidak selalu demikian karena keduanya memiliki dinamika kepentingan yang tidak selalu sama. Keduanya memiliki pelaku yang hasrat, harkat, dan martabatnya mengalami pasang surut. Keduanya juga memiliki sistem yang tidak selalu kompatibel satu dengan lainnya. Pendek kata, keduanya memiliki kultur yang tidak mudah untuk disatukan.

Sebagai contoh—walaupun kasus ini terjadi pada kondisi yang berbeda—setelah dikeluarkannya kebijakan tentang alih fungsi SMK terdapat beberapa kasus kegagalan pembukaan sebuah program studi. Contohnya, kegagalan pembukaan program studi pengolahan dan pengemasan produk buah (*fruit processing and packaging*) di Kota Malang Jawa Timur pada dua SMK baru hasil alih fungsi. Kegagalan terjadi dikarenakan minimnya peminat program studi tersebut. Hal tersebut diduga karena pengembang program belum memahami prospek serta peluang kerja dan wirausaha bidang pengolahan dan pengemasan produk buah oleh masyarakat. Atas dasar itu, maka pemahaman tentang prospek serta peluang kerja dan wirausaha perlu diketahui oleh pengembang program pendidikan luar sekolah dalam merumuskan sebuah program pendidikan baru bagi masyarakat.

Pendidikan luar sekolah sendiri merupakan segala bentuk kegiatan pembelajaran di luar sistem persekolahan, yang terorganisasi, disengaja dan direncanakan untuk membantu warga masyarakat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Karena itu, kegiatan semacam kursus, penataran, pelatihan, penyuluhan, dan belajar kelompok merupakan sebagian ragam program pendidikan luar sekolah.

Buku ini mencoba memberikan pandangan singkat seputar kewirausahaan di bidang pendidikan Bahasa Inggris berbasis Pendidikan Luar Sekolah. Buku ini disusun dari sejumlah buku teks ilmiah dan merupakan suatu kondensasi dari berbagai materi buku yang ditulis oleh para penulis lain yang berkaitan dengan dunia wirausaha. Sebagai sebuah kondensasi, tentu penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini sembari berharap semoga buku ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca sehingga akan lahir lebih banyak insan Indonesia berkualitas yang siap terjun ke dunia wirausaha di bidang pendidikan Bahasa Inggris.

Akhir kata, perlu menjadi penekanan kita bersama bahwa segala upaya yang dilakukan untuk membentuk jiwa kewirausahaan atau *entrepreneurship* tidak akan cukup jika

hanya diajarkan di ruang-ruang kelas perkuliahan atau dalam sebuah seminar. Lebih penting dari itu, dibutuhkan sebuah praktik, contoh nyata, dan pembuktian di lapangan.

Selamat berkarya dan berwirausaha...

Samarinda, 26 Desember 2019

Dr. Saraka, M.Pd.



Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Pentingnya Kewirausahaan	1
B. Selayang Pandang Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi	8
C. Kewirausahaan dan Pendidikan Luar Sekolah	23
Konsep Dasar Kewirausahaan	31
A. Makna dan Hakikat Kewirausahaan	31
B. Proses Kewirausahaan.....	54
C. Karakteristik dan Jenis Kewirausahaan	58
D. Kewirausahaan dan Watak Kemandirian.....	77
E. Etika dan Norma Bisnis Kewirausahaan	80
Pendidikan Kewirausahaan Di Indonesia	91
A. Dasar Hukum Kewirausahaan.....	91
B. Tantangan Pendidikan Kewirausahaan.....	99

D. Kewirausahaan dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Ekonomi Negara.....	127
E. Menuju Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025	130
Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pusat Pembelajaran Kewirausahaan	137
A. Definisi Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	137
B. Model Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah.....	146
C. Peran & Fokus PLS Dalam Pengembangan Keterampilan Wirausaha.....	150
D. PLS Sebagai Alternatif Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	155
Wirausaha Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis Pendidikan Luar Sekolah.....	163
A. Pengembangan Wirausaha Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis PLS	165
B. Beberapa Contoh Wirausaha di Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis PLS	168
Analisis Peluang Usaha.....	193
A. Kemajuan Teknologi versus Tuntutan Globalisasi	193
B. Analisis Kelayakan Usaha (<i>Analyzing business feasibility</i>)	201
Senarai Pustaka	219
Tentang Penulis.....	231



Pendahuluan

A. Latar Belakang Pentingnya Kewirausahaan

Dari dulu hingga kini, masalah kemiskinan masih menjadi topik utama di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Tidak hanya mengacu pada individu yang berada dalam kondisi kekurangan uang atau barang untuk menjamin kebutuhan hidupnya, kemiskinan juga berkait erat dengan keterbatasan dalam dunia lapangan pekerjaan. Pendek kata, keterbatasan lapangan pekerjaan membuat banyak masyarakat Indonesia tidak dapat bekerja atau menganggur. Pengangguran yang dialami masyarakat inilah yang akhirnya menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.

Berbagai studi terdahulu dari beragam perspektif telah dilakukan oleh para peneliti dan hasilnya menunjukkan bahwa pengangguran—baik itu pengangguran terbuka (*open unemployment*), terselubung (*disguised unemployment*), atau

setengah menganggur (*under unemployment*)—memang memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Karena itu, ketersediaan lapangan pekerjaan atau kesempatan usaha yang terbuka bagi segenap warga negara merupakan salah satu hal penting bagi sebuah bangsa. Bahkan tidak sedikit tokoh yang berpendapat bahwa—selain pertumbuhan ekonomi—jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu tolok ukur maju dan tidaknya suatu negara.



Diagram Struktur Ketenagakerjaan Indonesia

Jike mengacu pada diagram di atas, persoalan pengangguran memang masih menjadi momok yang perlu mendapatkan

perhatian serius. Pemerintah, lembaga pendidikan, maupun swasta perlu bekerjasama bahu-membahu memperbanyak lapangan kerja dan sekaligus mencetak bibit-bibit wirausahawan unggul agar tingkat pengangguran dapat diminimalisasi.

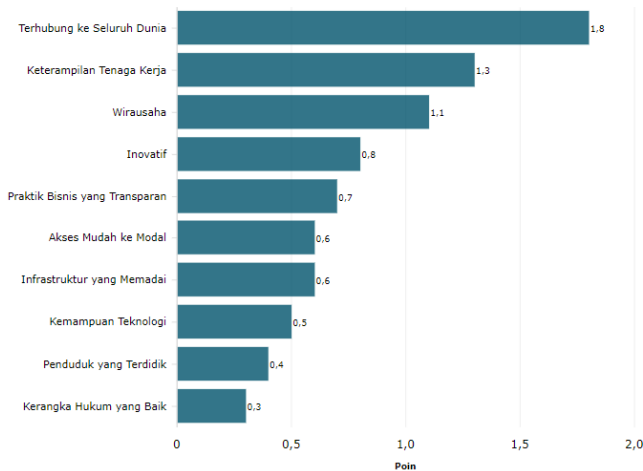
Seperti diketahui, dengan masih banyaknya jumlah pengangguran atau pencari kerja (*job seeker*) ditengah minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, upaya untuk mencetak lebih banyak wirausahawan (*entrepreneur*) sejak dini harus diakui bisa menjadi salah satu solusi yang masih dan harus terus digalakkan di berbagai level masyarakat. Hal ini dikarenakan wirausaha bisa menjadi salah satu cara bagi setiap individu untuk bekerja dan meniti karir bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang tanpa harus “menengadahkan tangan” sambil menunggu datangnya lowongan pekerjaan.

Bahkan dengan berwirausaha, setiap individu bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang membutuhkan atau sedang mencari pekerjaan, sehingga tugas pemerintah dalam mengurangi pertumbuhan pengangguran di negeri ini bisa semakin cepat direalisasikan. Pendek kata, seorang wirausahawan tidak perlu lagi menggantungkan dirinya kepada orang lain.

Dalam konteks negara, sebagaimana disinggung di awal, jumlah wirausahawan di suatu negara adalah salah satu indikator bagi sebuah kemajuan. Untuk bisa dikatakan negara maju, jumlah pelaku wirausahawan harus lebih dari 14% dari

rasio penduduknya. Di Indonesia sendiri, pelaku entrepreneur baru berada di angka 3% sehingga perlu diadakan percepatan dan kemudahan agar pelaku ekonomi Indonesia bisa meningkat lebih jauh. Angka persentase ini masih jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga, di mana Singapura berada di angka 7%, Malaysia 5%, Thailand 4,5%, dan Vietnam 3,3%.

Dari perspektif perekonomian nasional, ketangguhan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari rasio jumlah pengusaha dibanding jumlah penduduk. Di mana rata-rata negara maju yang memiliki ekonomi stabil memiliki rasio pengusaha 14 persen. Dengan kata lain, 14 persen penduduk di negara tersebut adalah pengusaha.



*Diagram Indikator Kewirausahaan
menurut U.S. NEWS and World Report (2019 Best Countries)*

Diagram di atas menunjukkan bahwa dimensi kewirausahaan Indonesia berada di peringkat 50 dari 80 negara yang disurvei. Rendahnya peringkat Indonesia disebabkan indikator yang membentuk dimensi kewirausahaan memiliki skor di bawah 2 dari skala 0-10. Adapun skor terendah terdapat pada indikator kerangka hukum dan penduduk yang terdidik dengan masing-masing skor 0,3 dan 0,4. Kemampuan teknologi juga menjadi hambatan bagi Indonesia untuk meningkatkan iklim kewirausahaan. Selain itu, infrastruktur yang memadai dan akses ke modal juga menjadi perhatian karena berada di peringkat empat terendah dengan skor 0,6 poin.

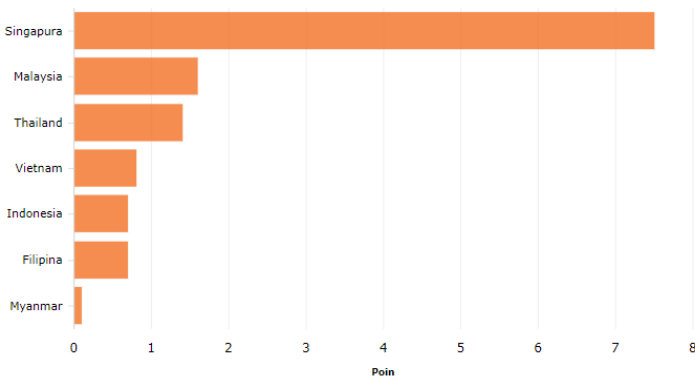


Diagram Peringkat Kewirausahaan di Asia Tenggara 2018 menurut U.S. NEWS and World Report (2019 Best Countries)

Sementara di tingkat Asia Tenggara (ASEAN)—masih menurut laporan US News and World Report dalam 2019 Best Countries, Indonesia dan Filipina berada di peringkat kedua terendah dalam dimensi kewirausahaan pada 2018. Skor yang diperoleh Indonesia dan Filipina sebesar 0,7 dari skala 10. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula iklim kewirausahaan dalam suatu negara. Di tingkat dunia, Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 80 negara yang disurvei.

Rendahnya peringkat kewirausahaan Indonesia disebabkan rendahnya skor pada semua indikator, yaitu di bawah 2 dari skala 10. Ada beberapa indikator yang mendapatkan skor rendah, yakni kerangka hukum yang baik dan keahlian teknologi dengan skor masing-masing sebesar 0,3 dan 0,5. Sementara itu, skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah 1,8 untuk indikator terhubungnya Indonesia ke seluruh dunia.

Wirausahawan memang harus diakui memiliki peranan penting, karena merekalah yang mampu melihat peluang, mengembangkan, dan menciptakan bisnis baru. Terlebih di era digital seperti saat ini, nyaris tak ada kendala untuk memulai usaha. Dengan modal kreativitas dan keberanian, siapapun bisa mulai berwirausaha.

Visi dan misi pemerintah yang ingin menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian nasional dengan meningkatkan jumlah wirausahawan melalui berbagai program kewirausahaan seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKMK), Program

Belajar Bekerja Terpadu (PBBT), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI), Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI Expo), dan lain-lain telah menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan kewirausahaan masih terus diupayakan penanganannya oleh pemerintah. Meski hasilnya belum sepenuhnya memuaskan, namun berbagai indikator sosial yang ada telah menunjukkan adanya perbaikan dalam pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Selain berbagai program tersebut, untuk memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan peluang bonus demografi, pembangunan pemuda juga menjadi salah satu agenda strategis pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJMN untuk melahirkan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Urgensi dari peran dan fungsi pemuda ini disadari betul oleh pemerintah Indonesia sehingga terus diupayakan dengan segenap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan di segala bidang, sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Perlu menjadi perhatian bersama bahwa pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi cukup tinggi, hal ini dinyatakan dengan nilai TPAK pemuda sebesar 61,96 persen. Artinya, sekitar tiga dari lima pemuda sedang bekerja, mempersiapkan pekerjaan, atau mencari pekerjaan. Menurut jenis kelamin, TPAK pemuda laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan.

Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor jasa-jasa (55,20 persen). Sedangkan menurut jenis pekerjaan utama yang dibagi dalam 8 kategori, sebagian besar pemuda bekerja sebagai tenaga produksi dan angkutan. Lebih dari separuh pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan (58,81 persen), diikuti pekerja keluarga atau tidak dibayar (14,29 persen). Pekerja pemuda lebih banyak bekerja sebagai pekerja formal daripada informal, yaitu sebesar 60,30 persen berbanding 39,70 persen.

Mengacu kepada uraian dan data di atas, maka dalam rangka turut berpartisipasi dalam pembangunan negara sekaligus menyokong program pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan demi mendukung visi Indonesia menjadi Negara maju di tahun 2045, setiap warganegara—apapun profesi mereka dan dengan seluruh potensi yang dimilikinya—harus turut andil dengan memupuk dan menularkan keberanian untuk memulai usaha atau berwirausaha sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat diatasi dengan lebih mudah.

B. Selayang Pandang Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi

Dalam kurun satu dasawarsa terakhir, pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di Indonesia sedang menjadi

tren. Bahkan hingga kini, semangat kewirausahaan di berbagai perguruan tinggi dan sekolah menengah terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan melalui penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan. Semangat kewirausahaan yang begitu menggelora ini muncul seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran (*awareness*) para insan akademik terhadap urgensi dari kemajuan perekonomian Indonesia yang kebetulan sudah terlanjur tertinggal jauh dari negara-negara lain.

Secara normatif, pendidikan tinggi yang menjadi estafet dari pendidikan menengah memang dicanangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kapabilitas akademik dan profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Di tengah proses perubahan sosial (*social change*) di masyarakat yang begitu cepat, maka kedudukan dan fungsi perguruan tinggi harus benar-benar terwujud dalam peran yang aktif dan nyata dalam memecahkan beragam persoalan (*problem solver*) yang dihadapi masyarakat dengan menghasilkan ilmu yang siap pakai, baik itu permasalahan dalam kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Diakui atau tidak, Indonesia memang masih berada di level yang cukup memprihatinkan, khususnya bidang pendidikan. Ketika telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana, tidak sedikit dari mereka yang justru

menambah daftar panjang pengangguran terdidik—baik pengangguran permanen atau sementara—akibat minimnya bekal ilmu, pengalaman hidup, atau pengalaman mencari kehidupan di dunia nyata selama mereka belajar.

Karakteristik Demografi	Tingkat Pendidikan					Total
	Tidak Tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TPT	7,36	8,66	9,83	16,27	12,18	13,03
Tipe Daerah						
Perkotaan	11,80	11,12	11,13	16,46	12,37	14,22
Perdesaan	4,91	6,94	8,65	15,94	11,68	11,39
Jenis Kelamin						
Laki-laki	7,46	8,98	9,98	15,89	12,19	12,82
Perempuan	7,12	7,89	9,56	16,90	12,17	13,37

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Tingkat Pendidikan (2019)

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda Indonesia pada tahun 2019 menurut tingkat pendidikannya sebesar 13,03 persen. Angka itu menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja pemuda, terdapat sekitar 13 pemuda tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha atau mencari pekerjaan. TPT pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan. Nilai TPT pemuda yang paling tinggi adalah mereka yang berpendidikan SMA/ sederajat, diikuti PT dan SMP/ sederajat.

Lebih dari separuh pekerja pemuda Indonesia, bekerja sebagai buruh/ karyawan (58,81 persen), diikuti pekerja keluarga/

tidak dibayar (14,29 persen), dan pekerja pemuda yang berusaha sendiri (12,68 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak pemuda yang menggantungkan harapan masa depannya sebagai buruh atau bekerja kepada pihak lain, baik di suatu perusahaan maupun industri. Kecilnya persentase pemuda yang berusaha sendiri memperlihatkan masih minimnya inovasi, kreasi, serta keberanian pemuda untuk mengambil risiko.

Berbicara soal kualitas lulusan sekolah formal di Indonesia—khususnya di pendidikan tinggi—memang tidak bisa dilepaskan dari beberapa permasalahan yang melingkupinya, seperti kualitas SDM, mutu pendidikan, karakter, dan relevansi lulusan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks seiring dengan cepatnya perkembangan dunia di era revolusi industri 4.0 dan juga tuntutan SDM berkualitas yang seakan berbanding terbalik dengan kepentingan individu atau lembaga pendidikan. Kepentingan untuk mencetak lulusan sebanyak-banyaknya cenderung kurang diimbangi dengan kualitas pelayanan pengajaran yang mampu melahirkan kader-kader wirausahawan.

Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari fakta bahwa ilmu yang diperoleh dari sebagian—untuk tidak mengatakan seluruhnya—perguruan tinggi kurang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan sehingga berdampak pada tingkat

pengangguran intelektual. Akibatnya, sebagian besar lulusan pendidikan tinggi hanya bisa menjadi buruh atau karyawan.

Secara umum, salah satu penyebab rendahnya kualitas lulusan pendidikan tinggi ini adalah masukan (input) seperti, kurikulum perkuliahan yang berlaku di program Strata Satu (S1) kurang mengarah pada usaha mempersiapkan mahasiswa dapat terjun langsung ke masyarakat luas, dunia usaha maupun dunia industri. Banyak materi perkuliahan hanya berorientasi pada pengkajian dan pemahaman teori-teori yang kurang diimbangi dengan logika praktis yang terjadi di lapangan.

Hal ini bisa jadi dimungkinkan karena masih kentalnya anggapan bahwa pendidikan kewirausahaan semata-mata hanya berorientasi pada persoalan bisnis (*baca*: siklus mencari dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah). Hal ini salah satunya nampak dari susunan kurikulum pendidikan kewirausahaan yang umumnya berisi materi dan aktivitas yang berhubungan dengan membangun sikap mental kewirausahaan, melatih keterampilan berkomunikasi, membangun jejaring, dan menyusun rencana bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian di suatu perguruan tinggi mewajibkan mata kuliah kewirausahaan bagi seluruh mahasiswanya, terdapat beberapa fakultas atau program studi yang menolak atau kurang setuju dengan alasan mereka tidak mendidik mahasiswa atau lulusannya menjadi pengusaha.

Anggapan semacam ini tentu saja tidak sepenuhnya salah karena memang dunia pekerjaan pada akhirnya tidak bisa terlepas dari persoalan untung-rugi. Namun jika kita gunakan perspektif yang lebih luas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebenarnya tidak ada distingsi tujuan dari pendidikan kewirausahaan maupun pendidikan lainnya, di mana semuanya bertujuan untuk membentuk insan yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha. Pendek kata, baik pendidikan kewirausahaan maupun pendidikan yang lain harus sama-sama menanamkan nilai-nilai tersebut agar tujuan pendidikan tinggi dapat tercapai. Jika perspektif ini bisa disepakati bersama, bukan tidak mungkin lulusan (*output*) dan keterpakaian lulusan (*outcome*) dari setiap lembaga pendidikan tinggi dapat meluluskan peserta didik yang “siap pakai” di dunia usaha maupun dunia industri dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi sebenarnya telah lama dicanangkan oleh pemerintah yang diturunkan ke dalam program-program pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi yang menawarkan berbagai kegiatan, yaitu Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang Kewirausahaan (MKU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja (KBPK), dan Inkubator Wirausaha Baru (INWUB), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), dan

lain-lain yang kesemuanya dimaksudkan untuk memfasilitasi mahasiswa agar mampu berkreasi di berbagai bidang seperti bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, artikel ilmiah, gagasan tertulis, karya cipta, dan kewirausahaan. Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan kemampuan, keahlian, tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni.

Pada hakikatnya potensi dan bakat wirausaha ada pada setiap manusia, namun tidak banyak yang mampu menggali dan memanfaatkan bakat tersebut untuk meraih sukses. Pendidikan Kewirausahaan di perguruan tinggi sendiri salah satunya bertujuan untuk membentuk karakter dan semangat berwirausaha agar mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam menciptakan usaha sendiri saat kuliah maupun setelah lulus kuliah. Sehingga pada akhirnya lulusan perguruan tinggi tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi bisa menjadi pencipta lapangan kerja.

Mengacu kepada uraian yang telah dikemukakan diatas, maka perlu dirumuskan model kurikulum yang bisa meningkatkan efektivitas pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi agar hasil akhir yang diharapkan berupa keberanian memulai usaha atau membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain de-

ngan segala perhitungan risikonya pada diri mahasiswa bisa muncul dan terimplementasi. Paling tidak, karakter-karakter ideal wirausahawan pada diri lulusan perguruan tinggi dapat muncul.

Sebagai langkah awal, pendidikan kewirausahaan harus dimulai dari pembentukan pola pikir wirausaha yang dilanjutkan dengan pembentukan perilaku kreatif dan inovatif agar dapat berkreasi. Kreasi-kreasi yang dapat dihasilkan wirausaha meliputi *creation of wealth, enterprise, innovation, change, employment, value* dan *growth* (Morris, Lewis, dan Sexton, 1994). Melalui kemampuan menghasilkan kreasi-kreasi tersebut, seseorang dapat disebut sebagai wirausaha dalam bidang apapun.

Dalam konteks kurikulum, materi kewirausahaan perlu kiranya dimasukkan ke dalam mata kuliah di semua jurusan perguruan tinggi—lebih baik lagi jika dimasukkan sebagai mata kuliah wajib—sehingga setiap mahasiswa harus mengikutinya. Selanjutnya dari sisi pelaksanaan, selain dalam bentuk klasikal, mata kuliah kewirausahaan juga perlu didesain lebih efektif di mana mahasiswa dilibatkan secara langsung di dalam pengalaman belajarnya karena sudah seharusnya mata kuliah kewirausahaan mampu membangkitkan kreativitas dan inovasi mahasiswa (*theory-based activities*). Mahasiswa yang mengikuti materi kuliah kewirausahaan diharapkan dapat mengkombinasikan antara teori dan pengalaman nyata dengan

cara "*adaptive learning*" dan "*trial and error*", dimana mahasiswa sebagai pihak yang memiliki kegiatan pembelajaran, sedangkan dosen bertindak sebagai fasilitator proses dan bisa mendatangkan berbagai nasarasumber yang bisa membangun dan memotivasi mahasiswa untuk mempunyai semangat berwirausaha. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang dilakukan harus membawa mahasiswa ke dalam pengalaman-pengalaman belajar yang lebih spesifik agar mereka dapat diarahkan secara langsung pada kompetensi, keterampilan, sikap, dan perilaku yang menjadi ciri serta fungsi dari kewirausahaan itu sendiri.

Paling tidak ada empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh entrepreneur, yaitu: 1) Kompetensi teknik atau rancang bangun produk atau operasi, 2) Kompetensi marketing atau menemukan pasar, identifikasi pelanggan, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan, 3) Kompetensi finansial atau kompetensi bidang keuangan dalam mendapatkan dan mengatur penggunaan dana, dan 4) Kompetensi human relations atau mengembangkan hubungan personal yang mencakup relasi dan kemitraan. Hal yang tidak kalah penting untuk didorong adalah bahwa seorang entrepreneur tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan tetapi juga cara berpikir yang baru, berbagai keterampilan yang baru, dan bentuk perilaku yang baru (seni). Karenanya untuk bisa meningkatkan minat wirausaha mahasiswa, perguruan tinggi perlu memperbanyak frekuensi praktek kewirausahaan dan menerapkan pembelajaran kon-

tekstual secara periodik berupa studi-studi lapangan ke sektor UMKM.

Jika mengacu kepada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen kurikulum dan metode pengajaran merupakan salah satu cara untuk mendorong efektivitas pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi di Indonesia. Adapun penjabaran dari komponen kurikulum dan metode pengajaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Kurikulum	Metode Pengajaran
❖ Memuat pengetahuan teoritis kewirausahaan dan pengembangan jaringan sosial. ❖ Melibatkan praktisi wirausaha dalam tim penyusun kurikulum. ❖ Kurikulum bersifat fleksibel sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. ❖ Kurikulum mampu mengembangkan kreativitas dan keterampilan kewirausahaan ❖ Kurikulum bersifat tematik sesuai dengan potensi lokal. ❖ Kurikulum sejalan dengan kebutuhan industri.	❖ Lebih mengedepankan praktek daripada teori dalam kelas. ❖ Pembelajaran bersifat contextual learning. ❖ Metode pembelajaran menyenangkan dan menimbulkan kegairahan berwirausaha. ❖ Menggunakan pendekatan problem-based learning.

❖ Kurikulum mampu mengakomodasi minat dan bakat mahasiswa.	
❖ Internalisasi nilai-nilai kewirausahaan dalam kurikulum/ silabus seluruh mata kuliah yang ada.	

Tabel Komponen Kurikulum dan Efektivitas Pendidikan Kewirausahaan

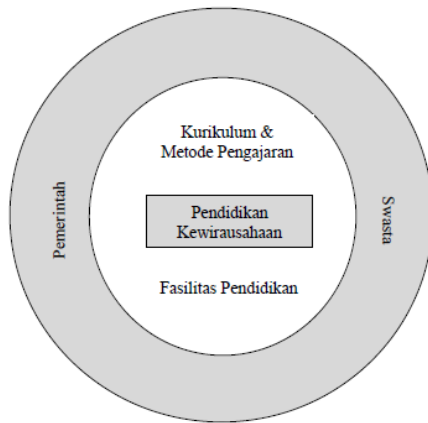
Agar pendidikan kewirausahaan dapat berjalan secara efektif, maka metode pengajaran teoritis di kelas harus diminimalkan dan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang tersedia sehingga mahasiswa mendapat pengalaman nyata terkait dengan problematika dan dinamika dunia usaha. Salah satunya, paling tidak perguruan tinggi hendaknya memiliki suatu pusat kewirausahaan (*entrepreneurship center*), baik dalam bentuk institusi kampus atau berbentuk organisasi kemahasiswaan. Disinilah perlunya disediakan inkubator wirausaha. Dalam konteks Indonesia, payung hukum terkait inkubator ini sebenarnya sudah tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Meskipun cakupan peserta Inkubasi (*Tenant*) yang tertuang dalam Perpres tersebut tidak secara spesifik menyebutkan mahasiswa, namun kapasitas mahasiswa paling tidak dapat dimasukkan dalam kategori calon wirausahawan atau wirausaha pemula (*start-up*).

Dari uraian di atas, menjadi jelas tergambar bahwa komponen sarana dan prasarana pendidikan, baik bersifat fisik maupun nonfisik, merupakan cara lain untuk mendorong efektivitas pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi di Indonesia. Adapun penjabaran dari komponen sarana dan prasarana pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarpras Fisik	Sarpras Non-Fisik
❖ Memiliki Pusat Kewirausahaan (<i>Entrepreneurship Center</i>) yang berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator kewirausahaan di lingkungan kampus. ❖ Memiliki inkubator bisnis yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pendampingan wirausaha mahasiswa. ❖ Ketersediaan unit-unit kegiatan usaha mahasiswa mencakup keberadaan laboratorium, workshop, galeri, gerai, dan sejenisnya. ❖ Alokasi anggaran sebagai modal start up usaha mahasiswa.	❖ <i>Networking</i> dengan para stakeholders lokal baik pemerintah maupun swasta. ❖ Mengadakan ajang-ajang kompetisi bisnis secara periodik.

Tabel Komponen Sarana dan Prasarana fisik/non-fisik dalam Pendidikan Kewirausahaan

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi terlihat dari kesuksesan proses pendidikan itu sendiri dan keluarannya. Pendidikan kewirausahaan baru dapat berjalan efektif apabila didukung oleh sejumlah aspek, baik internal ataupun eksternal perguruan tinggi. Dari sisi internal, perlu dirumuskan rancangan kurikulum pembelajaran yang efektif dan disampaikan dengan metode pengajaran yang tepat. Perguruan tinggi juga dituntut untuk melengkapi serangkaian fasilitas, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, untuk mendukung jalannya proses pendidikan. Sementara dari sisi eksternal, peran langsung dan tidak langsung pemerintah, industri, dan lembaga keuangan akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. Dengan kata lain, efektivitas dan keberhasilan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi mensyaratkan sinergi antara institusi perguruan tinggi (kurikulum dan metode pengajaran) dengan pemerintah (fasilitas pendidikan) dan swasta atau dunia usaha (*funding*) seperti nampak pada gambar berikut:



*Gambar Pola Sinergi Antarlembaga
dalam Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi*

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa sebagai suatu pengetahuan, *entrepreneurship* dapat dipelajari sebagaimana kita mempelajari pengetahuan lainnya. Hal terpenting adalah menangkap spirit kewirausahaan. Spirit inilah yang nantinya akan memotivasi seseorang untuk mengembangkan kemampuan *entrepreneurial*-nya. Strategi pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi tersebut pada akhirnya akan membentuk *softskill* mahasiswa agar berperilaku sesuai karakter wirausaha dengan ciri antara lain:

- 1) Menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa,
- 2) Membangun sikap mental wirausaha yakni percaya diri, sadar akan jati dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu

citacita, pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, berani mengambil risiko dengan perhitungan, berperilaku pemimpindan memiliki visi ke depan, tanggap terhadap saran dan kritik, memiliki kemampuan empati dan keterampilan sosial,

- 3) Meningkatkan kecakapan dan ketrampilan para mahasiswa khususnya *sense of business*,
- 4) Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi,
- 5) Menciptakan unit bisnis baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan
- 6) Membangun jejaring bisnis antar pelaku bisnis, khususnya antara wirausaha pemula dan pengusaha yang sudah mapan.

Akhirnya, perlu ditekankan sekali lagi bahwa pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi lebih berkaitan dengan upaya untuk membangun karakter seorang entrepreneur yang mencakup pola pikir, perilaku yang selalu kreatif dan inovatif, menciptakan nilai tambah atau nilai-nilai baik (*values*), memanfaatkan peluang, serta berani mengambil risiko. Dengan demikian pendidikan kewirausahaan dapat dilaksanakan di perguruan tinggi dan diberlakukan pada semua mahasiswa tanpa memandang bidang ilmu yang dipelajari, karena sejatinya pendidikan kewirausahaan tidak semata-mata pendidikan bisnis.

C. Kewirausahaan dan Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan merupakan tulang punggung bagi kesejahteraan sebuah bangsa. Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran bahwa pendidikan mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru secara berkesinambungan di mana hal tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi derajat kewirausahaan seseorang. Lebih jauh lagi, kewirausahaan sejatinya merupakan sebuah proses dinamik untuk penciptaan tatanan kemakmuran bagi semua.

Selama ini, tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena gelar pendidikan, bahkan sampai perguruan tinggi, seolah tidak cukup “mumpuni” untuk meraih kemakmuran yang menjadi harapan semua orang. Investasi untuk membiayai proses pendidikan yang tidak sedikit tak jarang justru dibayar dengan lulusan sekolah dan sarjana yang menganggur. Oleh karena itu, adanya pendidikan kewirausahaan diharapkan mampu mengasah kemampuan nalar dan bakat kewirausahaan mahasiswa agar bisa mandiri dan mampu membuka lapangan pekerjaan.

Sayangnya pendidikan formal yang menjadi harapan banyak pihak dengan peran serta dan sumbangsihnya untuk menelurkan output yang trengginas memupus mata rantai kemiskinan dan pengangguran justru tidak sedikit menyisakan masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah. Dalam konteks inilah kemudian Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mengambil—

atau lebih tepatnya menambal kekurangan—peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Dengan kata lain, di sini PLS berperan sebagai “pelengkap, penambah, pengganti, dan penyempurna”.

Seperti kita ketahui bersama, pendidikan luar sekolah adalah segala bentuk kegiatan pembelajaran di luar sistem persekolahan, yang terorganisasi, disengaja dan direncanakan untuk membantu warga masyarakat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Karena itu, kegiatan semacam kursus, penerbitan, pelatihan, penyuluhan, dan belajar kelompok merupakan sebagian ragam program pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberi pengalaman belajar yang tidak diperoleh di pendidikan sekolah. Materi program yang diberikan dalam PLS didasarkan pada kebutuhan peserta didik dan dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan masyarakat. Program yang dicanangkan dalam PLS bisa bermacam-macam, seperti pendidikan keterampilan produktif, olahraga, kesenian, kelompok belajar, kelompok pencinta alam, dan lain-lain. Lambat laun, eksistensi PLS semakin dirasakan kehadirannya oleh masyarakat karena mampu memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Dalam konteks pendidikan luar sekolah, paling tidak ada empat model pendidikan yang digunakan, yaitu:

1. Pendidikan yang bersifat mendasar (*basic education*) yang diarahkan untuk mencapai pendidikan dasar (sekolah dasar atau sekolah menengah pertama). Bentuk konkret dari model pendidikan jenis ini adalah program Paket A yang dulu dikenal sebagai Program Pemberantasan Buta Huruf. Melalui program Paket A ini diharapkan masyarakat bisa memperoleh ijazah persamaan Sekolah Dasar sebagai prasyarat untuk dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Pendidikan untuk meningkatkan taraf atau kualitas kehidupan keluarga. Pendidikan jenis ini termanifestasikan dalam program keluarga berencana, kesehatan dan gizi, kesejahteraan keluarga, lingkungan sehat, bina balita, dan lain sebagainya.
3. Pendidikan untuk meningkatkan kehidupan kelembagaan masyarakat. Pendidikan atau pelatihan yang masuk pada jenis pendidikan ini antara lain Koperasi Simpan Pinjam, KUD, LKMD, KSM, dan lain-lain. Pendidikan kategori ini muncul sebagai dampak dari semakin maju dan kompleksnya kehidupan di satu sisi serta semakin banyaknya tuntutan akan adanya sebuah kelembagaan dalam masyarakat dengan pengelolaan secara profesional.

4. Pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan baru baik untuk dirinya maupun orang lain. Model pendidikan ini mungkin lebih kita kenal dengan istilah kursus atau pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga swasta, maupun institusi pendidikan. Kurikulum pendidikan jenis ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk mempersiapkan calon-calon wiraswasta dengan mengacu kepada kebutuhan riil di lapangan, kemampuan akademik, dan kondisi finansial dari para peserta pendidikan.

Sementara mengacu pada tipologi dari Patrick Gerald Boyle (*Planning Better Programs*, 1981), jenis-jenis program pendidikan masyarakat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Program pengembangan (*developmental*); Program pengembangan melibatkan khalayak sasaran dalam penentuan masalah atau kebutuhan dan ruang lingkup serta sifat program. Peranan pengembang program pendidikan kewirausahaan adalah memperlancar seluruh proses kependidikan dan pelatihan, sejak dari pengenalan kebutuhan sampai evaluasi hasil dan program.
- 2) Program kelembagaan (*institutional*); Program kelembagaan melibatkan khalayak sasaran dalam pelaksanaan pelatihan. Sedangkan peranan pengembang program

pendidikan kewirausahaan menyebarkan ilmu dan teknologi melalui proses instruksional.

- 3) Program penerangan (*informational*). Program penerangan melibatkan khalayak sasaran terutama sebagai penerima informasi. Peranan programer adalah memberikan jawaban akan permintaan informasi.

Dalam salah satu bukunya, Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani menuturkan bahwa pengembang program pendidikan luar sekolah perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (1) prospek, peluang kerja/usaha, dan ketersediaan jenjang pendidikan lanjutan; (2) pemanfaatan sumberdaya fasilitator dan/atau instruktur, karena berhubungan langsung dengan keberhasilan pembelajaran; dan (3) pemetaan kebutuhan masyarakat dan promosi.

Salah satu dari sekian banyak metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam berbagai program pendidikan luar sekolah untuk pemberdayaan masyarakat secara umum adalah program pendidikan kewirausahaan. Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya masyarakat dengan demikian harus memiliki serangkaian program yang dibutuhkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Untuk mengantisipasi rendahnya minat warga untuk belajar mengikuti program pendidikan luar sekolah tentang ke-

wirausahaan, maka perlu diperimbangkan beberapa hal berikut; (1) program yang dihadirkan harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat; (2) mendesai kurikulum pendidikan yang dapat memupus persepsi masyarakat bahwa program pendidikan kewirausahaan kurang memberikan keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari karena hanya berkuat pada refleksi teoritik semata; (3) menyelenggarakan program yang secara konkret dapat membantu menyelesaikan persoalan ekonomi sehari-hari masyarakat; (4) Tidak mengabaikan kondisi fisik, psikologi, dan lingkungan tempat belajar agar program tidak sepi peminat.

Akhirnya dengan statusnya sebagai pendidikan nonformal dan dengan kurikulum yang lebih fleksibilitas jika dibanding dengan pendidikan formal, pendidikan luar sekolah pada akhirnya akan mampu menjadi pelengkap sekaligus penyempurna dari program pengentasan kemiskinan yang selama ini masih menjadi momok bagi banyak negara berkembang. Dikatakan fleksibel karena materi/ kurikulum yang diajarkan dalam pendidikan luar sekolah harus—dan sudah seharusnya—berangkat dari kebutuhan riil di lapangan agar bisa melahirkan output yang “siap tanding” mengurai benang kusut pengangguran dan kemiskinan.

Dalam pada itu, terminologi “pelengkap dan penyempurna” pada pendidikan luar sekolah tentu saja bukan dalam konteks mengeluarkan kucuran dana segar untuk masyarakat miskin

seperti yang dilakukan pemerintah atau para pemodal, melainkan lebih kepada memutus mata rantai kemiskinan dengan menggodok dan melahirkan para entrepreneur handal melalui pendidikan kewirausahaan yang disajikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.

Untuk bisa sampai pada tahap tersebut, pendidikan kewirausahaan yang hendak digulirkan oleh pendidikan luar sekolah perlu didesain sedemikian rupa agar berbagai strategi dan pendekatan yang hendak digunakan bisa tepat sasaran dan benar-benar menghasilkan output yang bermutu dan berdaya saing. Tolok ukur paling sederhana dan konkret dari entrepreneur bermutu dan berdaya saing ini antara lain nampak dari kemampuannya untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada pada dirinya dan menciptakan kesempatan bagi banyak individu di sekitarnya. Jika tolok ukur ini tercapai, maka itu berarti pendidikan luar sekolah telah berpartisipasi dalam pembangunan guna mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.



Konsep Dasar Kewirausahaan

A. Makna dan Hakikat Kewirausahaan

Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata *wira* dan *usaha*. Kata *Wira* bermakna: pejuang, pahlawan, berani, utama, gagah berani, luhur, atau perkasa. Sedangkan *usaha* bermakna kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Secara terminologi, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Sementara wirausahawan adalah orang yang dapat mengembangkan produk atau ide baru dan dapat membangun bisnis dengan konsep yang baru.

Wirausahawan pada mulanya ditujukan pada orang-orang yang dapat berdiri sendiri. Di Indonesia kata wirausahawan sering diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai usaha sendiri, yang berani membuka kegiatan produktif secara

mandiri. Padanan kata wirausaha dalam bahasa Inggris adalah *entrepreneurship*. Entrepreneur sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *entreprendre* yang berarti memulai atau melaksanakan.

Dalam konteks kewirausahaan terdapat dua terminologi yang berbeda secara konsep namun memiliki kesamaan dalam praktik, yaitu *enterpreneurship* dan *intrapreneurship*. *Enterpreneurship* diartikan sebagai kemampuan mengelola usaha sendiri (menjadi bos/ atasan untuk dirinya sendiri) sedangkan *intrapreneurship* diartikan sebagai kemampuan menerapkan konsep wirausaha dalam mengelola usaha milik orang lain (memiliki bos/ atasan yang bukan dirinya sendiri).

Menurut Joseph A. Schumpeter, wirausahawan adalah seorang inovator—orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada—yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, menciptakan bentuk organisasi baru, atau mengolah bahan baku yang baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk: (1) memperkenalkan produk baru, (2) memperkenalkan metode produksi baru, (3) membuka pasar yang baru (new market), (4) memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri.

Penekanan dari definisi Schumpeter tersebut adalah bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang melihat adanya

peluang dan menciptakan organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut—setiap orang yang memulai sesuatu bisnis yang baru. Lebih lanjut Schumpeter menjelaskan bahwa entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengevaluasi sebuah peluang bisnis, mendapat sumber daya yang diperlukan untuk mengambil keunggulan darinya, dan memiliki inisiatif untuk mengambil serangkaian tindakan yang efektif, tepat, dan efisien.

Entrepreneur menurut Zimmerer adalah orang yang menciptakan usaha baru dengan menghadapi ketidakpastian dan risiko dengan maksud untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha melalui proses identifikasi peluang dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan. Sementara menurut Frederick Kuratko dan Hodgetts, entrepreneur adalah agen perubahan yang melakukan pencarian secara sengaja, perencanaan yang hati-hati, dan pertimbangan yang seksama ketika melakukan proses entrepreneurial (menjalankan usaha).

Selain definisi di atas, beberapa pengertian lain juga diberikan oleh para tokoh sebagai berikut (Jamil Latief, 2017; Rusydi Ananda dan Tien Rafida, 2016):

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis. (*Achmad Sanusi*)

2. Wirausahawan atau enterpreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan kesempatan bisnis mengumpulkan sumber sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan. (*Geoffrey G. Meredith, dkk*)
3. Wirausahawan atau enterpreneur adalah seseorang yang mengambil risiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis dan menerima imbalan jasa berupa profit *non-financial*. (*Skinner*)
4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*star-up phase*) dan perkembangan usaha (*venture growth*). (*Soeharto Prawiro*)
5. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. (*Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995*)
6. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan (*ability*) dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat

kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup.
(*Soeparman Spemahamidjaja*)

7. Kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil risiko yang ber-sumber pada kemampuan sendiri. (*S. Wijandi*)
8. Kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri (*self-employment*). (*Richard Cantillon*)
9. Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam mencipta-kan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini me-ngandung makna bahwa entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan se-suatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. (*Drucker*)
10. *Entrepreneurship* adalah proses seseorang atau sekelom-pok orang yang memikul risiko ekonomi untuk mencipta-kan organisasi baru yang akan mengeksploitasi teknologi baru atau proses yang inovatif yang menghasilkan nilai untuk orang lain. (*Schram*)
11. *Entrepreneurship* adalah proses seorang individu dalam mengejar peluang tanpa memperhatikan sumberdaya yang dimiliki saat ini. (*Baringer dan Ireland*)
12. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain atau sesuatu yang baru dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko sosial, fisik, dan

keuangan dan menerima imbalan dalam bentuk uang, kepuasan serta kebebasan pribadi. (*Hisrich dan Peter*)

13. Kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. (*Harvey Leibenstein*)
14. Kewirausahaan adalah hasil dari proses menerapkan kreativitas dan inovasi secara sistematis dan teratur terhadap kebutuhan dan peluang yang ada dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau memecahkan masalah konsumen. (*Wijatno*)
15. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. (*Acmad Sanusi dalam Suryana*)
16. Kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat; dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen me-

nyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja. (*Siagian dan Asfahani*)

17. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui aktivitas berpikir kreatif dan inovatif. (*Suryana*)

Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, Suryana (2004; Modul 1) mengidentifikasi enam hakikat penting dari kewirausahaan sebagai berikut:

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis.
2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*).
3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.

4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) dan perkembangan usaha (*venture growth*).
5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*) dan sesuatu yang berbeda (*innovative*) yang bermanfaat memberi nilai lebih.
6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

Dalam konteks sejarah perkembangan konsepnya, Frederick, Kuratko, dan Hodgetts—sebagaimana dikutip Rusydi Ananda dan Tien Rafida (2016)—menjelaskan bahwa kewirausahaan sebenarnya telah berkembang sejak abad ke-11 SM di Phoenicia kuno. Pada saat itu telah terjadi jalur perdagangan dari Syria sampai Spanyol yang dilakukan oleh orang-orang yang telah berani mengambil risiko menghadapi ketidakpastian dan mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahui sebelumnya.

Adapun istilah kewirausahaan sendiri baru mulai terkenal dalam kosa kata dunia usaha atau bisnis pada tahun 1980-an, walaupun istilah kewirausahaan telah muncul pada abad ke-18 (tahun 1755-an) ketika ekonom Perancis Richard Cantillon mengaitkan entrepreneur dengan aktivitas menanggung risiko dalam perekonomian. Menurut Cantillon, entrepreneur adalah *agent who buys means of production at certain prices in order to combine them*.

Pada tahun 1800-an, Jean-Baptiste Say memperkenalkan istilah kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam diskusi entrepreneur sebagai orang yang memindahkan sumber daya ekonomi dari area yang produktivitasnya rendah ke arah yang produktivitasnya tinggi. Jean Baptista Say menambahkan definisi Cantillon dengan konsep entrepreneur sebagai pemimpin. Say menyatakan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang membawa orang lain bersama-sama untuk membangun sebuah organ/ lembaga produktif.

Richard Cantillon (1680–1734), Jean-Baptiste Say (1767–1832), Alfred Marshall (1842–1924), Joseph Schumpeter (1883–1950), dan Frank Knight (1885–1972) merupakan narasumber yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan awal teori kewirausahaan. Berikut ini adalah uraian singkat perkembangan teori klasik kewirausahaan dari kelima tokoh tersebut (Haris Budiyo dan Rianti Setyawasih, 2016):

1. Richard Cantillon (1680–1734)

Richard Cantillon pertama kali menjelaskan konsep wirausaha dan yang pertama kali menjelaskan adanya fungsi kewirausahaan dalam sistem ekonomi. Dalam teori ekonomi, wirausaha merupakan “kontributor” nilai terhadap perekonomian sebuah masyarakat/bangsa. Cantillon mengenali adanya 3 (tiga) agen dalam sistem ekonomi: (1) Pemilik Tanah (modal) berlaku sebagai kapitalis; (2) Wirausaha berlaku sebagai penengah/ penghubung/ penggerak/ penghela; (3) Pekerja sebagai penerima sewa; Wirausaha berperan utama dalam sistem ekonomi, dengan kinerjanya menghasilkan proses pertukaran dan sirkulasi dalam ekonomi; Wirausaha menjalankan usahanya sendiri; Wirausaha bisa juga berprofesi sebagai petani, pengolah, pengrajin, pengangkut, penjamin/pemberi modal (bankir), atau penjual.

Faktor motivasi yang paling utama dalam kegiatan ekonomi adalah memperoleh potensi laba dari kegiatan “beli pada harga tertentu, jual pada harga yang tidak pasti”, dalam hal ini Cantillon mengenali sosok wirausaha sebagai orang yang mau bekerja pada situasi ketidakpastian.

2. Jean-Baptiste Say (1767-1832)

Dalam kegiatan usahanya, seorang wirausaha mampu menjalankan peran sebagai pemimpin (*leader*) dan

manager (*manager*). Dalam kegiatan manusia ada 3 (tiga) jenis operasional yang dilakukan: (1) *theoretical knowledge construction*; (2) *the application of knowledge*; (3) *execution*. Wirausaha bekerja pada wilayah “*the application of knowledge to the creation of a product for human consumption*”. Wirausaha untuk mencapai keberhasilan dalam usahanya memerlukan kualitas (diri) dan pengalaman (mengenali usahanya).

3. Alfred Marshall (1842–1924)

Alfred Marshal mengatakan bahwa dalam kegiatan usahanya, wirausaha bersiap untuk memikul tanggung jawab (risiko) dan mengerjakan semua hal untuk dapat mengendalikannya. Wirausaha mengarahkan kegiatan produksi, mengambil risiko atas peluang bisnis, mengkoordinasikan modal dan pekerja, dan berperan sebagai manajer sekaligus majikan. Wirausaha secara terus menerus mencari peluang untuk meminimasi biaya dalam mencapai hasil tertentu.

4. Joseph Schumpeter (1883–1950)

Menurut Schumpeter, wirausaha berlaku sebagai pemimpin dalam kegiatan usahanya, berlaku sebagai inovator sehingga usaha yang dijalankannya berstatus sebagai *prime mover* dalam sistem ekonomi; Wirausaha

muncul dengan memperkenalkan *new combinations* atau *innovations*. Oleh Schumpeter, inovasi didudukkan sebagai faktor endogen utama yang menyebabkan perubahan dalam pengembangan usaha. Kombinasi baru yang diperkenalkan oleh wirausaha akan menghancurkan keseimbangan ekonomi yang statis dalam aliran sirkulasinya. Sebutan wirausaha bukan hanya untuk peran direktur dan pemilik usaha saja, sebutan itu berlaku bagi seseorang yang mampu membuat kombinasi baru apapun posisinya dalam sebuah usaha.

Wirausaha baru bisa tampil dengan membuka usaha baru yang mengenalkan kombinasi baru, akan menggantikan usaha yang ada sebelumnya bila usaha tersebut tidak segera membuat kombinasi yang baru pula. Kombinasi baru itu meliputi pengenalan produk atau jasa baru, metode baru dalam berproduksi, membuka peluang pasar yang baru, menemukan sumber baru pasokan bahan baku, atau implementasi model pengorganisasian yang baru. Konsep wirausaha lebih luas dibandingkan konsep konvensional sebelumnya, sebutan wirausaha tidak hanya bagi seseorang yang menjalankan usahanya sendiri, juga sebaliknya menjadi lebih sempit dibandingkan konsep sebelumnya, yakni tidak semua orang yang memiliki dan memimpin usahanya sendiri dapat disebut wirausaha.

5. Frank Knight (1885–1972)

Frank Knight menambahkan istilah lain yang berbeda dengan istilah *uncertainty* (ketidakpastian) sebagaimana dikemukakan oleh Cantillon yaitu *risk* (risiko), karena dalam hal ini ketidakpastian masih memberikan kemungkinan diperolehnya laba. Knight mengartikan seorang wirausaha sebagai seseorang yang memiliki kemauan untuk menghadapi ketidakpastian dan kemampuan melakukan *judgmental decision maker* (pengambilan keputusan berdasarkan estimasi dan akurasi atas estimasi yang dilakukannya terhadap sebuah nilai yang diharapkan).

Kerangka Berpikir Kewirausahaan

Kegiatan wirausaha tidak dapat dilepaskan dari unsur individu wirausahawan yang bersangkutan. Maju mundurnya usaha wirausahawan akan sangat ditentukan oleh inisiatif, gagasan dan inovasi, karya dan kreativitas, serta pikiran positif sang wirausahawan.

Pola pikir *entrepreneurship* sendiri dicirikan memiliki karakter produktif, bukan konsumtif. Artinya seorang entrepreneur selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien. Dia selalu mencari alternatif bila sumber daya yang ada terbatas. Dia cenderung berperan sebagai *job creator* ketimbang sekadar *job seeker*. Semua karakter

tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir yang positif, kreatif, keuangan, dan pola pikir yang di milikinya. Pola pikir produktif sendiri bisa ditumbuhkan jika kita memahami dan menghargai kelimpahan maupun keterbatasan yang ada. Dengan pola berpikir produktif, semua hambatan akan di ubah menjadi peluang untuk meminimalisasi ancaman, dan semua kekuatan akan menjadi suatu kesempatan untuk lebih di kembangkan kesempatannya.

Seperti kita ketahui, sikap pola pikir sering mendasari seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan. Karena-nya untuk menjadi seorang pengusaha/wirausaha diperlukan sikap dan pola pikir (kerangka berpikir) positif dalam meraih kesuksesan. Dalam konteks inilah berpikir kreatif dan inovatif menjadi hal yang sangat diperlukan dalam dunia kewirausahaan. Seorang wirausahawan perlu mengetahui cara berpikir kreatif dan inovatif karena hal itu merupakan modal yang sangat penting.

Perkembangan bisnis akan ditentukan oleh kreativitas wirausaha. Dalam menghadapi medan persaingan yang ketat, sebuah perubahan diperlukan saat bisnis sudah tidak lagi berkembang dan disitulah saatnya kreativitas diperlukan guna melakukan perubahan—kehadiran produk atau jasa baru—agar sesuai dengan perkembangan pasar. Itulah mengapa seorang wirausahawan harus benar-benar kreatif dan inovatif agar dapat keluar, melihat, menangkap peluang, dan menciptakan produk

dan jasa yang dapat diterima oleh pasar karena sejatinya pasar tidak membutuhkan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi yang dibutuhkan adalah solusi dan manfaat.

Lantas apa yang dimaksud dengan kreatif dan inovatif? Menurut Theodore Levit (Suryana, 2004; Modul 1), kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Menurut Levit, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru (*thinking new thing*). Oleh karena itu, menurutnya kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Kreativitas juga dapat dimaknai sebagai berpikir untuk menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada (*generating something from nothing*). Pengertian lainnya, kreativitas adalah kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda (*out of the box*), tidak umum, orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Memiliki kreativitas tinggi berarti mempunyai kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda (*thinking new thing and different*). Kemampuan ini bisa saja bersumber dari sesuatu yang lama tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baru. Bahkan tidak jarang ide-ide kreativitas justru sering muncul ketika seorang wirausaha melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda.

Dengan demikian kreativitas (daya cipta) mengandung beberapa aspek penting, antara lain (1) menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada (*generating something from nothing*), (2) muncul ketika melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda (*arise when look at something old and think something new and different*), dan (3) menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik (*change something with something more simple and better*).

Zimmerer menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) tahapan dalam proses berpikir kreatif dalam kewirausahaan (Suharyono, 2017), yaitu tahap Persiapan (*preparation*), Penyelidikan (*investigation*), Transformasi (*transformation*), Penetasan (*incubation*), Penerangan (*illumination*), Pengujian (*verification*), dan tahap Implementasi (*implementation*).

Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, dan Dean A. Shepherd—sebagaimana dikutip Indra Widjaja (2014)—menjabarkan sumber-sumber ide yang penting bagi wirausahawan sebagai langkah awal bagi tumbuhnya kreativitas, yaitu:

1. **Pelanggan.** Para pengusaha yang potensial harus terus-menerus memerhatikan para pelanggan yang potensial. Perhatian ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan ide dan kebutuhan potensial secara informal atau pengaturan secara formal yang ditujukan bagi para pelanggan agar dapat memiliki kesempatan untuk mengungkapkan opini-opininya.

2. ***Produk dan Jasa yang Sudah Ada.*** Para pengusaha yang potensial juga harus membentuk metode formal untuk mengawasi dan mengevaluasi produk dan jasa yang kompetitif di pasar.
3. ***Saluran Distribusi.*** Dari seorang pelayan toko di sebuah toko serba ada yang besar, seorang pengusaha mengetahui bahwa penyebab kaus kakinya tidak terjual dengan baik adalah warnanya. Dengan memerhatikan saran tersebut dan melakukan perubahan warna yang menarik, perusahaannya menjadi salah satu penyuplai utama kaus kaki tanpa merek di salah satu Negara bagian Amerika Serikat.
4. ***Penelitian dan Pengembangan.*** Sumber ide-ide baru yang paling besar adalah upaya-upaya “penelitian dan pengembangan” pengusaha itu sendiri, yang mungkin merupakan usaha keras formal yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang pada saat.

Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, maupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha awalnya dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil. Karenanya bagi seorang wirausahawan, kreativitas adalah modal yang sangat penting. Dengan kreativitas, seorang wirausahawan akan mampu keluar,

melihat, dan menangkap peluang dan kreativitas juga berguna untuk memenangkan persaingan.

Kreativitas menjadi sangat penting bagi seorang wirausahawan karena wirausaha yang kreatif dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat sebelumnya. Anda bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memperkenalkan produk atau jasa baru yang terus-menerus diperbaharui. Seorang wirausahawan tidak harus jadi penemu (inventor), tetapi yang paling penting adalah mampu menjembatani penemu dari produk yang dipilih dengan pasar.

Pada kondisi tertentu, sebuah kreativitas tentu saja akan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. James L. Adams dalam buku *Conceptual Blockbusting* mengidentifikasi hambatan kreativitas dalam bentuk klasifikasi sebagai berikut (Munjiati Munawaroh, 2016):

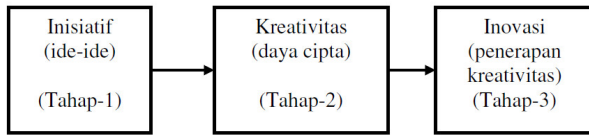
Jenis Hambatan	Contoh
Hambatan Persepsi	▪ Pola pikir stereotip ▪ Membatasi masalah secara berlebihan ▪ Terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi
Hambatan Emosi	▪ Takut mengambil risiko ▪ Tidak menyukai ketidakpastian ▪ Lebih suka menilai dari pada menghasilkan gagasan ▪ Menganggap remeh suatu masalah ▪ Tergesa-gesa menyelesaikan masalah

Hambatan Kultural	▪ Kultur menghambat pengakumulasian gagasan
Hambatan Lingkungan	▪ Kurangnya dukungan sarana, prasarana kerja
Hambatan Intelektual	▪ Terlalu mengandalkan logika ▪ Enggan menggunakan intuisi ▪ Memakai pengalaman atau cara lama yang terbukti efektif hasilnya

Tabel Hambatan-hambatan Kreativitas

Adapun pengertian inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya, dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Atau dapat pula didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian serta mengubah peluang suatu gagasan dan ide-ide menjadi sebuah karya baru yang dapat dijual. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan.

Apabila wirausahawan ingin sukses dan terus dapat menjalankan usahanya, ia harus membuat produk-produk yang dihasilkan dengan inovasi-inovasi baru. Keterlambatan berinovasi dalam produk dan pelayanan akan mengakibatkan kegagalan bagi seorang wirausaha. Jika digambarkan, maka tahapan dari sebuah inovasi adalah sebagai berikut:



Bagan Tahap-tahap Inovasi

Dari uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kreatif dan inovatif sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kreatif dan inovatif itu sangat menentukan kualitas hidup kita, terlebih bagi seorang entrepreneur yang dituntut untuk memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif karena keduanya akan menentukan hasil dari usaha yang dijalankan.

Setelah mengubah pola pikir, seorang wirausahawan juga perlu memahami hambatan apa saja yang mungkin muncul pada saat menjalankan usahanya. Setiap kita tentu ingin memiliki sebuah usaha yang sukses. Karena itu kita harus belajar mengetahui apa saja yang menjadi penghalang tercapainya impian tersebut. Dengan mengetahui berbagai hambatan dalam menjalankan usaha, maka kita dapat merumuskan langkah yang baik untuk menghilangkan masalah yang menghalangi kesuksesan kita tersebut.

Banyak faktor yang dapat melatarbelakangi kesuksesan seseorang dan banyak juga faktor yang dapat menghalangi kesuksesan tersebut. Beberapa faktor tersebut berasal dari dalam diri kita sendiri (internal) dan beberapa lainnya berada dari faktor luar (eksternal):

1) Faktor Internal

Hambatan yang menghalangi kita dalam memulai sebuah usaha pertama datang dari diri kita sendiri. Hambatan atau rintangan tersebut lebih kepada kualitas kepribadian kita yang tidak mendukung untuk memulai sebuah usaha. Hambatan ini lebih kepada kemampuan mental dan keterampilan yang kita akan kita gunakan. Beberapa faktor internal yang dapat menjadi penghalang terciptanya usaha mandiri antara lain:

- a. Perasaan takut gagal dan tidak mau mengambil risiko;
- b. Rendahnya kemampuan dan pengalaman dalam mengelola usaha; dan
- c. Tidak memiliki modal yang cukup.

Perasaan atau emosi adalah hal paling mendasar yang harus kita taklukkan terlebih dahulu jika kita ingin memulai sebuah bisnis. Disini kita harus menghilangkan berbagai perasaan atau emosi negatif yang menghalangi usaha kita dalam membangun sebuah bisnis yang diinginkan. Beberapa perasaan yang mengganggu bahkan merusak yaitu perasaan takut gagal ketika hendak memulai sebuah usaha, rasa takut untuk mengambil risiko dan hanya ingin berada pada posisi yang aman, rasa malas dan lain sebagainya.

Untuk dapat sukses dalam membuka usaha maka kita harus menjadi pribadi yang tangguh dan untuk menjadi

pribadi yang tangguh kita harus menghilangkan berbagai perasaan atau emosi inegatif yang akan menghalangi kita dalam melakukan sebuah usaha. Kita bisa berlatih dan belajar tentang manajemen diri atau bagaimana mengelola emosi negatif.

Kemampuan atau skill juga merupakan salah satu hal yang sering kali menjadi hambatan dalam memulai usaha. Sering kali kita harus menelan pil pahit kegagalan hanya karena kemampuan kita yang terbatas. Memang letak sukses seseorang banyak dipengaruhi oleh kemampuan. Jika tidak mampu maka kita akan lebih rentan dengan kegagalan. Sebelum memulai sebuah bisnis maka sangat dianjurkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan yang kita miliki untuk menjalankan usaha yang di pilih. Kita harus tahu keterampilan apa yang dibutuhkan dan apakah kita mampu atau tidak melakukannya. Ini merupakan salah satu alasan banyak pakar menyarankan kepada kita untuk memulai sebuah bisnis yang kita kuasai, membangun bisnis berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki. Untuk menutupi apa yang tidak kita miliki maka kita harus berani belajar dan mengambil contoh dan pengalaman dari orang lain.

Selanjutnya, hambatan yang paling banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha adalah modal. Benar memang, kekurangan modal merupakan hal yang sangat sering dialami

oleh kita yang baru ingin memulai sebuah bisnis. Lalu sebenarnya apakah modal merupakan harga mati untuk memulai sesuatu? Jawabnya adalah benar. Namun perlu diingat bahwa modal dalam sebuah usaha tidak hanya dalam bentuk uang. Kesempatan yang bagus, peluang yang menjanjikan, dan kemampuan yang memadai merupakan bentuk modal lain yang juga bisa dijadikan sebagai senjata untuk mengatasi hambatan permodalan finansial. Dengan modal-modal tersebut, kita masih bisa memulai usaha dengan memanfaatkan modal finansial dari pihak lain seperti dengan cara meminjam, menyewa, dan lain sebagainya.

2) Faktor Eksternal

Selain faktor internal, ada pula beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi kendala dan hambatan saat kita memutuskan untuk membuka sebuah usaha. Faktor tersebut menjadi penghalang terutama karena kita memiliki keterbatasan dalam menangani hal tersebut. Ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya waktu, faktor eksternal tersebut tidak akan menjadi masalah yang serius. Hambatan dari luar tersebut secara garis besar terdiri dari dua hal sebagai berikut:

- a. Persaingan pasar yang ketat; dan
- b. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Setidaknya dua hal di atas yang umumnya akan menjadi kendala yang cukup berarti saat kita hendak memulai membuka sebuah usaha. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kedua hambatan tersebut dapat diatasi dengan merumuskan berbagai upaya dan rencana penanganannya sejak awal.

B. Proses Kewirausahaan

Secara umum, proses kewirausahaan dapat dijabarkan ke dalam empat tahapan sebagai berikut:

1. ***Tahap memulai***; yaitu tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan apakah di bidang pertanian, industri/ manufaktur/ produksi atau jasa.

William D. Bygrave dalam *The Portable MBA in Entrepreneurship* (Haris Budiyono dan Rianti Setyawasih (2016) menjelaskan bahwa sesungguhnya ada 3 (tiga) faktor yang membuka jalan bagi seseorang untuk memulai atau membuka usaha (menjadi seorang wirausaha), yaitu pribadi, sosiologis (keluarga), dan lingkungan. Faktor lainnya, yaitu organisasi, merupakan faktor pendukung setelah usaha itu berjalan. Seseorang yang memulai dengan munculnya ide

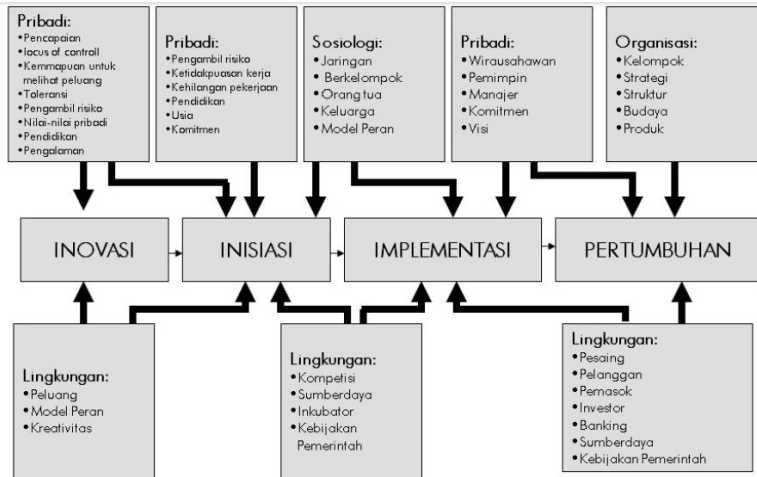
(gagasan) dengan cara mencari atau muncul seketika dengan datangnya *chance* (peluang). Dalam hal ini apakah dia meneruskan atau tidak meneruskan gagasannya bergantung pada alternatif pertimbangan lainnya, berupa prospek karir yang sedang dijalannya, keluarga, teman, model peran yang menjadi panutannya, situasi ekonomi yang dihadapi saat itu, dan keberadaan sumber daya yang dapat diakses di sekitarnya.

2. ***Tahap melaksanakan usaha;*** yaitu tahap seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek: pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi.
3. ***Tahap Mempertahankan usaha;*** yaitu tahap di mana wirausahawan melakukan analisis perkembangan sesuai dengan hasil yang telah dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
4. ***Tahap Mengembangkan usaha;*** yaitu tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil.

Carol F. Moore dalam artikel bertajuk *“Understanding Entrepreneurial Behavior”* (J. A. Pearce II and R. B. Robinson,

Jr., (ed.), *Academy of Management Best Papers Proceedings, 46th Annual Meeting of the Academy of Management*, Chicago, 1986) sebagaimana dikutip Haris Budiyono dan Rianti Setyawasih (2016) memberikan kontribusi terhadap teori kewirausahaan berupa model proses kewirausahaan. Secara umum model ini menggambarkan bahwa proses kewirausahaan memuat 4 (empat) faktor: (a) pribadi;¹ (b) sosiologi;² (c) lingkungan;³ dan (d) organisasi yang terbagi ke dalam 4 tahapan, yaitu inovasi; inisiasi; implementasi; dan pertumbuhan.

-
- 1 Faktor pribadi yang memengaruhi seseorang untuk memulai usaha antara lain meliputi: *knowledge* (pengetahuan); *experience* (pengalaman); *personal value* (nilai, persepsi, hobi); *achievement* (pencapaian); *risk taking* (pertimbangan risiko); *job loss* (pengangguran); *job dissatisfaction* (ketidakpuasan kerja); *age* (umur); dan *commitment* (komitmen).
 - 2 Faktor sosiologi yang memengaruhi seseorang untuk memulai usaha antara lain meliputi: *networks* (jaringan); *teams* (tim); *parents* (orang tua); *family* (keluarga); dan *role models internal* (model internal).
 - 3 Faktor lingkungan yang memengaruhi seseorang untuk memulai usaha antara lain meliputi: *opportunities* (peluang); *role models external* (model eksternal); *creativity* (kreativitas); *competition* (bersaing); *resources* (sumber daya input); *incubator* (inkubator); *government policy* (kebijakan pemerintah).



Sumber: Carol Moore's model in "Understanding Entrepreneurial Behaviour", in J.A. Pearce II and R.B. Robinson, Jr. Academy of Management Best Papers Proceedings, 46th Annual Meeting of Academy of Management, Chicago, 1996.

Gambar Model Proses Kewirausahaan

- ❖ Tahap Inovasi dipengaruhi oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor Pribadi meliputi: pencapaian, *locus of control*, kemampuan untuk melihat peluang, toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, dan pengalaman. Sementara Faktor Lingkungan meliputi: peluang, model peran, dan kreativitas.
- ❖ Tahap Inisiasi/ *trigerring event* (Marc J. Dollinger menyebutnya dengan istilah *impetus for entrepreneurship*) dipengaruhi oleh Faktor Pribadi, Faktor Sosiologis (keluarga/pertemanan), dan Faktor Lingkungan. Faktor Pribadi meliputi: pengambilan risiko, ketidakpuasan kerja, kehilangan pekerjaan, pendidikan, usia, dan komitmen.

Faktor Sosiologis (keluarga/pertemanan) meliputi: jaringan, berkelompok (bantuan, kerjasama, tim), orang tua, keluarga, dan model peran. Faktor Lingkungan meliputi: kompetisi, sumberdaya, inkubator, dan kebijakan pemerintah.

- ❖ Tahap Implementasi dipengaruhi oleh Faktor Pribadi, Faktor Sosiologis (keluarga/pertemanan), dan Faktor Lingkungan. Faktor Pribadi meliputi: wirausahawan, pemimpin, manajer komitmen, dan visi. Faktor Sosiologis (keluarga/pertemanan) meliputi: jaringan, berkelompok (bantuan, kerjasama, tim), orang tua, keluarga, dan model peran. Faktor Lingkungan meliputi: pesaing, pelanggan, pemasok, investor, banking, sumberdaya, dan kebijakan pemerintah.
- ❖ Tahap Pertumbuhan dipengaruhi oleh Faktor Pribadi, Faktor Organisasi, dan Faktor Lingkungan. Faktor Pribadi meliputi: wirausahawan, pemimpin, manajer komitmen, dan visi. Faktor Organisasi meliputi: kelompok, strategi, struktur, budaya, dan produk. Faktor Lingkungan meliputi: pesaing, pelanggan, pemasok, investor, banking, sumberdaya, dan kebijakan pemerintah.

C. Karakteristik dan Jenis Kewirausahaan

Kegiatan wirausaha tidak dapat dilepaskan dari karakter wirausahawan yang bersangkutan. Maju mundurnya sebuah

usaha akan sangat ditentukan oleh inisiatif, gagasan, inovasi, karya, kreativitas, dan pola pikir positif wirausahawan itu sendiri. Keberhasilan wirausaha dicapai apabila wirausahawan menggunakan gagasan terhadap produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk mengendalikan perubahan.

Menurut Geoffrey G. Meredith, karakteristik dan ciri-ciri kewirausahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No.	Ciri-ciri	Watak
1	Percaya diri	Keyakinan, ketidaktergantungan, individualistik, dan optimisme
2	Berorientasi pada tugas dan hasil	Kebutuhan untuk tugas berprestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras mempunyai dorongan kuat, energik dan inisiatif
3	Pengambilan risiko	Kemampuan untuk mengambil risiko yang wajar dan suka tantangan
4	Kepemimpinan	Perilaku sebagai pemimpin, bergul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik
5	Keorsinilan	Inovatif dan kreatif serta fleksibel
6	Berorientasi pada masa depan	Pandangan kedepan dan perspektif
7	Jujur dan tekun	Memiliki keyakinan bahwa hidup sama dengan kerja

Tabel Ciri dan watak kewirausahaan

Sementara menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer, karakteristik dari seorang wirausahawan/ entrepreneur meliputi:

- a. *Desire for responsibility*, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya.
- b. *Preference for moderate risk*, yaitu lebih memilih risiko yang moderat, artinya ia selalu menghindari risiko yang rendah dan menghindari risiko yang tinggi.
- c. *Confidence in their ability to success*, yaitu percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil.
- d. *Desire for immediate feedback*, yaitu selalu menghendaki umpan balik segera.
- e. *High level of energy*, yaitu memilikin semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
- f. *Skill at organizing*, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
- g. *Value of achievement over money*, yaitu selalu menilai prestasi dengan uang.

Dari berbagai pendapat dari referensi yang ada, ciri dan karakteristik seorang wirausahawan secara umum dapat dirangkum sebagai berikut (A. Rusdiana, 2018; 122-125 & Suharyono, 2017):

a. Percaya Diri

Karakter yang masuk dalam ciri percaya diri adalah optimis, mandiri, jujur, berintegritas, matang, seimbang, fokus pada diri, dan bertekad kuat. Dengan karakter tersebut, seorang wirausahawan percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang hendak dicapainya. Ia juga tidak akan goyah menghadapi gangguan di tengah perjalanan untuk mencapai tujuan, memiliki harga diri yang tinggi, dan tidak mudah menyerah. Pada saat mengalami kegagalan, ia menerimanya sebagai sumber belajar untuk menentukan upaya-upaya selanjutnya.

b. Berani Mengambil Risiko

Ciri ini meliputi karakter pengambil risiko yang moderat dan dapat diperhitungkan, mampu belajar dari kegagalan, toleran terhadap ketidakpastian, menyukai tantangan, dan agresif. Dengan karakter tersebut, seorang wirausahawan menyadari bahwa tidak semua faktor yang memengaruhi tercapainya hasil berada dalam pengendaliannya. Oleh karena itu, dalam setiap usaha untuk mencapai keberhasilan, kemungkinan untuk gagal dianggap sebagai suatu risiko. Dan seorang wirausahawan hanya akan mengambil pilihan dengan risiko yang wajar dan realistis.

Dengan kata lain, seorang wirausahawan menyukai risiko karena mereka ingin berhasil. Mereka mendapat kepuasan besar dalam melakukan tugas-tugas yang sulit dengan menerapkan beragam keterampilan yang dimilikinya. Pada umumnya orang takut menghadapi risiko karena ingin terus berada di zona aman. Padahal kita tahu bahwa setiap aktivitas pekerjaan pasti mengandung risiko dan setiap risiko pasti mengandung potensi kegagalan dan kesuksesan. Karenanya salah satu tolok ukur yang dapat dijadikan acuan bagi kesuksesan sebuah usaha adalah terkait keputusan yang diambil seorang wirausahawan dalam upaya menghadapi berbagai risiko yang muncul.

Dalam konteks ini, keberanian dalam mengambil risiko tidak sama spekulasi. Risiko yang ditanggung oleh seorang wirausahawan adalah risiko yang sudah diperhitungkan secara matang. Richard Cantillon mengatakan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang berani menanggung risiko dan keberanian menanggung risiko yang disertai dengan perhitungan yang mapan merupakan karakteristik dari seorang wirausahawan unggul.

c. Kreatif-Inovatif

Energik dan banyak akal (*resourcefull*), pengetahuan dan keterampilan luas (*versatile*), berdaya cipta, imajinatif, dan luwes (fleksibel) adalah beberapa contoh karakter yang

menjadi ciri seorang wirausahawan kreatif dan inovatif. Tidak menyukai kerutinan atau kemapanan menyebabkan seorang wirausahawan selalu kreatif menemukan hal-hal baru (inovatif). Ia tidak menyukai jalan buntu dan akan menghadapi segala situasi dan kondisi dengan sikap fleksibel dan selalu berupaya menemukan sumber-sumber alternatif sesuai dengan wawasan yang dimilikinya.

d. Berorientasi Pada Tugas dan Hasil

Karakter ini meliputi kebutuhan terhadap prestasi (*need for achievement*), tekun dan teliti, berorientasi pada sasaran, efektif dan produktif, serta berorientasi laba. Seorang wirausahawan selalu berusaha mewujudkan setiap ide/gagasannya. Begitu ia telah memulai tindakan, perhatiannya tertuju pada hasil yang hendak dicapainya, Dengan motivasi untuk berprestasi yang tinggi dan persediaan energi yang cukup, ia berupaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya.

e. Memiliki Jiwa Kepemimpinan

Wirausahawan pada hakikatnya adalah seorang pemimpin karena ia harus mencari peluang, memulai proyek, mengumpulkan sumber daya manusia dan finansial yang diperlukan untuk melaksanakan proyek, menentukan tujuan untuk mereka sendiri dan orang lain, serta bertindak untuk

memimpin dan membimbing orang lain mencapai tujuan. Kepemimpinan (*leadership*) adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok sehingga memiliki empat aplikasi tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam melakukan kepemimpinannya dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan yang dirasakan (*perceived power*), seperti memaksa (*coercive*), imbalan (*reward*), sah (*legitimate*), ahli (*expert*), dan referensi (*referent*).

Menurut Marshall, kepemimpinan yang tepat pada saat ini adalah kepemimpinan kolaborasi, di mana seorang pemimpin memiliki fungsi utama sebagai sponsor, fasilitator, pelatih, papan gema, agen katalis, dokter, anggota, dan sekaligus sebagai manajer administrator. Sementara menurut Reddin, tipe kepemimpinan dibagi menjadi 8 tipe, yaitu *deserter*, *bureaucrat*, *missionary*, *develop*, *autocrat*, *benevolent*, *autocrat compromise*, dan *executif*.

f. Sadar Arus Waktu

Seorang wirausahawan harus sadar arus waktu yang ditandai dengan adanya karakter berupa memanfaatkan waktu dengan efisien, terarah ke masa depan, perspektif, menjalani waktu kronos, dan menghayati waktu kairos. Dengan karakter tersebut, seorang wirausahawan dapat menggunakan kesempatan yang ada (*kairos*) sebaik

mungkin, karena ia sadar bahwa waktu memiliki kurun objektif (kronos) yang sama bagi setiap orang. Tidak ada orang yang memiliki lebih dari 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 52 minggu dalam per tahun.

g. Terobsesi oleh Kesempatan

Seorang wirausahawan selalu mencari dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menciptakan produk atau jasa yang baru atau lebih baik dari yang sudah ada. Kesempatan dapat muncul karena adanya produk baru seperti munculnya telepon seluler, komputer, dan lain-lain.

h. Memiliki Motif Berprestasi

Motivasi berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti *to move* atau menggerakkan. Suriasimantri berpendapat bahwa motivasi merupakan dorongan, hasrat, atau kebutuhan seseorang untuk berperilaku tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Motif akan menghasilkan mobilisasi energi (semangat) dan menguatkan perilaku seseorang, serta kendaraan untuk membawa dan mengarahkan perilaku seseorang.

Seseorang memiliki minat untuk berwirausaha karena adanya motif berprestasi (*achievement motive*). Motif berprestasi merupakan nilai sosial yang menekankan pada

hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Kebutuhan berprestasi seorang wirausahawan nampak dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Menurut Suryana, ciri-ciri seorang wirausahawan yang memiliki motif berprestasi antara lain: (1) ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya; (2) selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan atau kegagalannya; (3) memiliki tanggung jawab personal yang tinggi; (4) berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan; (5) menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang.

Berdasarkan pendapat tersebut, setidaknya ada dua indikator dalam motivasi berprestasi, yaitu mengharapkan sukses dan takut akan kegagalan. Oleh sebab itu hakikat motivasi berprestasi adalah rangsangan-rangsangan atau daya dorong yang ada dalam diri seseorang untuk belajar dan berprestasi belajar tinggi sesuai yang diharapkan.

i. **Memiliki Kemampuan Manajerial & Mampu Mengerjakan Tugas dengan Baik**

Memiliki kemampuan manajerial adalah salah satu aspek yang harus ada dalam diri setiap wirausahawan. Kemampuan manajerial merupakan kemampuan untuk mengambil

keputusan usaha dan melaksanakan seluruh fungsi manajemen (membuat rencana usaha, mengorganisasikan usaha, mengelola usaha (termasuk mengelola sumber daya manusia), melakukan publikasi/promosi hasil usaha, dan mengontrol pelaksanaan usaha).

Seluruh kemampuan manajerial tersebut harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi sehingga seluruh aspek manajerial tersebut tidak kontra produktif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Seorang wirausahawan juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan sebuah tugas dengan lebih baik daripada yang lainnya.

j. Memiliki Kesabaran dan Kesiapan

Dalam setiap usaha yang dijalankan pasti akan selalu ada risiko untuk mengalami gagal, kesulitan dana, dan lain sebagainya. Karena itu agar usahanya berhasil diperlukan waktu, kesabaran, dan kesiapan dalam menghadapi kendala-kendala yang datang.

k. Tidak Menunggu Semua Ada

Memulai usaha tidak perlu menunggu semua harus ada. Hal yang justru harus kita lakukan adalah memanfaatkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada dan melengkapinya seiring dengan berjalan waktu. Perlu diingat bahwa

hal yang paling esensial untuk memulai bisnis adalah ide dan gagasan serta cara mewujudkannya.

l. Memiliki Hubungan Sosial yang Baik

Memulai usaha sering memerlukan bantuan orang lain, seperti keluarga, teman, dan pihak investor atau penyedia dana. Karena itu, wirausahawan sukses adalah mereka yang dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan internal (dalam perusahaan) maupun lingkungan eksternal (pemerintah, masyarakat, pemasok, pesaing, dan lain-lain).

Teknik menjalin hubungan baik antara wirausahawan dengan lingkungannya ini harus dilakukan dalam satu tatanan etika wirausaha yang dicirikan dengan tingkah laku yang baik, sopan santun, saling tolong menolong, tenggang rasa, saling menghormati, dan serangkaian etika wirausaha lainnya.

m. Menyukai yang Kita Lakukan

Modal utama dalam menjalani sebuah usaha adalah adanya rasa suka/ minat/ senang terhadap usaha yang kita lakukan. Tanpa adanya minat, meski didukung oleh berbagai sumberdaya, usaha yang dijalankan akan mudah berhenti di tengah jalan saat mengalami berbagai persoalan.

- n. **Menguasai Ilmu dalam Bidang Usaha yang Dilakukan**
Selain minat terhadap bidang usaha yang dijalankan, pengetahuan yang berkaitan dengan segala hal yang menyangkut usaha yang akan dijalankan adalah modal yang sangat berarti. Dengan modal ilmu (*skill*) yang memadai, usaha yang dihadapi tidak akan tersendat karena segalanya sudah dipersiapkan, dikelola, dan disajikan dengan baik, matang, dan terukur. Konsumen pun akan cenderung membeli barang atau jasa di tempat dengan pengelolaan atau penyajiannya baik.

- o. **Memiliki Modal Usaha**
Wirausahawan yang akan membuka usaha tentu memerlukan adanya modal. Modal itu dapat berupa modal sendiri atau modal dari hasil kerjasama dengan orang lain. Berkaitan dengan permodalan ini, perlu digarisbawahi bahwa modal tidak semata berkaitan dengan aspek finansial atau keuangan. Potensi diri, relasi yang baik, dan adanya kepercayaan dari pihak lain juga merupakan modal yang tidak kalah penting dan sudah cukup untuk digunakan sebagai senjata untuk memulai sebuah usaha.

- p. **Berani Mengambil Keputusan**
Masa depan sebuah usaha ditentukan oleh hasil keputusan yang diambil. Data kuantitatif biasanya tersedia untuk me-

ngambil keputusan rutin, tetapi fakta dan angka kerap kali tidak berarti bagi keputusan tingkat puncak yang memengaruhi masa depan sebuah usaha. Dalam setiap problem solving-pun akan selalu diikuti dengan pengambilan keputusan dalam rangka memecahkan masalah yang muncul. Orientasi sikap pengambilan keputusan ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal individu seorang wirausawan serta faktor eksternal dari lingkungan mikro dan makro perusahaan. Salah satu karakteristik seorang wirausahawan dapat dilihat dari caranya mengambil keputusan yang cepat dan sistematis, berinisiatif dan proaktif, dinamis, tanggap terhadap kritikan dan saran, kooperatif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan.

q. Memiliki Komitmen dalam Pekerjaan

Memiliki komitmen dalam pekerjaan bermakna bahwa setiap wirausahawan hendaknya berkomitmen dalam mengelola usaha yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian sepenuhnya. Seorang wirausahawan yang memiliki komitmen atas pekerjaannya tidak akan membiarkan usahanya berjalan di tempat, tetapi selalu berpikir dan berusaha agar usahanya itu dapat berkembang dan memiliki keunggulan kompetisi dengan yang lainnya. Wirausahawan yang berkomitmen terhadap

pekerjaannya juga harus berani bangkit dari kegagalan dan mampu mengubah setiap masalah yang muncul sebagai sebuah peluang.

Jenis Kewirausahaan

Jenis-jenis *entrepreneurship* menurut Clarence Danhof—sebagaimana dikutip J. Winardi (2003) adalah:

- 1) *Innovating Entrepreneurship*; Kewirausahaan jenis ini dicirikan oleh pengumpulan informasi secara agresif serta analisis tentang hasil-hasil yang dicapai dan kombinasi-kombinasi baru faktor-faktor produksi.
- 2) *Imitative Entrepreneurship*; Kewirausahaan jenis ini dicirikan oleh kesediaan untuk menetapkan inovasi-inovasi yang berhasil diterapkan oleh kelompok *innovating entrepreneur*.
- 3) *Fabian Entrepreneurship*; Kewirausahaan jenis ini dicirikan oleh sikap yang teramat hati-hati yang segera melaksanakan peniruan-peniruan menjadi jelas sekali, bahwa apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi *relative* mereka di dalam industri yang bersangkutan
- 4) *Drone Entrepreneurship*; Kewirausahaan jenis ini dicirikan oleh penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang un-

tuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi, sekalipun tersebut akan mengakibatkan mereka merugi dibandingkan dengan para produsen lainnya.

Memilih jenis dan bidang usaha yang digeluti tentunya memiliki pertimbangan tersendiri, karena melalui pertimbangan yang matanglah peluang keberhasilan usaha yang digeluti akan semakin tinggi. Secara umum, paling tidak ada 3 jenis kategori usaha yang menjadi referensi kewirausahaan, yaitu (Rusydi Ananda dan Tien Rafida, 2016):

1. Usaha Produksi (*Manufacturing*)

Usaha produksi adalah usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Oleh karena itu sumber keunggulan usaha produksi dalam bersaing terkait dengan kualitas, kontinuitas, dan harga bahan baku yang dipasok oleh pemasok, serta teknologi produksinya. Dengan kata lain, bidang usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang baik dalam bentuk penggalan/pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan maupun mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai.

Usaha produksi diklasifikasikan menjadi dua tingkatan yaitu primer dan sekunder. Produk primer mengacu pada penggalan sumberdaya alam atau penggunaan sumberdaya berada di dalam bumi. Sedangkan usaha produksi

skunder merupakan lanjutan dari produk primer. Sebagai contoh kayu gelondongan dibuat papan (primer), papan dibuat furniture dan interior (sekunder); kapas dibuat benang tenun (primer), benang tenun dibuat kain songket (sekunder), dan seterusnya.

Salah satu bidang usaha produksi yang saat ini banyak diminati adalah usaha *home industry*, yaitu sebuah unit usaha skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Jika merujuk pada produk yang dihasilkan, *home industry* dapat diklasifikasi pada industri produk makanan, produk kerajinan, dan pemberdayaan lingkungan.

2. Usaha Perdagangan (*Trading*)

Usaha perdagangan dapat dikelompokkan menjadi usaha retail dan distributor. Usaha retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Usaha retail ini merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.

Usaha retail juga sering disebut usaha eceran, di mana jenis produk yang dibuat oleh usaha produksi ditawarkan di warung, toko, mini market, dan lain-lain. Meski skalanya kecil, jenis usaha perdagangan retail memainkan peranan yang penting dalam penyaluran barang yang dibuat oleh usaha produksi kepada konsumen akhir. Melalui pengusaha retail, pihak produsen dapat memperoleh informasi

berharga tentang barang yang diproduksinya. Beberapa contoh perdagangan retail ini adalah toko serba ada (*departement store*), toko swalayan (*supermarket*), *Direct selling* (penjualan *door to door*), *Direct marketing* (usaha yang memasarkan dan menjual produknya dengan memanfaatkan media televisi atau internet), dan lain-lain.

Adapun usaha distributor atau perdagangan besar adalah segala aktivitas pemasaran (*marketing*) yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang retail atau ke usaha *marketing-marketing* lainnya. Dalam kategori ini, pelaku usaha tidak banyak berhubungan langsung dengan konsumen. Selain itu, jumlah transaksi yang dibeli juga relatif besar serta harga dapat berubah menurut situasi (tidak mengikat) karena biasanya pihak produsen akan memberikan beberapa keringanan seperti *discount* atau *korting* (pemotongan harga), pembayaran kredit, cara pengiriman, dan lain sebagainya.

3. Usaha Jasa (*Service*)

Usaha jasa berkaitan dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai modal keunggulan dalam bersaing. Sesuai dengan namanya, selain mengandalkan faktor sumber daya teknologi, modal, dan *marketing*, bidang usaha jasa juga mengandalkan sumber daya manusia sebagai sumber dalam bersaing. SDM inilah

yang nantinya akan berhubungan langsung dalam aktivitas pemberian jasa kepada konsumen.

Beberapa jenis usaha yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a) Usaha jasa konstruksi; Menyelenggarakan jasa pada berbagai bidang seperti membangun gedung, rumah, instalasi air, instalasi listrik, instalasi AC, dan sebagainya.
- b) Usaha jasa perbankan dan lembaga keuangan; Menyelenggarakan jasa pada bidang keuangan seperti lembaga perbankan, koperasi simpan pinjam, pegadaian, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), leasing, dan lain-lain.
- c) Usaha jasa bidang asuransi; Menyelenggarakan jasa pada bidang asuransi seperti asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, asuransi sosial, dan lain-lain.
- d) Usaha jasa properti; Menyelenggarakan jasa pada bidang properti seperti pembangunan rumah atau gedung, jual/beli/sewa rumah, *homestay*, kost, dan lain-lain
- e) Usaha jasa transportasi; Menyelenggarakan jasa pada bidang transportasi baik jalur darat, laut maupun udara.

- f) Usaha jasa pengiriman; Menyelenggarakan jasa pada bidang ekspedisi seperti pengiriman surat, dokumen, dan barang baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- g) Usaha jasa kesehatan; Menyelenggarakan jasa pada bidang kesehatan seperti klinik kesehatan, pondok bersalin, rumah sakit, ritel farmasi, dan lain-lain.
- h) Usaha jasa pariwisata; Menyelenggarakan jasa pada bidang pariwisata seperti *tour and travel*, hotel, penginapan, dan lain-lain.
- i) Usaha jasa seni dan entertainment; Menyelenggarakan jasa pada bidang kesenian seperti pertunjukkan kesenian, desain grafis, visual, melukis, karaoke, organ tunggal dan lain-lain.
- j) Usaha jasa bidang organisasi; Menyelenggarakan jasa pada bidang organisasi seperti jasa event organizer (EO) untuk kegiatan seminar, eksibisi, perkawinan, pameran, pertunjukkan dan lain-lain.
- k) Usaha jasa profesi; Menyelenggarakan jasa pada bidang profesi lembaga pendidikan, kursus, pusat pelatihan, dan lain-lain.
- l) Usaha jasa pengetikan dan penerjemahan; Menyelenggarakan jasa pengetikan makalah, skripsi, tesis, dan disertasi atau jasa penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.

D. Kewirausahaan dan Watak Kemandirian

Salah satu karakter yang dibangun dan dikembangkan oleh pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang adalah karakter kemandirian. Selain bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang bertakwa dan beriman, berakhlak mulia, sehat, mempunyai kemampuan kognitif yang baik, cakap, kreatif, mempunyai jiwa demokratis dan bertanggung jawab, pendidikan nasional juga memiliki mandat untuk membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang mandiri.

Watak kemandirian inilah yang menjadi salah satu dari sekian banyak prinsip yang harus tertanam dalam diri seorang wirausahawan. Prinsip kemandirian harus menjadi panduan dalam berwirausaha karena kemandirian dalam banyak hal adalah kunci penting agar dapat menghindarkan diri dari ketergantungan kepada pihak-pihak lain berkaitan dengan usaha yang dijalani.

Kemandirian sendiri merupakan sebuah kondisi ketika seseorang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan melakukan sesuatu tanpa bantuan—namun bukan berarti tidak membutuhkan—orang lain di sekitarnya. Seseorang yang memiliki sikap mandiri hampir selalu bisa mengusahakan keperluan hidupnya dan menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapinya.

Watak kemandirian atau tidak tergantung pada orang lain akan menumbuhkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*). Melalui kemandirian dalam berpikir kreatif dan bertindak inovatif, seorang wirausahawan dapat menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh sebab itu, seorang wirausahawan harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya terutama dalam menciptakan peluang usaha bagi dirinya dan bagi orang lain.

F. J. Monks (2019) mengungkapkan bahwa pribadi yang mandiri akan menunjukkan perilaku eksploratif, mampu mengambil keputusan, percaya diri, dan kreatif. Selain itu juga mampu bertindak kritis, tidak takut berbuat sesuatu, memiliki kepuasan dalam melakukan aktivitasnya, mampu menerima realitas, dan dapat memanipulasi lingkungan, berinteraksi dengan teman sebaya, terarah pada tujuan, serta mampu mengendalikan diri. Dengan kata lain, pribadi dengan watak mandiri memiliki kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri dalam upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru tanpa harus bergantung pada orang lain dan mampu menghadapi persaingan yang ada.

Di antara beberapa ciri kemandirian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❖ Tindakan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri dan bukan karena orang lain dan tidak bergantung pada kehendak orang lain.
- ❖ Memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif.
- ❖ Memiliki usaha untuk mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapan-harapannya.
- ❖ Memiliki perasaan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- ❖ Mampu mengendalikan tindakan dan memengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri.
- ❖ Memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan sendiri, menerima diri sendiri dan memperoleh kepuasan dari usahanya sendiri.

Seorang wirausahawan yang mandiri akan senantiasa mengoptimalkan segala anugerah potensi, daya, dan upaya yang dimilikinya. Namun dalam berwirausaha, meskipun mengandung arti mandiri, namun yang ditonjolkan bukan hanya kemandirian semata, tetapi juga menggali hubungan ketergantungan satu sama lain yang saling menguntungkan. Karena dengan menjalin hubungan yang saling menguntungkan, kita akan mengetahui sejauh mana usaha atau bisnis kita sudah berjalan.

Dengan demikian, watak kemandirian dalam berwirausaha pada hakikatnya adalah penerapan dari konsep kerjasama, kerja keras, keuletan, inisiatif, kreativitas dan juga tanggungjawab yang besar. Dengan kata lain, untuk bisa menjadi seorang wirausahawan mandiri, hal-hal tersebut haruslah dipenuhi untuk memperkuat kemandirian itu sendiri.

E. Etika dan Norma Bisnis Kewirausahaan

Dalam proses menjalankan usaha atau bisnisnya, seorang wirausahawan tentu tidak bekerja seorang diri, melainkan memerlukan bantuan dari wirausahawan lain, bantuan pemerintah, ataupun badan-badan usaha terkait lainnya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus memperhatikan serangkaian etika atau norma dalam berwirausaha.

Etika atau norma-norma ini digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang telah dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pada akhirnya, etika tersebut akan turut membentuk pengusaha menjadi individu yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama.

Menurut Zimmerer (A. Rusdiana, 2018), etika bisnis adalah kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan

memecahkan persoalan yang dihadapi. Sementara menurut Ronald J. Ebert dan Ricky M. Griffin, etika bisnis sering digunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan. Dengan demikian, etika kewirausahaan dalam konteks bisnis adalah kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam berusaha dan memecahkan persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan.

Michael Josephson—sebagaimana dikutip Zimmerer—menyebutkan bahwa secara universal ada sepuluh prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu:

- 1) Kejujuran (*honesty*); yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur, baik, dalam berbicara maupun bertindak. Kejujuran ini diperlukan agar berbagai pihak memiliki kepercayaan terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa adanya etika kejujuran, usaha yang dijalankan tidak akan maju dan tidak akan dipercaya oleh konsumen atau mitra kerjanya.
- 2) Integritas (*integrity*), yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus, berani, dan penuh pendirian/keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya.

- 3) Memelihara janji (*promise keeping*), yaitu selalu menepati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, jangan menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalistik dengan alasan ketidakrelaan. Misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang atau penggantian. Sekali seorang pengusaha ingkar janji, maka hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya.
- 4) Kesetiaan (*fidelity*), yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman karyawan, dan negara; jangan menggunakan atau memperlihatkan informasi yang diperoleh dalam kerahasiaan. Begitu juga, dalam suatu konteks profesional, menjaga/ melindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti, menghindari hal-hal yang tidak pantas, dan konflik kepentingan.
- 5) Kewajaran/keadilan (*fairness*), yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan, dan perlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, jangan bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain. Seorang pengusaha yang menjunjung komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak.

- 6) Suka membantu orang lain (*caring for others*), yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain.
- 7) Hormat kepada orang lain (*respect for others*), yaitu menghormati martabat manusia, menghormati kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua orang, sopan santun, jangan mempermalukan seseorang, dan merendahkan martabat orang lain.
- 8) Kewarganegaraan yang bertanggung jawab (*responsibility citizenship*), yaitu selalu menaati hukum/ aturan, penuh kesadaran sosial, menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan. Seorang pengusaha harus selalu patuh dan menaati peraturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Sebab pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuat dapat berakibat fatal dikemudian hari. Bahkan, bukan tidak mungkin pelanggaran itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha yang bersangkutan.
- 9) Mengejar keunggulan (*pursuit of excellence*), yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, seperti dalam pertemuan personal, pertanggungjawaban profesional, tekun, dapat dipercaya/diandalkan, rajin, dan penuh komitmen, melakukan semua tugas dengan yang terbaik berdasarkan kemampuan, serta mengembangkan dan mempertahankan

tingkat kompetensi yang tinggi. Seorang pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu.

- 10) Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*), yaitu memiliki tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya, serta selalu memberi contoh yang terbaik. Segala bentuk kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan.

Menurut Jared D. Harris, Harry J. Sapienza, dan Norman Bowie (2009)—sebagaimana dikutip Sudarmiatin (2018), hubungan antara etika dan *entrepreneurship* dapat dikelompokkan ke dalam 3 tema besar, yaitu; (1) *Entrepreneurial ethics*; (2) *Social Entrepreneurship*; dan (3) *Entrepreneurship and Society*, yang masing-masing tema dapat dirinci lagi menjadi beberapa sub tema. Etika berwirausaha (*Entrepreneurial ethics*) ini berhubungan dengan bagaimana seorang wirausahawan berperilaku etis dalam menjalankan bisnisnya. Tema ini lebih fokus pada urusan internal perusahaan seperti bagaimana seorang wirausahawan mengambil keputusan bisnisnya.

Tema *Social entrepreneurship* berhubungan dengan bagaimana seorang wirausahawan mengembangkan bisnisnya melalui aktivitas sosial berbasis non-profit, yang sebenarnya me-

upakan upaya untuk meningkatkan profit usahanya. Contoh nyata tema ini adalah pemberdayaan wirausaha melalui waralaba (*franchise*) yang seringkali tidak sesuai peraturan yang berlaku (*disenfranchised entrepreneurs*). Seorang franchisor yang telah menerima sejumlah uang berupaya *royalty fee* dari *franchisee* memiliki kewajiban untuk memberikan konsultasi dan pendampingan hingga *franchisee* mandiri. Namun dalam kenyataannya, kewajiban *franchisor* tersebut tidak dilakukan sehingga berdampak terhadap banyaknya *franchisee* yang bangkrut dan kehilangan investasinya dengan sia-sia.

Tema ketiga yaitu *Entrepreneurship and Society* berhubungan dengan pandangan makro terhadap entrepreneurship, seperti perlunya disusun peraturan tentang bisnis waralaba. Selama ini bisnis waralaba diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Untuk dapat diaplikasikan di dalam masyarakat, maka peraturan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah yang penyusunannya mengacu pada peraturan di atasnya. Orientasi tema ketiga ini adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ketiga tema yang mencerminkan keterkaitan antara etika dan kewirausahaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

ENTREPRENEURIAL ETHICS	SOCIAL ENTREPRENEURSHIP	ENTREPRENEURSHIP AND SOCIETY
✦ Entrepreneurs versus non-entrepreneurs ✦ Ethical decision making of entrepreneurs ✦ Ethical dilemmas in entrepreneurship ✦ Technological change and ethics ✦ Formation of ethical infrastructure in new ventures ✦ Stakeholder theory of entrepreneurship	✦ Defining social entrepreneurship ✦ Ethical concerns in social ventures ✦ Measurement of social venture 'performance' ✦ Empowerment of disenfranchised entrepreneurs ✦ Social ventures versus traditional ventures ✦ Role of 'purpose' in new ventures	✦ Entrepreneurship and economic theory ✦ Entrepreneurship and macroeconomic development ✦ Other societal roles of entrepreneurship ✦ Entrepreneurs as social change agents ✦ Detrimental impact of 'creative destruction' ✦ Ethics of opportunity exploitation

Gambar tiga tema entrepreneurship dan etika

Selain etika dan perilaku, yang penting dalam bisnis adalah norma etika. Menurut Zimmerer, ada tiga tingkatan norma etika, yaitu sebagai berikut:

- Hukum; berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum hanya mengatur perilaku minimum.
- Kebijakan dan prosedur organisasi; memberi arah khusus bagi setiap orang atau organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Para karyawan akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan/ organisasi.

- c. Moral sikap mental individual; sangat penting untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal.

Sementara itu Bertens (2000) menyatakan bahwa etika dalam menjalankan bisnis dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu (1) ekonomi; (2) moral; (3) hukum; dan (4) kombinasi dari ketiganya. Dari perspektif ekonomi, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar—dan memang perlu dilakukan—dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, keuntungan yang dikejar tersebut tidak sampai merugikan orang lain. Dengan kata lain, ada batasan etis yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis yaitu moral. Ada hal-hal tertentu yang “bisa” dilakukan dalam bisnis tetapi “tidak boleh” dilakukan oleh norma, moral, dan etika. Kepentingan dan hak orang lain harus menjadi perhatian penting dalam menjalankan bisnis.

Adapun dari perspektif hukum, tentu kita sudah sama-sama memahami bahwa kegiatan bisnis tidak bisa dipisahkan dengan hukum, norma, aturan. Baik dalam konteks bisnis nasional maupun internasional, kehadiran hukum dagang maupun hukum perdata mutlak diperlukan. Jika dibandingkan dengan etika dan norma, hukum pada hakikatnya memiliki nilai yang lebih tegas karena ada dokumen hitam di atas putih yang mengatur kehidupan bisnis di suatu daerah, wilayah, maupun negara yang akan membantu wirausaha dalam mencapai tujuannya.

Urgensi Etika Bisnis

Pesat dan ketatnya persaingan dalam dunia usaha/bisnis akan berdampak kepada tingginya peluang untuk melanggar etika kewirausahaan. Serangkaian pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan hak para karyawan yang membantu proses produksi seringkali dilupakan demi mengejar target penjualan. Dalam kondisi demikian, peran dan fungsi dari etika bisnis menjadi sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan perusahaan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan karena semua keputusan perusahaan sangat memengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan (A. Rusdiana, 2018). Dalam sebuah perusahaan, stakeholder terdiri atas:

- 1) Para pengusaha dan mitra usaha. Selain berfungsi sebagai pesaing, para pengusaha juga berperan sebagai mitra. Dalam hal ini, para pengusaha merupakan relasi usaha yang dapat bekerja sama dalam menyediakan informasi atau sumber peluang. Loyalitas mitra usaha akan sangat bergantung pada kepuasan yang diterima dari perusahaan.
- 2) Para pemasok bahan baku. Pasokan bahan baku yang kurang bermutu dan pasokan yang lambat dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, keputusan untuk menentukan kualitas barang dan jasa sangat

bergantung pada pemasok bahan baku. Loyalitas petani penghasil bahan baku sangat bergantung pada tingkat kepuasan yang diterima dari perusahaan dalam menentukan keputusan harga jual bahan baku ataupun dalam bentuk insentif.

- 3) Organisasi/ serikat pekerja. Organisasi pekerja dapat memengaruhi keputusan melalui proses tawar-menawar secara kolektif. Perusahaan yang tidak melibatkan karyawan/ organisasi pekerja dalam mengambil keputusan sering menimbulkan protes yang mengganggu jalannya perusahaan.
- 4) Pemerintah selaku pengatur kelancaran aktivitas usaha. Pemerintah dapat mengatur kelancaran aktivitas usaha melalui serangkaian kebijakan yang dibuatnya karena kebijakan yang dibuat pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha.
- 5) Bank selaku penyandang dana. Selain sebagai jantungnya perekonomian dalam skala makro, bank juga sebagai lembaga yang dapat menyediakan dana perusahaan.
- 6) Investor selaku penanam modal. Investor penyandang dana dapat memengaruhi perusahaan melalui serangkaian persyaratan yang diajukannya. Persyaratan tersebut akan mengikat dan sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Loyalitas investor sangat bergantung pada tingkat kepuasan investor atas hasil penanaman modalnya.

- 7) Masyarakat umum yang dilayani. Masyarakat akan selalu menanggapi dan memberikan informasi tentang bisnis yang dijalankan. Dalam hal ini, masyarakat juga merupakan konsumen yang akan memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan produk barang dan jasa yang dihasilkan serta teknik yang digunakan.
- 8) Pelanggan yang membeli produk. Barang dan jasa yang akan dihasilkan serta teknologi yang digunakan akan sangat dipengaruhi oleh pelanggan sehingga dapat menentukan keputusan-keputusan bisnis. Dengan demikian, etika bisnis merupakan landasan penting dan harus diperhatikan, terutama dalam menciptakan dan melindungi reputasi perusahaan. Oleh sebab itu, etika bisnis merupakan masalah yang sangat sensitif dan kompleks karena membangun etika untuk mempertahankan reputasi lebih sukar daripada menghancurkannya.



Pendidikan Kewirausahaan Di Indonesia

A. Dasar Hukum Kewirausahaan

Pemerataan ekonomi merupakan salah satu isu penting di setiap negara berkembang termasuk Indonesia. Kesenjangan ekonomi dengan adanya penguasaan aset kekayaan nasional oleh segelintir individu/ kelompok tertentu yang menyebabkan lahirnya oligarki dan monopoli dalam perekonomian dapat menjadi masalah sosial yang serius bagi bangsa kita jika tidak segera diatasi.

Jika melihat potensi dan kekuatan stabilitas yang ada ditambah dengan tren perekonomian nasional yang terus mengalami pertumbuhan positif, upaya percepatan dan pemerataan ekonomi demi mewujudkan keseimbangan baru dalam perekonomian nasional sebenarnya bukan menjadi soal yang sulit untuk dilakukan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan memperbanyak lahirnya wira-

usahawan nasional, khususnya para wirausahawan muda. Selain dapat menaikkan kelas (*up grade*) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelahiran para wirausahawan muda—sebagai salah satu agen penggerak ekonomi kerakyatan—juga dapat menjadi sarana bagi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung penciptaan para wirausahawan muda tersebut, maka dibutuhkan serangkaian instrumen aturan hukum dan regulasi yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi para wirausahawan perintis dan UMKM agar bisa berdaya serta berkembang. Instrumen ini menjadi penting mengingat saat ini masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara dalam mengembangkan aspek kewirausahaan—baik itu dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun bantuan modal—sehingga program-program yang dijalankan oleh pemerintah nampak menjadi kurang efektif.

Dalam uraian sebelumnya sudah disampaikan bahwa menurut Bertens (2000), paling tidak ada empat perspektif terkait etika dalam menjalankan bisnis, salah satunya yaitu perspektif hukum. Dalam perspektif hukum, sebuah kegiatan usaha/bisnis tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum, norma, aturan. Karenanya kehadiran hukum dagang maupun hukum perdata—dalam konteks bisnis nasional maupun internasional—mutlak diperlukan. Selain berguna dalam mengatur kehidupan bisnis

dalam lokus tempat, aspek hukum dalam sebuah usaha/ bisnis juga diperlukan demi menjaga stabilitas perekonomian dalam dunia usaha agar terjadi pemerataan dan sekaligus membantu wirausahawan/ pelaku bisnis dalam menjalankan dan mencapai tujuannya.

Berangkat dari hal tersebut, maka seorang wirausahawan tidak boleh acuh dan harus memahami berbagai aturan hukum (melek hukum) yang berkaitan dengan dunia kewirausahaan. Apalagi saat ini Indonesia juga sudah masuk dalam pasar bebas ASEAN yang menuntut para pelaku usaha lebih memperhatikan setiap detail hukum terkait kewirausahaan dalam menjalankan usahanya. Pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai aturan hukum tersebut antara lain dimaksudkan agar dapat tercipta iklim kondusif bagi perkembangan kewirausahaan dan sekaligus bisa berfungsi sebagai kontrol atau pengaturan agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan aman dan tidak mengalami kasus-kasus yang tidak diharapkan.

Berkaitan dengan instrumen hukum ini, pemerintah selaku pembuat kebijakan sebenarnya telah mengeluarkan serangkaian aturan yang berkaitan dengan dunia kewirausahaan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, permen, keppres, dan inpres. Beberapa aturan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
3. Pengaturan usaha berskala mikro dan kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
6. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
7. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
8. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.
9. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
10. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.

11. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
12. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Undang Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

Merujuk kepada beberapa payung hukum dan regulasi terkait dengan kewirausahaan di atas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan agar aturan hukum dan regulasi yang telah ada tidak saling tumpang tindih dan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha kecil dan UMKM untuk berdaya dan berkembang adalah sebagai berikut (Suadi Sapta Putra & Wahyu Triono KS, 2018):

1. Adanya jaminan hukum terhadap sektor usaha kecil dan UMKM telah ada agar sektor usaha kecil dan UMKM tidak dirugikan oleh kebijakan industrial yang hanya menguntungkan industri skala besar, misalnya dalam hal proteksi investasi, perkreditan, perpajakan, dan masuknya arus modal asing.
2. Perbaikan akses terhadap usaha kecil dan UMKM harus menyentuh reformasi di bidang hukum yang mengatur kelembagaan yang menunjang iklim usaha yang kondusif dan pro masyarakat miskin.

3. Usaha kecil dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat harus diakui, mendapat proteksi pemerintah, dan mendapat perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya oleh negara agar dapat berkembang sesuai karakteristiknya yang khas.
4. Pemerintah perlu membuat berbagai regulasi guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak usaha kecil dan UMKM, seperti menyangkut akses kredit, tempat usaha, jaminan keamanan dan hukum, serta pengakuan terhadap perempuan sebagai pelaku usaha yang mandiri. Pemerintah juga perlu meninjau ulang berbagai kebijakan yang tidak mendukung usaha dan peraturan-peraturan daerah yang bersifat eksploitatif terhadap UMKM.
5. Dibutuhkan kebijakan distribusi yang dapat memberantas mafia, rentenir, dan berbagai pungutan liar dalam rantai perdagangan yang menyebabkan terjadinya relasi-relasi yang eksploitatif dalam rantai hulu-hilir usaha kecil.

Beberapa hal di atas cukup relevan jika dibandingkan dengan teori Hernando de Soto—sebagaimana yang dituangkan dalam buku *The Mystery of Capital*—bahwa sebenarnya kekayaan yang dimiliki negara-negara berkembang sangat banyak. Absennya sistem hukum dan pemerintahan yang bersih membuat kekayaan itu tidak terlacak dan tercatat ke dalam penerimaan negara. Korupsi dan kolusi serta berbagai praktik penyelewengan penyelenggaraan hukum membuat banyaknya

kekayaan yang dimiliki negara-negara berkembang tidak ada artinya. Tanpa sistem hukum yang jelas negara-negara berkembang akan tetap tertinggal dari negara-negara maju yang kelebihanannya justru terletak pada sistem hukum yang sudah mapan.

Sebaliknya, sistem hukum yang jelas akan membuat segala macam harta negara baik itu dimiliki pemerintah atau swasta akan tercatat oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian pengelolaannya dapat dipantau dan didorong untuk terus tumbuh dengan baik.

Arah Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dan tuntutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka peningkatan daya saing kewirausahaan perlu terus dikembangkan. Masalah krusial yang banyak dikeluhkan pelaku usaha/bisnis termasuk UKM adalah munculnya berbagai peraturan baru yang dianggap kurang memberikan ruang bagi UKM untuk berkembang. Birokrasi administrasi yang berbelit dan peraturan yang tumpang tindih menjadi tantangan yang harus diatasi. Pemerintah perlu melakukan revitalisasi arah kebijakan, strategi, dan program-program pemberdayaan kewirausahaan. Beberapa arah kebijakan yang dapat ditempuh tersebut antara lain meliputi (Dedy Suryadi, 2018):

- 1) Mengembangkan kewirausahaan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- 2) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama untuk:
 - a. Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;
 - b. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan;
 - c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
- 3) Memperluas basis dan kesempatan usaha serta menumbuhkan wirausahawan baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan pekerjaan terutama dengan:
 - a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan mengadopsi penerapan teknologi;
 - b. Mengembangkan kewirausahaan melalui pendekatan klaster dan pengembangan produk unggulan dengan

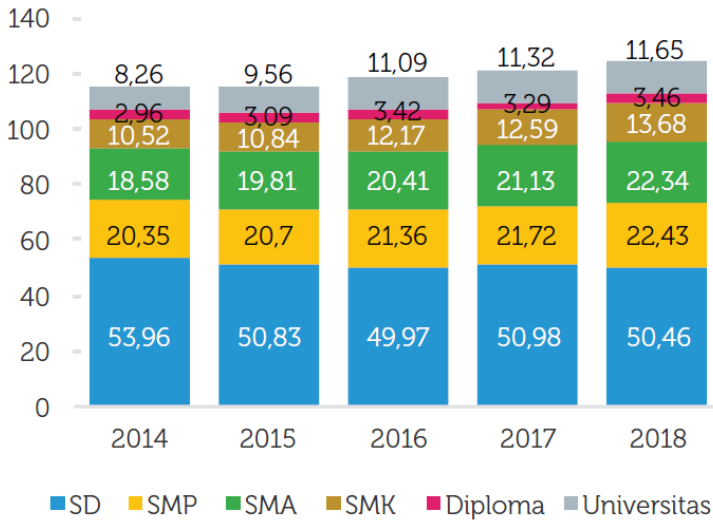
pendekatan *One Village One Product* (OVOP) di sektor agribisnis, agroindustri, dan potensi lokal lainnya;

- c. Mengembangkan kewirausahaan agar semakin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
 - d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
- 4) Mengembangkan kewirausahaan agar semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

B. Tantangan Pendidikan Kewirausahaan

Data yang dirilis Global Entrepreneurship Monitor (2017) menunjukkan bahwa minat dan motivasi masyarakat untuk berwirausaha berada di angka cukup tinggi yaitu 47,74 persen atau lebih besar dari rata-rata global sebesar 43,43 persen. Tren ini sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang membuka banyak kesempatan berusaha. Sayangnya minat berwirausaha tersebut belum diikuti dengan kapasitas yang memadai untuk menjalankan usaha. Sebagian besar wirausaha merupakan

usaha mencontoh dan tidak didasarkan pada pemahaman tentang model bisnis, pasar, dan inovasi.



Gambar Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas yang berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Dalam gambar nampak bahwa tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Mismatch keterampilan,

kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan produktivitas. Karenanya berbagai indikator berkaitan dengan dunia kewirausahaan yang menjadi target pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2014 seperti Rasio kewirausahaan nasional dari 3,55-3,80% (2020) menjadi 3,75-4,15% (2024), Indeks motivasi berusaha dari 11,48 (2020) menjadi 12,55 (2024), Pertumbuhan wirausaha baru dari 3% (2020) menjadi 5% (2024), Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi dari 43% (2020) menjadi 50% (2024), Proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 45% (2020) menjadi 52,1% (2024), dan lain-lain perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dunia pendidikan.

Dalam konteks inilah pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya cipta yang dapat mendukung program pembangunan. Seperti kita ketahui bersama, pendidikan merupakan hal penting bagi agenda pembangunan Pemerintah Indonesia. Membangun ketuhanan bangsa melalui pendidikan dilakukan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara esensi dari mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi domain utama pendidikan adalah membangun bangsa Indonesia yang berakar pada budaya dengan segala keragamannya untuk menjadi manusia

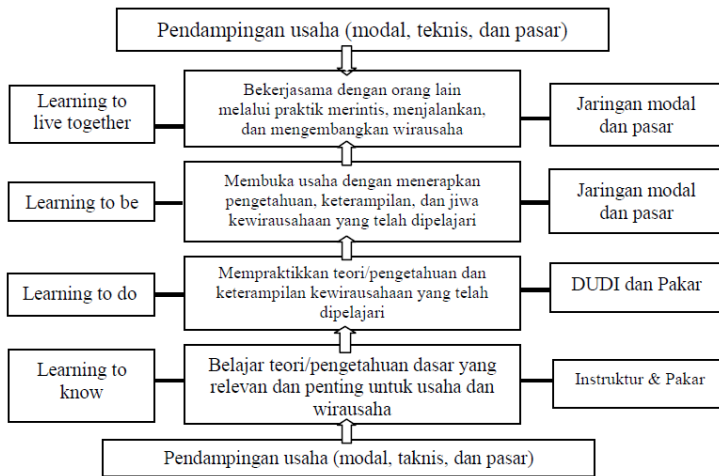
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan kuat di dalam percaturan hidup antar bangsa yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam buku *Learning: The Treasure Within*, Jacques Delors (1998) melihat proses belajar (pendidikan) sebagai sebuah kekuatan atau sumber daya dari dalam. Delors merekomendasikan empat pilar proses pendidikan dan belajar, yaitu: *Learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Pilar pertama *learning to know* pada hakekatnya sejalan dengan penerapan paradigma ilmu pengetahuan pada proses (belajar) dan pembelajaran sejak di tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. *Learning to know* memungkinkan warga belajar (peserta didik) untuk mengetahui, memahami, dan menghayati berbagai cara untuk memperoleh pengetahuan melalui fenomena yang berada di lingkungannya, belajar mempercayai bahwa manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, memungkinkan terciptanya *transfer of training*.

Pilar kedua, *learning to do* merujuk kepada upaya warga belajar menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna, belajar berbuat, dan melakukan (*learning by*

doing) sesuatu secara aktif, belajar mencatat, membaca, menulis, membuat ringkasan, dan dapat mendayagunakan kemampuan intelektual, psikomotorik, dan emosionalnya. Pilar ketiga, *learning to be* memungkinkan tercipta atau lahirnya manusia terdidik dan mandiri, memiliki rasa kemandirian, tanggungjawab, dan kepercayaan kepada diri sendiri dan orang lain. Sikap percaya diri lahir dari pemahaman dan pengenalan diri dengan tepat dan penuh kebahagiaan. Sementara pilar keempat, *learning to live together* lebih merujuk kepada kerukunan dan kedamaian hidup. Di era globlisasi dan pasar bebas seperti saat ini, dimensi-dimensi kemanusiaan sering terabaikan karena pengaruh kehidupan kebendaan. Dalam proses belajar ini, jaringan kerja sama regional, multikultural, lintas kultural, serta internasional perlu terus dibangun dan berbagai bentuk perbedaan serta konflik suku, agama, ras, dan golongan perlu diperkecil.

Keempat pilar tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Bagan Program Pembelajaran
(DUDI = Dunia Usaha dan Industri)

Dengan kata lain, pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pengembangan manusia harus dilakukan secara utuh mencakup pengembangan daya pikir, daya kalbu, daya fisik, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olahraga. Selain itu, pengembangan manusia juga diharapkan menghasilkan manusia yang mampu dan sanggup berperan aktif dalam membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Tugas sektor pendidikan baik formal maupun informal bukan hanya mencetak manusia-manusia yang berpendidikan, tetapi lebih luas lagi harus mampu menciptakan manusia-manusia yang mandiri. Dengan kenyataan bahwa tidak

semua penduduk Indonesia usia produktif dan tergolong sebagai angkatan kerja dapat terserap di dunia kerja, maka sektor pendidikan bertanggungjawab untuk mencari solusi bagaimana agar output yang dihasilkan tidak hanya berorientasi untuk menjadi pekerja.

Di sini, pendidikan kewirausahaan menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kembangkan suasana akademik yang berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Pembentukan karakter ini antara lain dapat dilakukan melalui usaha penanaman nilai-nilai kejujuran, kepemimpinan, tanggungjawab, dan semangat kerja. Jangka panjangnya, pendidikan ini ditargetkan untuk menghasilkan wirausahawan baru yang mampu menjadi jawaban sekaligus solusi terhadap permasalahan pengangguran. Dalam pendidikan kewirausahaan ini para peserta didik akan mempelajari banyak hal mulai dari pembentukan mindset untuk berkarya tanpa harus mengandalkan orang lain, bidang usaha apa yang akan dijalani, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan sebagai aktivitas awal dalam berusaha, cara memperoleh modal, bagaimana proses pemasarannya, dan lain sebagainya.

Untuk membentuk karakter-karakter itu, para pengajar dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengajar kewirausahaan. Dalam penelitiannya, Daniel Yar Hamidi, dkk (2008) menyatakan bahwa kreativitas dan pe-

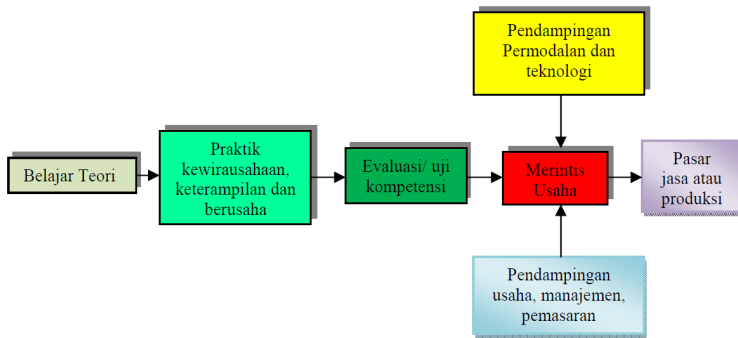
ngalaman berpengaruh positif signifikan terhadap intensitas berwirausaha. Dari pernyataan ini dapat kita garisbawahi bahwa dibutuhkan kreativitas dalam mengajar kewirausahaan. Kreativitas untuk mengubah sikap konsumtif menjadi produktif, pasrah menerima nasib menjadi ulet dalam berusaha, mau belajar dari pengalaman masa lampau, dan mau berubah mengikuti perkembangan masa kini adalah sedikit tugas utama dari seorang pengajar kewirausahaan. Dan proses untuk mengubah sikap dan mindset tersebut sudah barang tentu bukan pekerjaan mudah. Saat ini, pola pengajaran kewirausahaan dengan meminta siswa menghafal *text book* sudah bukan merupakan solusi. Menghadapkan mereka dengan fakta dan pengalaman nyata di lapangan justru lebih direkomendasikan oleh para peneliti.

Dalam konteks model pembelajaran, merujuk pada *Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat Melalui Kursus dan Pelatihan* yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (2010), maka model pembelajaran dapat dilakukan dengan tiga pola yang disesuaikan dengan jenis, bentuk, dan tingkat kesulitan serta keluasan bidang keterampilan. Ketiga model pembelajaran tersebut adalah:

1. Pola 1

Pada pola pertama, peserta didik mengikuti pembelajaran teori-teori (pengetahuan) yang relevan dan penting untuk usaha dan wirausaha. Selanjutnya, peserta didik diajak

untuk melaksanakan praktek keterampilan dan kewirausahaan. Setelah proses pembelajaran teori dan praktek selesai diikuti, selanjutnya dilakukan evaluasi baik teori maupun praktek. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kemampuan peserta didik sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, maka peserta didik diarahkan untuk merintis dan mengembangkan usaha mandiri. Selama dalam merintis usaha tersebut, dilakukan pendampingan baik dari segi modal, teknologi maupun manajemen. Pola pembelajaran yang pertama ini dapat digambarkan sebagai berikut:

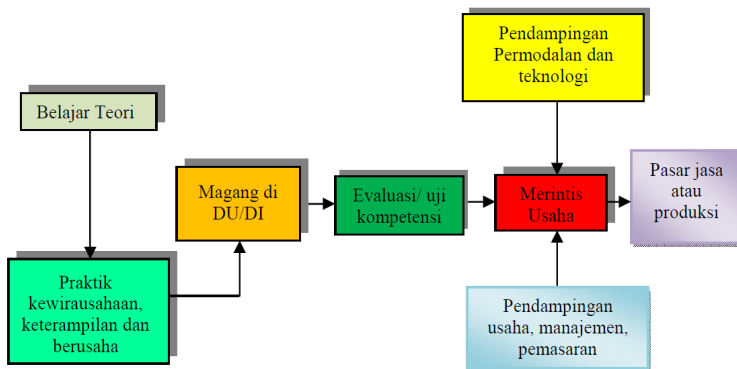


Gambar Model Pembelajaran Pola 1

2. Pola 2

Pada pola kedua, peserta didik mengikuti pembelajaran teori-teori (pengetahuan) yang relevan dan penting untuk pembekalan kewirausahaan dan keterampilan. Kemudian,

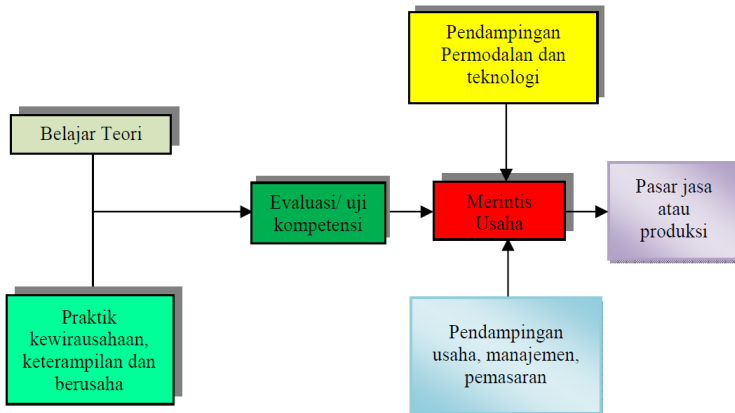
peserta didik diajak untuk melaksanakan praktek sesuai dengan teori yang telah dipelajari. Selanjutnya, setelah pembelajaran teori dan praktek selesai, peserta didik dimagangkan di Dunia Usaha dan Dunia Industri. Setelah proses pembelajaran teori, praktek, dan magang selesai dilakukan evaluasi baik teori maupun praktek. Apabila hasil evaluasi peserta didik menunjukkan kemampuannya sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, maka peserta didik diarahkan untuk merintis dan mengembangkan usaha mandiri. Selama dalam merintis usaha tersebut, dilakukan pendampingan baik dari segi modal, teknologi maupun manajemen. Pola pembelajaran yang kedua ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Model Pembelajaran Pola 2

3. Pola 3

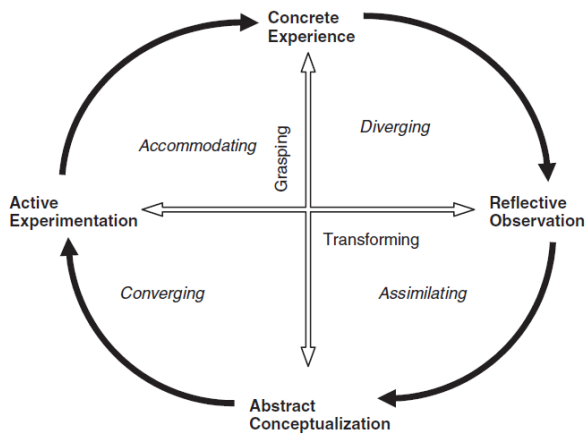
Pada pola ketiga, pembelajaran dilakukan dengan pendekatan *learning by doing* artinya proses pembelajarannya tidak memisahkan teori dan praktek, tetapi dilakukan langsung ditempat kerja dimana antara teori dan praktek lulu di dalamnya. Setelah proses belajar sambil bekerja dianggap selesai, maka peserta didik dilakukan evaluasi. Apabila hasil evaluasi peserta didik menunjukkan kemampuannya sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, maka peserta didik diarahkan untuk merintis dan mengembangkan usaha mandiri. Selama dalam merintis usaha tersebut, dilakukan pendampingan baik dari segi modal, teknologi maupun manajemen. Pola pembelajaran yang ketiga ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Model Pembelajaran Pola 3

Model pembelajaran lain yang disarankan dalam rangka untuk menciptakan wirausaha beretika adalah pembelajaran berbasis pengalaman atau *Experiential Learning*, yaitu pembelajaran yang membutuhkan dukungan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam permasalahan dunia nyata dengan bimbingan pengajar. Dalam model pembelajaran ini, ruang kelas atau laboratorium bisa di-setting untuk *experiential learning* melalui pembelajaran berbasis kasus, penemuan masalah, simulasi, eksperimen, atau pembelajaran proyek.

Menurut Alice Y. Kolb dan David A. Kolb (2009), *Experiential Learning* adalah proses mengonstruksi pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Jika digambarkan, siklus dari experiential learning adalah sebagai berikut:



Gambar siklus experiential learning

Adapun contoh implementasi dari *experiential learning* ke dalam pendidikan Kewirausahaan dicerminkan dalam langkah-langkah pembelajaran berikut (Sudarmiatin, 2015):

No.	Tahapan <i>Experiential Learning</i>	Implementasi pada Pendidikan Kewirausahaan	Catatan
1.	<i>Abstract Conceptualization</i>	Pemahaman konsep kewirausahaan	- Sebelum melakukan eksperimen lebih baik didahului menyusun <i>Business Plan</i> untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan. - Selama proses pembelajaran, pengajar berperan sebagai fasilitator.
2.	<i>Active Experiment</i>	Praktikum membuat produk, kemasan, merek, mendesain promosi dan mencoba memasarkannya	
3.	<i>Concrete Experience</i>	Siswa memperoleh pengalaman nyata termasuk pengalaman menjadi wirausaha beretika dengan segala konsekuensinya	
4.	<i>Reflective Observation</i>	Siswa bersama guru melakukan refleksi dan melakukan analisis berkaitan dengan: - Apa yang bisa dan boleh dilakukan, - Apa yang boleh tetapi tidak bisa dilakukan, - Apa yang bisa tetapi tidak boleh dilakukan, - Apa yang tidak bisa dan tidak boleh dilakukan.	
5.	Menemukan strategi Pengetahuan baru hasil konstruksi <i>Experiential Learning</i>	Menemukan cara membuat produk yang efektif dan efisien serta mengetahui strategi pemasarannya	

Tabel Implementasi experiential learning pada Pembelajaran Kewirausahaan

Claus Rerup dalam artikel berjudul *Learning from Past Experience: Footnotes on Mindfulness and Habitual Entrepreneurship* (2005) mengemukakan bahwa pengalaman masa lalu dapat membantu wirausaha dalam menemukan peluang bisnis dan mengeksplorasi peluang tersebut dalam bentuk bisnis—meskipun pengalaman kesuksesan kewirausahaan di masa lalu tidak serta merta akan selalu mengarah pada kesuksesan kewirausahaan di masa depan. Gambaran terkait hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut:

Type of experience	Opportunity discovery	Opportunity exploitation
Industry	<i>Help:</i> Build relationships, identify new products, markets, funding <i>Harm:</i> Undermine critical thinking, stimulate non-adaptive extensions into new context	<i>Help:</i> Operate new business—get it operationally off the ground <i>Harm:</i> Prior routines, templates and business models may not ‘work’ in new context unless they are seriously adapted to new contingencies
Technology/task	<i>Help:</i> Extend use of technology or ‘concept’ into new contexts—first mover advantage <i>Harm:</i> Underestimate entry barriers and overestimate strengths of technology	<i>Help:</i> Knowledge of tactics, distribution etc. Don’t need to make ‘common’ mistakes to operate the technology proficiently <i>Harm:</i> ‘Automatic,’ non-adaptive extension of one technology can be the perfect set-up for failure
Similar venture	<i>Help:</i> Offer variations on similar, well-tested product/idea <i>Harm:</i> Past experience might be irrelevant and thus should be disregarded	<i>Help:</i> Provide ‘something’ to start on <i>Harm:</i> Overlook the need for disregarding what worked in the past.
Dissimilar venture	<i>Help:</i> Install thoughtfulness and reflection rather than blind replication—potential for innovation <i>Harm:</i> Overextend usefulness of prior experience and charge into unrelated, dissimilar territory	<i>Help:</i> Innovative use of dissimilar business model establish competitive advantage (e.g., lower cost) <i>Harm:</i> Prior experience (e.g., capabilities) are irrelevant in new context unless they are re-combined
Prior success	<i>Help:</i> Behavioral persistence, focus, continuity, building competence, specialization <i>Harm:</i> Simplification, develop cognitive and behavioral ruts, overconfidence, generalize from small sample, not inclined to disregard	<i>Help:</i> Fast, reliable, professional execution of idea by using routines and templates that worked in the past <i>Harm:</i> Execution is too fast, thoughtless and focused on success. No sensitivity to operations and new context
Prior failure	<i>Help:</i> Behavioral abandonment and search, more open to new ideas <i>Harm:</i> Experimentation is risky, overconfidence in ability to beat the odds	<i>Help:</i> Disregard old patterns—open to exploration <i>Harm:</i> Most new ideas turn out to be useless

*Tabel Hubungan antara pengalaman masa lalu, peluang, dan
pendayagunaan peluang*

Senada dengan pandangan Claus Rerup, penelitian Einar A. Rasmussen dan Roger Sorheim (2006) mengungkapkan bahwa mengurangi pembelajaran individual di kelas dan menambah aktivitas pembelajaran kelompok berbasis kinerja (kontekstual) terbukti lebih efektif meningkatkan intensitas berwirausaha. Lebih lanjut, Rasmussen dan Sorheim—mengutip Mauri Laukkanen—juga menyatakan bahwa di lingkungan pen-

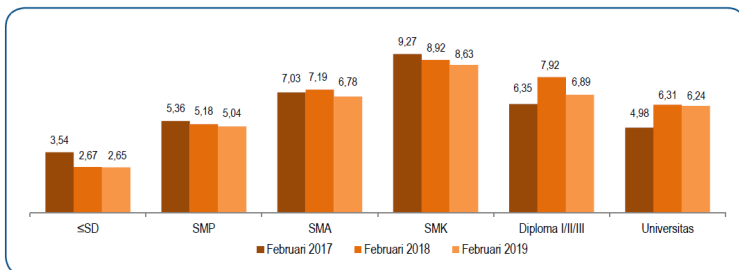
didikan, peserta didik selaku 'bibit' wirausahawan harus diberi kesempatan untuk bertemu dan menginternalisasikan konsep bisnis yang realistis sejak awal dan terlibat secara operasional dalam konteks bisnis nyata.

Dalam mensukseskan agenda lembaga pendidikan dalam upaya mencetak insan-insan mandiri yang berkualitas ini, maka dukungan dari dunia industri (sektor swasta) mutlak diperlukan. Walaupun sistem pendidikan nasional tetap tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah, tidak ada salahnya bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam usaha pengembangan pendidikan daripada sekedar mencari kelemahan dalam sistem pendidikan. Konsensus nasional bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat menunjukkan relevansinya partisipasi swasta di bidang pendidikan.

Perusahaan-perusahaan yang maju kiranya bisa menyumbangkan diri dalam bidang pendidikan ketrampilan atau kejuruan tertentu yang belum terjangkau atau penyelenggaraannya terbatas oleh pendidikan formal. Selain mungkin bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal, perusahaan-perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan latihan sendiri dan terbuka untuk umum. Misalnya, perusahaan-perusahaan otomotif dapat menyelenggarakan pusat-pusat latihan ketrampilan di bidang perbengkelan dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi menyelenggarakan pendidikan ketrampilan pengecoran beton, dan lain sebagainya. Partisipasi di bidang

pendidikan teknik dan kejuruan seperti ini antara lain telah ditunjukkan oleh banyak perusahaan komputer dan organisasi perhotelan, meskipun dalam skala terbatas (Ronald Nangoi, 1986).

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan.

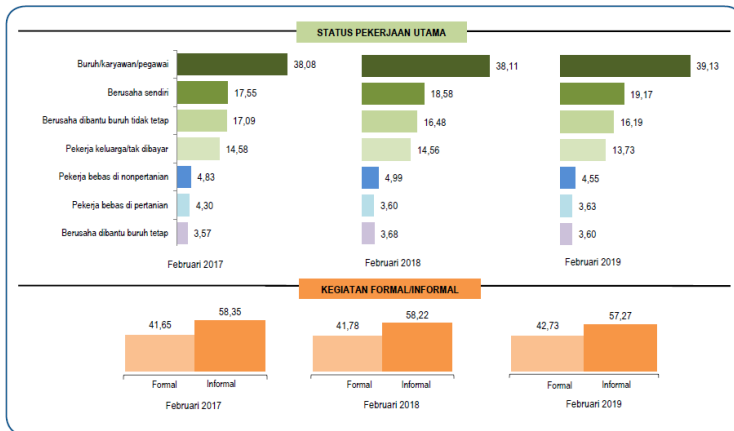


Gambar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa dari tingkat pendidikan pada Februari 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,63 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat Diploma I/II/III (6,89 persen). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,65 persen. Jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu, penurunan TPT terjadi pada semua tingkat pendidikan

Sementara dilihat dari status pekerjaan utamanya, Data BPS dari seluruh penduduk yang bekerja pada Februari 2019, status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai (39,13 persen). Diikuti status berusaha sendiri (19,17 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (16,19 persen), dan pekerja keluarga (13,73 persen). Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap memiliki persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 3,60 persen. Dalam satu tahun terakhir, peningkatan persentase penduduk bekerja tertinggi pada status buruh/karyawan/pegawai (1,02 persen poin). Penurunan terjadi pada status pekerja keluarga sebesar 0,83 persen poin,

pekerja bebas di nonpertanian sebesar 0,44 persen poin, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 0,29 persen poin.



Gambar Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/ Informal

Mengacu kepada data di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu pekerjaan yang masih harus terus dilakukan dan ditingkatkan dalam kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini agar bangsa kita tetap memiliki daya saing.

Salah satu upaya peningkatan daya saing bangsa tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM berdaya saing mampu mengubah setiap

tantangan menjadi peluang. Inilah salah satu *soft skill* yang juga harus dibangun bagi lulusan perguruan tinggi di Indonesia selain kemampuan penalaran dan kreativitas. Kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang bernilai ekonomis ini dapat dilakukan melalui pembangunan karakter kewirausahaan. Pembangunan karakter ini tidak hanya membangun pola pikir dan motivasi berwirausaha namun juga membekali mahasiswa dengan ketrampilan dasar berwirausaha. Sehingga setiap lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat menentukan pilihan menjadi tenaga profesional sesuai kompetensinya atau berwirausaha sesuai dengan kejiannya membaca peluang sehingga memiliki kekuatan dalam persaingan perdagangan.

Dalam upaya peningkatan daya saing bangsa tersebut diatas, jauh-jauh hari pemerintah telah meluncurkan berbagai program kewirausahaan. Pada tahun 1998 dikembangkan Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) dan *Cooperative Education Program* (Co-Op) di Industri. Kemudian, pada tahun 2003 dikembangkan program *Cooperative Education Program* (Co-Op) di UMKM, yang memberikan kesempatan belajar berwirausaha bagi mahasiswa di UMKM. Sedangkan pada tahun 2009 dikembangkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) berupa pembinaan dan pemberian modal bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi meluncurkan program Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI Expo) yang merupakan perluasan

dari program sejenis Expo Kewirausahaan mahasiswa yang sebelumnya dilaksanakan di tingkat Politeknik.

1. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)

Pada tahun anggaran 2009, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional telah meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Program tersebut dilaksanakan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diseleksi oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dengan alokasi dana yang berbeda-beda.

Sebagai bagian dari strategi pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi, PMW dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha dan memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Fasilitas yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, magang, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan dan pendampingan serta keberlanjutan usaha. Program ini diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan.

Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia ini secara umum memiliki tiga tujuan utama. Pertama membentuk

karakter wirausaha mahasiswa berupa proses pengintegrasian antara *hardskill* dan *softskill* (*knowledge, skill, personal quality: motivation, attitude, behaviour, traits, values*) sehingga terbentuk kapasitas wirausaha.

Kedua mendorong tumbuhnya wirausaha muda berbasis keilmuan. Wirausaha muda ini diharapkan sudah memiliki bekal yang cukup berupa keterampilan dasar berwirausaha yang diperoleh melalui berbagai program kewirausahaan yang diikutinya. Kecukupan ilmu ini memberikan bekal bagi lulusan perguruan tinggi untuk menjalankan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Ketiga adalah mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. Lembaga ini dapat menggagas dan membangun pembinaan kewirausahaan yang berkesinambungan dengan sistem pengelolaan yang terencana, sistematis dan progresif serta bersinergi dengan program pembinaan kewirausahaan nasional.

PMW juga bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) berbasis iptek kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir (*mindset*) dari pencari kerja (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*) serta menjadi pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global. Dalam rangka keberlanjutan, program ini juga bertujuan mendorong kelembagaan pada perguruan tinggi yang dapat

mendukung pengembangan program-program kewirausahaan. Sebagai hasil akhir, diharapkan terjadinya penurunan angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi.

Keberhasilan program PMW ini setidaknya dapat dilihat dari tiga indikator utama, yaitu jumlah mahasiswa yang berhasil menjalankan usaha (sebagai wirausahawan); terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi; dan terbentuknya lembaga pengembangan pendidikan kewirausahaan yang tangguh dan mandiri yang mengoordinasikan berbagai kegiatan terkait kewirausahaan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sebagai salah satu program dalam sistem pembelajaran/ pendidikan yang ada di perguruan tinggi, maka PMW harus terintegrasi dan disinergikan dengan program-program kewirausahaan yang telah ada seperti Kuliah Kewirausahaan, Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Program Magang/ Belajar Bekerja Terpadu/Co-op, Kuliah Kerja Usaha (KKU), dan berbagai program kewirausahaan lainnya.

2. Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)

Program PMW awalnya dilakukan secara desentralisasi, namun berdasarkan evaluasi serta agar lebih meningkatkan efisiensi dan keberhasilan program, maka mulai tahun 2017,

program PMW direvitalisasi menjadi Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) dengan pengelolaan secara sentralisasi. Program ini digagas untuk memberikan wadah kepada mahasiswa untuk mempraktekan ilmu dan keterampilan berwirausaha yang sudah didapat, melalui pemberian modal usaha dan pendampingan. Dengan demikian, program KBMI harus sinergi dengan program-program kewirausahaan yang telah ada.

Program KBMI, dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk dukungan permodalan dan pendampingan usaha. Program ini diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah yang tertuang dalam Renstra Kemristekdikti untuk pengembangan entrepreneur pemula dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Program KBMI bertujuan untuk menghasilkan karya kreatif, yang inovatif dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah menyelesaikan studi. Pada program KBMI ini menitikberatkan pada orientasi proses bisnis dan hasil usaha (profit). Kategori program mahasiswa yaitu pengembangan usaha bagi mahasiswa yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya. Adapun komoditas jenis usaha yang dihasilkan oleh mahasiswa dapat berupa usaha makanan dan minuman, jasa dan perdagangan

an, industri kreatif, teknologi dan produksi/budidaya. Rintisan usaha ini selanjutnya dapat menjadi salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar.

Adapun tujuan program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia adalah:

- a) Menumbuhkan karakter bisnis (*sense of business*) untuk memulai dan mengembangkan usaha didukung dengan modal yang diberikan dengan pendampingan secara terpadu;
- b) Membangun keterampilan wirausaha;
- c) Menumbuhkembangkan wirausaha baru.

3. Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT)

Kemampuan bersaing dalam perdagangan jasa maupun barang dipandang merupakan salah satu hal penting agar Indonesia tetap kuat sebagai bangsa yang disegani di dunia, terutama dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Oleh karena itu peningkatan daya saing bangsa (*nation competitiveness*) menjadi salah satu isu utama dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti memandang pentingnya pelibatan atau kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter unggul agar mampu

berkontribusi terhadap daya saing bangsa. Melalui kerjasama berbagai pihak diharapkan setiap potensi yang dimiliki dapat disinergikan guna mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi, tidak saja dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di perguruan tinggi pada umumnya lebih menitikberatkan pada pengembangan intelektual atau kemampuan akademis dan penalaran tapi kurang memberikan bekal kemampuan teknis/operasional untuk memasuki dunia kerja. Di sisi lain dunia usaha dan industri menghendaki tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis serta pengalaman kerja yang sering menjadi kendala bagi mahasiswa untuk memperoleh pekerjaan setelah lulus.

Bertolak dari penancangan program *Cooperative Academic Education* oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada konferensi internasional "The First Indonesian National Executive Conference on Cooperative Academic Education" di Jakarta pada tahun 1994, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Bappenas dan kemudian dengan Dewan Pengembangan Program Kemitraaan (DPPK) telah merintis dan mengembangkan Program *Cooperative Academic Education* (Co-Op) atau Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) yang dilaksanakan dan dikembangkan dengan tujuan memperkenalkan dunia usaha atau dunia kerja lebih dini kepada mahasiswa. Program ini merupakan program yang meng-

integrasikan berbagai latar belakang ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan pengalaman nyata dunia usaha. Di dunia internasional program seperti ini dikenal dengan nama *work-integrated learning* atau *work based learning*. Sedikit berbeda dengan program *link and match* yang lebih dahulu dicanangkan pemerintah yang lebih berorientasi pada *subject-based* atau *curriculum and practice-based learning*, PBBT lebih mementingkan *work place experience* atau pengalaman dan berkegiatan dunia kerja nyata. Untuk pekerjaan yang dilakukannya, mahasiswa peserta mendapat kompensasi keuangan dari perusahaan atau tempat bekerja. Khusus program PBBT, karena keterbatasannya, kompensasi keuangan bagi mahasiswa peserta dapat berasal dari pihak ke tiga atau melalui pendanaan dari Ditjen Belmawa. Selama mengikuti kegiatan, mahasiswa peserta program bekerja seperti layaknya karyawan dan aktivitasnya akan dievaluasi oleh pemilik UMKM dan mentor yang ditunjuk oleh perguruan tinggi. Setelah kegiatan ini selesai maka peserta akan mendapatkan sertifikat.

Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) menetapkan indikator umum keberhasilannya yaitu setiap pihak yang terlibat (mahasiswa, perguruan tinggi, dunia usaha/UMKM) mendapat manfaat dari program tersebut. Oleh sebab itulah program ini diunggulkan sebagai salah satu program bersama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri untuk menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan yang berdaya

saing. Salah satu misi dari program PBBT UMKM selain untuk mendidik mahasiswa agar berjiwa wirausaha, juga dapat membantu UMKM menjadi lebih mandiri, sehat dan berdaya saing. UMKM peserta program menyebar sampai ke pelosok pedesaan, sehingga dengan program PBBT akan mendorong percepatan pemerataan ekonomi, perluasan pembukaan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun tujuan dari program PBBT adalah:

- a) Membangun kapabilitas dan kapasitas mahasiswa sebagai seorang calon wirausaha yang berkarakter, mencakup *knowledge, skill, dan personal quality (motivation, attitude, behaviour, traits, values)*;
- b) Meningkatkan kualitas UMKM dalam pengelolaan dan pengembangan usaha;
- c) Meningkatkan kemitraan antara perguruan tinggi dengan UMKM.

4. Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI EXPO)

Saat ini kewirausahaan sudah menjadi salah satu program nasional yang penting. Hal ini selaras dengan visi dan misi pemerintah untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian nasional melalui peningkatan jumlah wirausaha. Berbagai departemen, instansi pemerintah, swasta hingga lembaga swadaya masyarakat telah meluncurkan berbagai program

kewirausahaan. Selain meluncurkan Studium General, Program Kreativitas Mahasiswa (PKMK), Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) dan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI), Ditjen Belmawa Kemenristekdikti juga meluncurkan program Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI Expo) yang merupakan muara kegiatan pembinaan kewirausahaan sebagai wadah mengapresiasi mahasiswa yang telah aktif berwirausaha.

Tujuan Expo Kewirausahaan Mahasiswa se-Indonesia adalah sebagai berikut:

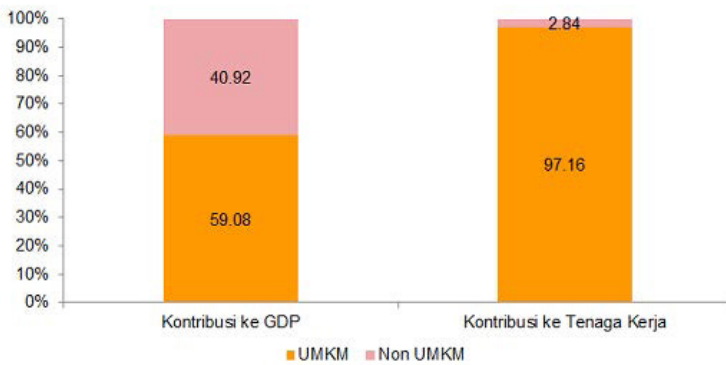
- a) Wahana pengembangan kreativitas wirausaha bagi mahasiswa sebagai calon pengusaha masa depan;
- b) Media untuk berbagi pengalaman antar PT dan praktisi bisnis dalam pengelolaan kewirausahaan mahasiswa;
- c) Fasilitasi promosi produk kreatif-inovatif kewirausahaan mahasiswa Indonesia dan juga produk unggulan daerah;
- d) Membangun jejaring mahasiswa wirausaha;
- e) Sarana unjuk prestasi bagi mahasiswa dan alumni program perguruan Tinggi se-Indonesia dalam hal pengembangan wirausaha.

D. Kewirausahaan dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Ekonomi Negara

Pembangunan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis menumbuhkan tingkat pembangunan nasional. Kebijakan tersebut dirasakan dapat menjadi solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong Koperasi dan UMKM meningkatkan kapasitas dan perannya. Pembangunan Koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penganggulungan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), pembangunan Koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha Koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha.

Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan berpotensi dalam hal kewirausahaan, hal ini dapat dibuktikan bahwa bidang kewirausahaan memiliki dampak positif terhadap tingkat GDP Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi Kementerian



*Diagram Kontribusi Kewirausahaan dalam GDP dan
Tenaga Kerja Indonesia (2012)*

Apalagi ditengah perkembangan dan kemajuan teknologi yang menjadikan semua aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan praktis, khususnya di bidang ekonomi. Perkembangan teknologi tersebut merubah perekonomian menjadi lebih modern dengan peran dari perangkat teknologi informasi dan komunikasi kea rah ekonomi digital. Ekonomi digital saat ini menjadi topik yang hangat terkait ekonomi dunia. Dampak dari ekonomi digital tersebut menjalin berbagai sektor antara lain perbankan, transportasi, kesehatan, media, dan sebagainya. Teknologi komunikasi dan informasi mengubah interaksi sosial dan hubungan personal menjadi semakin bebas, aktif, dan tidak memiliki batasan (*borderless*) dengan adanya jaringan internet.

Berkaca kepada uraian di atas, maka dampak dan peranan kewirausahaan dalam perekonomian di antaranya sebagai berikut.

1. Menciptakan Kesempatan Kerja. Dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan adanya produksi, kesempatan kerja menjadi lebih terbuka dan hal ini dapat mengurangi angka pengangguran.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Nasional. Dengan munculnya produk-produk baru, baik yang berbentuk barang maupun jasa, akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa.
3. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat. Banyaknya kesempatan kerja yang tersedia akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sehingga kesenjangan ekonomi antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah dapat dikurangi.
4. Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat di Bidang Ekonomi. Kewirausahaan mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada pihak lain, tetapi mampu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam perekonomian nasional.

5. Menumbuhkan Daya Kreasi Bangsa. Dengan kewirausahaan, daya kreasi bangsa dapat tumbuh sehingga mampu mengoptimalkan kelangkaan sumber daya ekonomi untuk digunakan secara efektif dan efisien.

E. Menuju Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025

Dalam Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga apabila tujuan tersebut tercapai, maka output yang diperoleh adalah insan-insan Indonesia yang cerdas.

Di sisi lain, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia periode 2005-2025 disebutkan bahwa dalam bidang ekonomi, pada tahun 2025 diharapkan Indonesia telah mampu mewujudkan perekonomian maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.

Sementara dalam bidang pendidikan, Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 memiliki visi Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Insan Indonesia cerdas di

sini bermakna insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas spiritual	Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.	- Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan - Bersehat dan berprestasi tinggi - Jujur - Mandiri - Pantang menyerah - Pembangunan dan pembinaan jejaring - Bersahabat dengan perubahan - Inovatif dan menjadi agen perubahan - Produktif - Sadar mutu - Berorientasi global - Pembelajaran sepanjang hayat - Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas emosional dan sosial	- Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. - Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam, (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.	
Cerdas intelektual	- Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. - Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.	
Cerdas kinestetis	- Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. - Beraktualisasi insan adiraga.	

Tabel Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Adapun karakteristik dari konsep dan indikator pribadi dari Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, dan Kompetitif antara lain (Yulia Ayriza, 2006):

1. *Cerdas Spiritual*: sebenarnya cerdas spiritual (*spirit*: semangat) tidak secara langsung pasti cerdas agama, karena orang yang aktif beragama belum tentu dijamin memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, namun demikian cerdas spiritual dapat membantu orang lebih cerdas secara spiritual dalam beragama. Lagipula tantangan untuk mencapai kecerdasan spiritual yang tinggi sama sekali tidak bertentangan dengan agama, oleh karena itu tetap diperlukan adanya kerangka acuan dari agama untuk dapat mempermudah orang dalam memahami makna dan nilai dalam kehidupan ini.

Dengan demikian, penguasaan agama akan membantu orang dalam mempermudah meningkatkan Kecerdasan Spiritual, sehingga orang dapat menangkap makna dan nilai-nilai dengan lebih baik. Adapun di dalam Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional jangka panjang 2025, pribadi yang cerdas spiritual dibatasi dengan tanda aktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

2. *Cerdas Emosional dan Sosial*: cerdas emosional mencakup di dalamnya cerdas sosial yang berarti kemampuan orang untuk mengelola emosinya dengan melibatkan kerjasama fungsi rasio dengan fungsi emosi, sehingga membuat orang

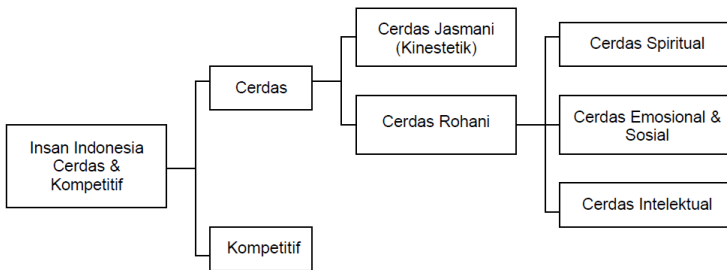
mampu merespon lingkungannya secara lebih efektif karena setiap keputusan yang dibuat dapat selaras dengan pengalaman kehidupan dan budaya. Pribadi yang cerdas emosi dan sosial ditandai dengan:

- a. Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.
 - b. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang:
 - 1) membina dan memupuk hubungan timbal balik;
 - 2) demokratis;
 - 3) empatik dan simpatik;
 - 4) menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - 5) ceria dan percaya diri;
 - 6) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta
 - 7) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
3. *Cerdas Intelektual*: berarti orang memiliki kemampuan mental atau kognitif dalam merespon situasi baru dengan berhasil, serta memiliki kapasitas untuk belajar dari pengalaman masa lalunya. Pribadi yang cerdas intelektual ditandai dengan:

- a. Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif.
4. Cerdas Kinestetik: berarti kesadaran orang tentang pentingnya olahraga dan melaksanakannya untuk mewujudkan kesehatan jasmani. Pribadi yang cerdas kinestetik ditandai dengan:
 - a. Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas;
 - b. Aktualisasi insan adiraga.
5. Kompetitif: yaitu dorongan orang untuk menjadi lebih unggul dari orang lain maupun kemampuan dirinya sendiri di masa lalu, agar dapat tampil dalam kancah globalisasi. Pribadi yang kompetitif ditandai dengan:
 - a. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan.
 - b. Bersemangat juang tinggi.
 - c. Mandiri.
 - d. Pantang menyerah.
 - e. Pembangun dan pembina jejaring.
 - f. Bersahabat dengan perubahan.
 - g. Inovatif dan menjadi agen perubahan.
 - h. Produktif.

- i. Sadar mutu.
- j. Berorientasi global.
- k. Pembelajar sepanjang hayat.

Jika diskemakan, maka aspek-aspek dari Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif di atas dapat dikelompokkan menjadi:



Gambar skema Aspek Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Upaya Mewujudkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Pencapaian terhadap visi pendidikan nasional tidaklah mudah dan dapat dijangkau dalam waktu sekejap, melainkan membutuhkan suatu proses yang panjang. Tujuan tersebut dapat dicapai antara lain melalui proses pendidikan yang panjang di sekolah. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan dapat meliputi pendidikan akademik maupun non-akademik, sehingga pengembangan keempat macam kecerdasan dan karakteristik kompetitif dapat tercapai semuanya melalui pendidikan. Di sisi lain, pengaruh sekolah tidak hanya pada kemampuan akademik

dan prestasi saja, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan psikososial peserta didik itu sendiri.

Karenanya strategi pendidikan yang digunakan dapat ditempuh dengan cara menginkluskikan aspek-aspek dari tujuan yang ingin dicapai ke dalam kurikulum yang bersifat konsentris. Artinya materi pendidikan yang diberikan dari TK sampai dengan sekolah menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi selalu mengandung aspek-aspek dari tujuan yang ingin dicapai tersebut dengan muatan dan konsentasi yang makin lama makin tinggi kadarnya.

Penggunaan strategi ini sangat sesuai dengan sifat kecerdasan yang berkembang sejalan dengan pertambahan usia, terutama untuk kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang dapat berkembang terus sepanjang rentang kehidupan manusia. Selain itu perlu diperhatikan pula bahwa penanaman aspek-aspek dari tujuan pendidikan itu hendaknya dilakukan secara seimbang tanpa mengabaikan peranan dari salah satu aspeknya.



Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pusat Pembelajaran Kewirausahaan

A. Definisi Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, terdapat 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, nonformal, dan informal. Jalur pendidikan nonformal dan informal dikenal juga dengan istilah jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah—baik nonformal maupun informal—memiliki dasar hukum yang legal dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Dasar hukum dari pendidikan nonformal adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, sementara dasar hukum dari pendidikan informal yaitu pasal 27 ayat 1, 2 dan 3.

Pendidikan nonformal sendiri dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang terorganisasi, sistematis, dilakukan diluar sistem persekolahan, dan dilakukan secara mandiri atau menjadi bagian penting dari sebuah kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai

tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (*long life education*). Selain itu, pendidikan non-formal juga berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Nur Agustiningsih, 2017).

Russell J. Kleis dalam buku *Non-Formal Education: The Definitional Problem* (1973) mendefinisikan pendidikan non-formal sebagai berikut:

"...Nonformal education is any intentional and systematic educational enterprise (usually outside of traditional schooling) in which content, media, time units, admission criteria, staff, facilities, and other system components are selected and/or adapted for particular students, populations or situations in order to maximize attainment of the learning mission and minimize maintenance constraints of the system."

Lebih lanjut, Kleis menyatakan bahwa pendidikan non-formal memiliki banyak variasi di mana masing-masing variasi memiliki karakteristik yang unik. Beberapa dari karakteristik tersebut—meskipun tidak berlaku secara universal dan bersifat definitif—antara lain sebagai berikut:

- 1) Cenderung tidak diidentifikasi sebagai “pendidikan,”
- 2) Biasanya berkaitan dengan misi yang bersifat langsung dan praktis,
- 3) Biasanya berlangsung di luar sekolah. Setiap situasi yang dianggap mampu memberikan pengalaman yang sesuai tujuan yang diusung dapat digunakan sebagai lokasi pembelajaran,
- 4) Output pengetahuan yang diperoleh lebih cenderung didasarkan pada kinerja ketimbang sertifikat,
- 5) Biasanya tidak melibatkan muatan, staf, atau struktur yang terorganisasi,
- 6) Biasanya melibatkan partisipasi dari para sukarelawan,
- 7) Biasanya merupakan kegiatan paruh waktu (menyesuaikan waktu peserta),
- 8) Instruksi jarang dinilai dan sifatnya berurutan,
- 9) Biasanya biayanya lebih murah dibandingkan pendidikan formal,
- 10) Kriteria penerimaan peserta didik tidak seperti pada umumnya. Peserta didik yang dianggap membutuhkan materi pembelajaran yang tersedia atau yang dibutuhkan oleh situasi bisa diterima menjadi peserta,
- 11) Pemilihan mentor cenderung lebih didasarkan pada kemampuan yang ditunjukkan ketimbang pada kredensial; dan pemimpin biasanya sering terlibat secara sukarela,

- 12) Tidak terbatas pada klasifikasi organisasi, kurikuler atau personil tertentu, dan
- 13) Berpotensi memiliki efek ganda (ekonomi dan efisiensi) karena adanya keterbukaan untuk memanfaatkan personel, media, dan elemen-elemen lain yang sesuai yang mungkin tersedia dalam situasi tertentu tanpa memedulikan kriteria eksternal yang biasanya tidak relevan, mahal, dan terbatas.

Merujuk kepada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 3, ada beberapa bentuk pendidikan nonformal, yaitu:

1. Pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup membantu seseorang bagaimana memlihara dirinya, tumbuh menjadi dirinya, bekerjasama dengan orang lain secara baik, membuat keputusan secara logis, melindungi diri sendiri, dan mampu mencapai tujuan dalam kehidupannya. Di antara tujuan dari pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil dalam menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya di masa mendatang.

2. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
3. Pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para remaja/pemuda melalui sebuah pelatihan kepemudaan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan potensi diri.
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan ini bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pendidikan pemberdayaan perempuan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas perempuan, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
5. Pendidikan keaksaraan. Jenis program pendidikan keaksaraan berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca dan menulis. Dulu program ini dikenal istilah pemberantasan buta huruf (PBA). Sekarang program keaksaraan terkenal dengan istilah kursus pengetahuan dasar (KPD). Targetnya ialah terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta pengetahuan umum dan buta bahasa Indonesia.
6. Pendidikan kesetaraan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyetarakan pendidikannya

seperti pendidikan formal, biasanya dalam hal ini ada paket A untuk SD/MI, paket B untuk SLTP/MTs., dan paket C untuk SLTA/ MA. Pendidikan kesetaraan ini diperuntukan untuk warga masyarakat usia wajib belajar tidak dapat mengikuti pendidikannya di sekolah, masyarakat karena hambatan sosial, ekonomi, budaya dan geografis tidak dapat mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan sekolah. Untuk itulah, Program Paket A dan B memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menempuh pendidikannya yang setara dengan SD dan SLTP melalui jalur pendidikan luar sekolah.

Dalam Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 1 ayat 12, pendidikan nonformal didefinisikan sebagai “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”. Sementara ayat 13 menyatakan, “Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan”. Karena pendidikan luar sekolah mencakup pendidikan nonformal dan/atau informal, maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan sekolah yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, baik di dalam keluarga, lingkungan, maupun di dalam masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa definisi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang dikemukakan oleh para tokoh (Nur Agustiniingsih, 2017; Maman Hilman, 2008):

1. Pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, yang menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun anak-anak. (*Philip H. Coombs*)
2. Pendidikan luar sekolah merupakan kegiatan yang ditandai dengan kesengajaan dari kedua belah pihak, yaitu pendidik yang sengaja membelajarkan peserta didik, dan peserta didik yang sengaja untuk belajar. (*George H. Axinn*)
3. Pendidikan luar sekolah adalah sebuah metode penerapan kebutuhan, minat orang dewasa, dan pemuda putus sekolah di negara berkembang, membantu dan memotivasi mereka untuk mendapatkan keterampilan guna menyesuaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup. (*Suzanne Kindervatter*)

Suzanne Kindervatter sendiri mengusulkan pendidikan pendidikan luar sekolah sebagai “*empowering process*,” yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada seseorang atau kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomi dan politik sehingga dapat memperbaiki

kedudukannya dalam masyarakat. Program pembelajaran dalam empowering process dirancang untuk memberi kesempatan kepada para anak putus sekolah, dengan menganalisis keadaan kehidupan mereka guna, mengembangkan keterampilan yang dikehendaki agar dapat merubah keadaan kehidupan mereka.

4. Pendidikan luar sekolah adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi manusia (sikap, tindak dan karya) sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar-mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. (*Washington Pandapotan Napitapulu*)
5. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dimana seseorang memperoleh informasi-informasi pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat kerterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga bahkan masyarakat dan negaranya. (*Adikusumo*)
6. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan belajar membelajarkan, diselenggarakan luar jalur pendidikan sekolah dengan tujuan untuk membantu peserta didik

untuk mengaktualisasikan potensi diri berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, lembaga, bangsa, dan negara. (*Djudju Sudjana*)

7. Pendidikan luar sekolah merupakan sistem baru dalam dunia pendidikan yang bentuk dan pelaksanaannya berbeda dengan sistem sekolah yang sudah ada. Pendidikan luar sekolah terdapat hal-hal yang sama pentingnya bila dibandingkan pendidikan sekolah seperti: bentuk pendidikan, tujuannya, sasarannya, pelaksanaannya, dan lain sebagainya. (*Soelaiman Joesoef*)
8. Pendidikan luar sekolah adalah usaha yang terorganisir secara sistematis dan kontinyu di luar sistem sekolah, melalui hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompok dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial (yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup dibidang material, sosial dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. (*Hamijoyo*)

Definisi dan pengertian pendidikan luar sekolah yang dikemukakan para pakar tersebut di atas pada prinsipnya menuju pada suatu wawasan mengenai pendidikan luar sekolah yaitu setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, guna membantu peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi diri dalam mengembangkan

tingkat pengetahuan, penalaran, keterampilan sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Hasil yang diperoleh dari pendidikan luar sekolah diharapkan dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Model Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah

Di dalam Pendidikan Luar Sekolah, paling tidak terdapat 3 bentuk kegiatan belajar atau model pembelajaran yang selalu dilakukan (Maman Hilman, 2008). Ketiga model tersebut adalah:

1) Belajar kelompok

Belajar kelompok adalah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang memiliki hubungan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain sesuai dengan status dan peranannya masing-masing, di mana setiap anggota kelompok tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain demi mencapai tujuan bersama.

Istilah belajar kelompok sesungguhnya memberikan konotasi bahwa kegiatan belajar dilakukan secara bersama-sama dan menjadi proses pertukaran ide di mana dua orang atau lebih mengekspresikan, menjelaskan, dan mengumpulkan pengetahuan, pengalaman, pendapat dan perasaan-perasaannya. Dalam belajar kelompok, pengalaman belajar tidak hanya diperoleh dan berasal dari sumber belajar, melain-

kan terdapat pula melalui interaksi kelompok antar peserta didik itu sendiri.

2) Magang

Magang merupakan salah satu kegiatan belajar yang asli dan berusia paling tua. Setelah manusia mengenal perkakas, senjata, pakaian, perumahan dan bahasa, hasrat untuk mengetahui, menguasai, dan sikap untuk memiliki benda-benda tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Dengan adanya hasrat itu, maka pada masa lampau telah terjadi kegiatan atau proses pemberian dan penerimaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap tertentu dari seseorang yang memiliki aspek-aspek tersebut kepada orang yang belum dan ingin memiliki aspek-aspek tersebut.

Menurut Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Lembang Bandung, magang adalah proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam bidangnya. Sementara Djudju Sudjana mengemukakan, “Magang sebagai cara memberi dan menerima informasi yang telah ada dalam kehidupan manusia telah berhasil dalam menjembatani pemindahan pengalaman seseorang kepada

orang lain yang belum memiliki pengalaman sehingga orang disebut terakhir itu berdiri sendiri.”

Magang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar dalam pendidikan luar sekolah, dalam pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu dan tempat serta mempunyai gagasan life long education sebagai konsep utama dalam pendidikan luar sekolah, serta berupaya untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara efisien, efektif dan relevan dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam kegiatan belajar magang, terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Menurut Sudjana, dalam kegiatan magang terdapat: 1) Tujuan, 2) Bahan, 3) Sumber belajar, 4) Warga belajar, 5) Sarana, 6) Tempat, 7) Waktu, dan 8) Biaya akomodasi.

3) Latihan keterampilan

Penyampaian materi pendidikan tidak cukup diberikan secara ceramah atau teori yang muluk-muluk, tetapi harus didukung dengan latihan-latihan. Dalam mengembangkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi, maka produktivitas manusia harus ditingkatkan melalui berbagai keterampilan. Latihan keterampilan bertujuan untuk mengembangkan mental, keuletan, dan kedisiplinan, yang

kesemuanya itu harus dipraktikkan secara kongkret di dalam kehidupan masyarakat.

Latihan keterampilan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu cara sistematis yang diberikan, kepada seorang untuk mendapatkan suatu keterampilan tertentu. Mengacu kepada jenisnya, latihan keterampilan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1) latihan keterampilan pra-jabatan untuk menyiapkan calon pekerja dalam menghadapi jenis pekerjaan tertentu; dan 2) latihan keterampilan tambahan bagi mereka yang sudah bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan efisiensi kerja. Latihan keterampilan umumnya direncanakan untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi pekerjaan yang membutuhkan keterampilan sekaligus pemahaman yang sukar untuk dikerjakan secara teori.

Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti suatu latihan keterampilan umumnya ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) kemampuan umumnya tingkat pendidikan; 2) pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh sebelumnya dan yang berhubungan dengan yang dipelajari saat ini; 3) bakat dan kecerdasan dalam bidang tertentu; 4) sikap dan minatnya terhadap apa yang dipelajari; 5) fasilitas belajar yang diperolehnya melalui mata, telinga, dan pengalaman-pengalaman; dan 6) cara pengajaran yang ada.

C. Peran & Fokus PLS Dalam Pengembangan Keterampilan Wirausaha

Generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya peningkatan pembinaan dan pengembangannya harus terus digalakkan dalam kerangka pendidikan nasional. Guna meningkatkan kebijakan nasional di bidang pendidikan tersebut, maka pemberdayaan di semua jalur pendidikan—baik formal, informal, maupun nonformal—mutlak diperlukan.

Pendidikan nonformal sebagai salah satu jalur pendidikan berupaya melakukan pemberdayaan terhadap pemuda produktif yakni melalui program pendidikan kecakapan hidup. Hal tersebut sejalan dengan terdapat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (3) menyatakan: *“Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”*.

Adapun tujuan dari program ini adalah memberikan seseorang bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya.

Sebagaimana telah dikemukakan di awal, PLS—sebagai bagian dari pendidikan nonformal—merupakan pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan masyarakat agar memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal. Untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global.

Pembangunan—khususnya pendidikan dan pembelajaran—merupakan suatu proses pemberdayaan diri: individu, komunitas dan masyarakat supaya dapat merespon situasi lingkungannya. PLS sebagai proses pemberdayaan yang berkiprah di bidang pembangunan menggunakan pendekatan strategis dan fungsional yang dapat membantu masyarakat memberdayakan dirinya dan mereka mampu memberi kontribusi agar "*resources are distributed more equitably*" untuk memperbaiki kehidupan mereka (Kindervatter, 1979). PLS sendiri dimunculkan dengan maksud:

... to respond the limitation of schooling, quantitatively in terms of desks and chairs availability, and qualitatively in terms of appropriateness of those desks and chairs, centralistic-oriented curricular and rote memory learning methods that the formal education can not meet the needs of largely rural and poor population and to confront this unfinished business of school (Philip H. Coombs, 1973).

PLS dalam eksistensinya secara transparan memaparkan misi dan tujuannya: (a) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sediri mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu hidupnya; (b) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang yang lebih tinggi; dan (c) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi di dalam jalur pendidikan sekolah (UUSPN/ Nomor 2/1989).

Dengan demikian, maka salah satu peran dari pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap pendidikan sekolah adalah untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Isi program yang ada dalam pendidikan luar sekolah dapat didasarkan pada kebutuhan peserta didik sehingga bentuknya dapat bermacam-macam, seperti pendidikan keterampilan produktif, olahraga, kesenian, kelompok belajar, kelompok rekreasi, kelompok pencinta alam, dan lain-lain Pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Jika dijabarkan, maka peran pendidikan luar sekolah dapat dikelompokkan ke dalam 3 peran, yaitu (Maman Hilman, 2008):

1. Sebagai ***substitute*** dari pendidikan sekolah, artinya pendidikan luar sekolah dapat menggantikan jalur pendidikan formal yang karena beberapa hal tidak mengikuti pendidikan pada jalur formal. Misalnya Kejar Paket A, B, dan C.
2. Sebagai ***supplement*** dari pendidikan sekolah, artinya pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah. Misalnya privat, les, dan training.
3. Sebagai ***complement*** dari pendidikan sekolah, artinya pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak diperoleh di sekolah. Misalnya *tryout* dan pelatihan.

Adapun *outcome* yang diharapkan dari pendidikan luar sekolah antara lain berupa: (a) perubahan kesejahteraan hidup lulusan yang ditandai dengan perolehan pekerjaan atau berwirausaha, perolehan atau peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan penampilan diri; (b) membelajarkan orang lain terhadap hasil belajar yang telah dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh lulusan; dan (c) peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan/atau pembangunan masyarakat baik dalam bentuk pikiran, tenaga, harta benda, dan dana.

Di sisi lain, keterampilan atau keahlian yang menjadi fokus pendidikan luar sekolah akan sangat berguna bagi masyarakat dalam mencari nafkah untuk membiayai berbagai kegiatan

hidupnya. Dengan keterampilan yang diperoleh, masyarakat tidak hanya mudah mendapatkan pekerjaan namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga semua masyarakat mampu menggerakkan ekonomi keluarga yang berakibat pada pemenuhan kebutuhan.

Dalam konteks PLS, penciptaan masyarakat gemar belajar (*societal learning or learning society*) dan masyarakat gemar merencana (*planning society*) juga menjadi bagian yang perlu dikembangkan. Masyarakat gemar belajar adalah masyarakat yang gemar mencari dan menyampaikan informasi baru, informasi yang berkenaan dengan kepentingan kehidupan, dan masyarakat yang secara terus-menerus belajar memperbaiki diri dan lingkungannya dan menjadikan belajar itu sebagai bagian dari kehidupannya. Warga belajar masyarakat perlu belajar memperbaharui diri: menambah pengetahuan dan wawasan baru, mengadopsi teknik-teknik dan metode baru dalam memecahkan masalah kehidupan masa depannya (Botkin, Emandjra, dan Malitza, 1984).

Sistem belajar inovatif (*innovative learning system*) bertumpu pada dua kegiatan belajar: belajar mengantisipasi dan belajar berpartisipasi. Berbeda halnya dengan cara belajar adaptif yang melakukan penyesuaian reaktif terhadap tekanan-tekanan eksternal, belajar mengantisipasi (*anticipatory learning*) lebih merujuk kepada keproaktifan warga belajar dalam mempersiapkan dan mengantisipasi kemungkinan dan alternatif

jangka panjang. Belajar mengantisipasi lebih merujuk pada cara-cara mempersiapkan masyarakat sebagai warga belajar menggunakan teknik-teknik seperti: *forecasting*, *simulations*, *scenarios*, dan *models* untuk memahami kecenderungan (trend), menyusun rencana, mengevaluasi kemungkinan konsekuensinya, memperkirakan *side-effects* dari kebijakan dan keputusan yang diambil sekarang, memahami implikasi global dari aksi lokal, nasional, dan regional yang dilakukan serta mencari alternatif-alternatif pemecahan baru. Tujuan belajar antisipatori adalah untuk melindungi masyarakat dari trauma cara belajar bertahan dengan kejutan. *Anticipatory learning* membuat perkiraan secara sistematis dan realistis tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang menggunakan imajinasi yang berdasarkan fakta keras, mencegah kemungkinan negatif dari lingkungan fisik dan sosial, menyeleksi peristiwa yang dikehendaki dan bencana potensial yang tidak dikehendaki serta menciptakan alternatif-alternatif baru yang lebih bersahabat.

D. PLS Sebagai Alternatif Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Selain dapat menjadi modal utama pembangunan negara, jumlah penduduk yang besar di suatu negara juga bisa menjadi beban negara apabila penduduk yang besar jumlahnya itu tidak diiringi dengan kualitas-kualitas tertentu. Kualitas manusia

itu sendiri perlu dilihat dari dua aspek, yaitu aspek dalam diri manusia itu sendiri dan aspek pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Aspek dalam diri manusia yang perlu didorong dan dikembangkan adalah motivasi dan semangat yang kuat untuk berusaha mengubah berbagai hambatan yang ada di dalam dirinya dan masyarakatnya menjadi kekuatan-kekuatan pembaharuan dan perubahan kehidupan masyarakat menuju ke masyarakat maju (modern). Sementara aspek luar yang membantu pengembangan aspek dalam diri manusia itu adalah peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam arti luas termasuk latihan keterampilan (Babari, 1986).

Upaya mengembangkan kedua aspek itu dapat juga disebut sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang utuh. Sebab istilah “sumber daya manusia” mencakup semua energi, keterampilan, bakat, pengetahuan manusia yang telah dipergunakan dan/atau yang secara potensial dapat dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat.

Dalam berbagai referensi dan kajian banyak disampaikan bahwa kelangkaan tenaga profesional dan trampil sering dilihat sebagai dampak dari kelemahan sistem pendidikan nasional. Masalah ini sama buruknya dengan masalah pengangguran yang keduanya dinilai bisa terjadi karena kurang tanggap atau pekanya pihak penyelenggara pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat industri.

Diyakini bahwa kemiskinan-kemelaratan, kebodohan-ke-malasan, pengangguran, dan sikap pasrah pada situasi hanya akan dapat diatasi dari dalam diri mereka sendiri. Mubyarto)—sebagaimana dikutip (FX. Sudarsono, 1993)—menggambarkan kemiskinan sebagai berikut:

“Kenyataan yang melekat pada diri orang miskin pada umumnya adalah kurang pendidikan, kurang sehat, kurang luas lingkup pergaulannya, yang kesemuanya menyebabkan mereka tidak dapat menciptakan akses kepada sumber-sumber daya pembangunan. Secara demikian, orang miskin dipaksa oleh kenyataan dirinya untuk terasing dari proses pembangunan.”

Atas dasar gambaran tersebut, maka salah satu upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan membangkitkan kemampuan agar mereka mampu memperoleh dan menciptakan akses sumber-sumber daya pembangunan, dan dengan akses tersebut mereka akan mampu bangkit atau mengentaskan diri dan kehidupannya dari kemiskinan dan pengangguran, baik secara kultural maupun struktural.

Kemiskinan kultural merupakan keadaan yang diciptakan dan dilestarikan oleh si miskin karena kemiskinannya. Makna kebudayaan kemiskinan menunjuk pada adanya suatu cara hidup yang secara bersama dialami dan dilakukan oleh orang-orang miskin dalam konteks sejarah dan sistem sosial tertentu.

Paul Willis dalam bukunya *Learning to Labour* menggambarkan bagaimana proses pewarisan kebudayaan miskin para buruh di Inggris melalui suatu generasi ke generasi berikutnya selama puluhan tahun. Sekolah yang diadakan di daerah pemukiman para buruh tidak mampu mengangkat anak-anak buruh untuk lepas dari kebudayaan buruh yang miskin, dan akhirnya sekolah hanya berfungsi adaptif terhadap lingkungannya. Untuk mengubah keadaan yang tidak menguntungkan ini, maka pendidikan luar sekolah harus secara terpadu dan serentak menggarap semua warga masyarakat miskin dan menganggur untuk secara bersama-sama dan sendiri-sendiri mengubah kehidupan dan kebudayaan kemiskinannya.

Pada saat ini semakin disadari bahwa pendekatan dari satu segi saja tidaklah mencukupi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Pendekatan ekonomi dengan memberikan bantuan modal melalui berbagai macam kredit justru menyisakan tidak sedikit masalah baru. Pemberian bantuan berupa sarana fisik juga sering menjadi mubazir karena masyarakat tidak mampu mendayagunakan dan memeliharanya dengan baik, karena tidak memiliki dana untuk itu.

Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa pendekatan pendidikan di dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dipandang lebih strategis untuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pendekatan pendidikan yang kira-

nya dapat dipakai untuk program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran tersebut adalah:

1. Reorientasi dan restrukturisasi kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah lanjutan pertama. Hal ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan; pertama, bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama (yang akan menjadi pendidikan dasar 9 tahun) berada di desa atau paling tidak berada di ibu kota kecamatan, sehingga kehidupan sekolah tidak lepas dari kehidupan masyarakat desa. Kedua, data statistik pendidikan menunjukkan bahwa jumlah tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama di daerah pedesaan (terlebih di desa tertinggal) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar, dan mereka kembali hidup di desa atau pergi ke kota mengadu nasib.

Banyak di antara tamatan sekolah dasar yang kembali buta huruf setelah beberapa tahun. Oleh karena itu, reorientasi kurikulum dimaksudkan untuk mengkaitkan kurikulum dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang memiliki nilai praktis di dalam kehidupan mereka yang bersifat ekonomis. Dengan demikian, kepergian si anak ke sekolah tidak dipandang sebagai kerugian atau kehilangan nilai ekonomi (*earning forgone*), tetapi dengan bersekolah nilai ekonomiknya akan bertambah. Jadi orang tua dapat menikmati keuntungan yang diperoleh anak dengan ber-

sekolah. Konsep *link and match* dapat diterapkan melalui pemasukan nilai praktis kurikulum muatan lokal maupun mata pelajaran yang bersumber pada kehidupan masyarakat. Sedang restrukturisasi kurikulum berarti kurikulum yang terlalu sarat dengan bebas teoretik akademik perlu diseimbangkan dengan kenyataan kondisi masyarakat di mana sekolah diselenggarakan, sehingga sesuai dengan kebutuhan tanpa mengabaikan kualitas hasil pendidikan.

2. Peningkatan efektivitas pembelajaran orang dewasa khususnya di dalam pelaksanaan paket A, KBU, kursus, dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang belum pernah mendapat pendidikan sekolah dan atau yang berpendidikan rendah yang tidak mampu belajar sendiri secara mandiri, tetapi memerlukan pendampingan. Proses belajar orang dewasa memerlukan waktu relatif lebih lama dan hasil pendidikan tidak dapat segera nampak dirasakan. Oleh karena itu perlu strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Maka adaptasi dan modifikasi sistem dan cara atau metodologi pembelajaran diperlukan. Untuk itu perlu adanya evaluasi dan kajian terhadap metode yang selama ini dianggap cocok bagi siapa saja.
3. Penerapan konsep pendidikan sepanjang hayat (*long life education*) secara nyata di dalam bentuk program-program pendidikan dan pelatihan. Dengan pendekatan ini para warga belajar akan memahami secara keseluruhan proses

pendidikan yang bakal terjadi dan dapat dialaminya jika mereka berkehendak terus menerus mengembangkan diri. Pendidikan luar sekolah tidak dipandang sebagai segment atau lapisan, tetapi akan dipandang sebagai wahana atau kendaraan pengembangan diri sepanjang hayat. Dengan demikian warga belajar akan mempunyai harapan bahwa sekalipun masyarakat terus berkembang dengan kemajuan teknologinya, mereka tidak akan merasa ditinggalkan, sebab pendidikan luar sekolah selalu tersedia sebagai kendaraan untuk mengejar ketertinggalannya. Jadi mereka akan tetap dapat beradaptasi dengan tuntutan kemajuan teknologi, sehingga dapat “*survive and sustain*” dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleksuntutannya.

4. Penerapan konsep pembelajaran secara kolaboratif dan partisipatif di mana warga belajar dan pihak pengajar/pelatih secara bersamasama terlibat di dalam kegiatan belajar. Dengan konsep ini warga belajar merupakan subjek belajar, dan bukan sebagai orang yang berada di bawah (*subordinate*) yang kedudukannya hanya melaksanakan perintah, petunjuk, nasihat, dianggap tidak atau belum tahu apaapa. Dalam konsep belajar sebagai rekan atau partner kerja belajar yang berkedudukan sejajar. Inilah kiranya yang menjadi ciri utama di dalam pembelajaran orang dewasa. Sebab dapat terjadi warga belajar di dalam pengalaman praktik lebih banyak dibandingkan dengan

pihak pengajar, maka pengajar akan dapat mengambil pengalaman warga belajar dan mengkonseptualisasikan untuk dijadikan bahan ajar. Pengajar harus mampu memanfaatkan apa yang dimiliki warga belajar untuk diolah kembali menjadi bahan belajar bagi warga belajarnya. Dalam konsep ini terkandung pula pemikiran dari warga untuk warga dan oleh warga belajar agar mereka dapat mandiri, sekalipun di dalam proses mereka membutuhkan pendamping belajar pada tahap awal. Untuk penerapan konsep tersebut diperlukan perubahan sikap dari para pengajar/pelatih sendiri bagaimana memperlakukan warga belajar dewasa sebagai rekan atau partner kerja-belajar yang memiliki kedudukan sejajar.



Wirausaha Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis Pendidikan Luar Sekolah

Belajar bahasa internasional merupakan salah satu kebutuhan masyarakat saat ini. Sebab di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini, penguasaan bahasa Inggris menjadi bekal atau investasi penting untuk masa depan. Baik untuk meningkatkan ketrampilan komunikasi, untuk keperluan pekerjaan, untuk mendukung pendidikan yang mereka tempuh, maupun untuk keperluan bisnis yang mereka jalankan.

Walaupun sebenarnya belajar bahasa Inggris itu mudah dan bisa dilakukan sendiri dengan membeli buku panduan yang banyak beredar di pasaran. Namun kebanyakan masyarakat masih mencari lembaga-lembaga pelatihan bahasa Inggris yang dapat membantu mereka untuk mahir berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Meningkatnya minat masyarakat tersebut membuat wirausaha bidang bahasa Inggris memiliki prospek yang cerah dan berpotensi menjadi peluang usaha yang masih layak untuk dicoba. Hal ini pula yang mendorong bisnis tersebut

telah beredar di berbagai daerah untuk memenuhi permintaan pasar. Sebab bukan hanya para pelajar dan mahasiswa saja yang menjadi target pasarnya, masyarakat umum juga menjadi target pasar yang sangat berpotensi.

Di antara sekian banyak usaha pendidikan bahasa Inggris yang berkembang sekarang ini, terdapat beberapa lembaga yang sudah berhasil mengembangkan bisnisnya hingga memiliki cabang dan kemitraan di beberapa kota. Misalnya saja English First (EF) yang telah sukses dengan strategi pemasaran yang menentukan sasaran pasarnya secara luas, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan kursus bahasa untuk level perusahaan. Selain itu ada juga Kidea Learning Center yang menentukan target pasarnya khusus untuk anak mulai umur 3 sampai 12 tahun. Pelaku usaha sengaja memilih sasaran pasar anak-anak, sebab banyak orang tua yang mulai mengenalkan bahasa Inggris sejak putra-putrinya usia dini. Ternyata pemasaran bisnis ini cukup menarik, dan mendorong para orang tua untuk memasukan putra-putrinya ke lembaga kursus bahasa Inggris tersebut.

Kebutuhan masyarakat untuk mempelajari bahasa Inggris masih akan terus meningkat. Jika Anda mempunyai keahlian atau ketrampilan di bidang ini, maka tidak ada salahnya jika Anda memulai usaha bidang bahasa Inggris. Anda bisa memulainya dengan usaha kecil-kecilan yang tidak membutuhkan modal besar, misalnya saja menawarkan jasa privat untuk kursus

bahasa Inggris. Namun jika Anda memiliki modal yang cukup besar, Anda bisa mencoba bekerjasama menjalin kemitraan dengan lembaga kursus yang sudah ternama.

A. Pengembangan Wirausaha Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis PLS

David Crystal (2000) menyatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa global. Pernyataan ini mewakili makna bahwa bahasa Inggris digunakan oleh berbagai bangsa untuk berkomunikasi dengan bangsa di seluruh dunia. Jadi, bahasa Inggris adalah salah satu bahasa Internasional sekaligus bahasa global. Pembelajaran dan pemahaman bahasa Inggris menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dengan mempelajari bahasa Inggris, seseorang akan terbuka wawasan dan pengetahuannya secara internasional. Sebagai bahasa global, bahasa Inggris memegang fungsi dan peran yang sangat besar. Salah satu implikasi yang terlihat adalah semakin banyak orang berusaha belajar/ menguasai bahasa Inggris dengan baik.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bahasa Inggris mutlak dibutuhkan untuk berkompetisi di era globalisasi. Pengetahuan bahasa Inggris untuk perkembangan seseorang individu di negara Indonesia menjadi suatu hal yang tidak terelakan. Suka tidak suka, subyek yang satu ini menjadi hal yang perlu dipelajari oleh setiap orang Indonesia. Walaupun

Anda tidak yakin akan mendapat kesempatan untuk ke luar negeri, pengetahuan ini tetap diperlukan juga. Minimal, Anda tidak perlu terbangong-bongong ketika menonton siaran berita CNN lantaran tidak ada terjemahan di bagian bawah layar televisi atau bingung saat membaca buku manual penggunaan alat elektronik yang hanya tercetak dalam bahasa Inggris (Irtia Fitria, 2012).

Tentunya, kita mempelajari bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Banyak orang mempelajari bahasa Inggris karena mereka tahu persis manfaat apa yang akan mereka peroleh dari belajar bahasa tersebut. Ada banyak manfaat bahasa Inggris yang kita ketahui bahkan masih banyak yang belum diketahui. Konsep berpikir kita selama ini terlalu sempit dalam menyikapi arti belajar bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah untuk mencapai standar nilai yang ditentukan. Padahal ada beberapa manfaat bahasa Inggris secara umum yang bisa memotivasi dan merangsang minat belajar kita. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

- ❖ Untuk tujuan akademis. Pelajaran bahasa Inggris memang menjadi pelajaran wajib bagi semua siswa bahkan yang bukan dari jurusan bahasa Inggris.
- ❖ Untuk pengembangan karir. Dunia kerja tergiur oleh orang yang cakap dalam berbahasa Inggris. Kecakapan ini akan menjadi nilai lebih bagi calon pelamar kerja karena mereka

dianggap lebih kompetitif dari yang tidak/ kurang cakap berbahasa Inggris.

- ❖ Untuk ke luar negeri. Bagi mahasiswa, melanjutkan studi ke luar negeri sangatlah bergengsi. Namun, mereka harus lolos TOEFL. Tes ini mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris.
- ❖ Untuk memperluas pergaulan. Bahasa Inggris sangatlah penting untuk menjalin komunikasi internasional.
- ❖ Untuk menaklukkan internet. Anda mungkin berpikir bahwa banyak situs yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Faktanya, 80% informasi elektronik hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Sedangkan 20% sisanya tidak semuanya didominasi oleh bahasa Indonesia.

Program pengembangan wirausaha bidang pendidikan bahasa Inggris berbasis Pendidikan Luar Sekolah dimaksudkan agar terbentuk para wirausahawan kecil dan menengah yang mampu mengaplikasikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam bidang bahasa Inggris di dunia usaha. Oleh karena itu, peserta didik yang sudah memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan perlu diarahkan dan dibina untuk merintis usaha kecil. Adapun langkah-langkah dalam merintis usaha kecil adalah:

- a) Menganalisis lokasi yang tepat untuk memulai usaha: tepat antara jenis barang atau jasa yang dijual dengan kebutuhan masyarakat, tepat dan strategis dengan bahan baku.
- b) Merencanakan usaha kecil, yang mencakup: berapa modal yang dibutuhkan, sarana-prasarana yang dibutuhkan, spesifikasi barang yang sesuai dengan kebutuhan, rencana promosi, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan lain-lain.
- c) Memulai usaha mandiri, yang dibutuhkan dalam memulai usaha mandiri adalah: produksi barang atau jasa, penentuan harga, ketepatan lokasi, pola promosi, administrasi, dan services.
- d) Mengembangkan usaha, dengan cara: menjaga mutu produksi barang atau jasa, diversifikasi produksi barang atau jasa, meningkatkan mutu layanan, inovasi berbagai bentuk produk atau layanan, korporasi, penguatan modal, dan penggunaan teknologi.

B. Beberapa Contoh Wirausaha di Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis PLS

Semakin pentingnya Bahasa Inggris bagi berbagai kalangan pada saat ini, baik untuk kalangan profesional, politisi, akademisi maupun mahasiswa bisa menjadi peluang yang bagus dan masih terbuka lebar untuk dijadikan sebagai sasaran wirausaha bagi para lulusan PLS bidang Bahasa Inggris.

Di sisi lain, dengan semakin meningkatnya ekonomi global dan budaya kerja, bahasa Inggris telah menjadi tanda ekspansi internasional dan menjadi merupakan simbol pertumbuhan bagi perusahaan. Alhasil, pemahaman tentang bahasa asing sama pentingnya dengan gelar sarjana, tidak hanya pengalaman kerja semata.

Jika mengacu kepada 3 jenis kategori usaha yang menjadi referensi kewirausahaan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya (Rusydi Ananda dan Tien Rafida, 2016), maka wirausaha Bahasa Inggris masuk pada kategori usaha jasa (*service*), yaitu usaha yang mengandalkan sumber daya manusia sebagai modal keunggulan dalam bersaing dengan didukung oleh faktor sumber daya teknologi, modal, dan marketing—meskipun tidak menutup kemungkinan juga untuk memilih dan mengambil kategori usaha yang lainnya. SDM inilah yang nantinya akan berhubungan langsung dalam aktivitas pemberian jasa kepada konsumen.

Adapun beberapa jenis usaha berkaitan dengan pendidikan Bahasa Inggris yang bisa diberdayakan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah antara lain:

1. Kursus Bahasa Inggris

Dalam Pasal 26 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga kursus masuk dalam satuan pendidikan nonformal. Sementara dalam pasal 26 ayat 5 dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan diseleng-

garakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu dilengkapi dengan pasal 103 ayat 1 PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian professional dan untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik kursus.

Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya ditujukan untuk mempelajari satu keterampilan tertentu. Misalnya, kursus Bahasa Inggris, kursus montir, kursus memasak, kursus menjahit, kursus musik, dan lain sebagainya.

Seiring dengan diimplementasikannya program Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), pasar bebas di kawasan Asia yang sudah dimulai sejak awal tahun 2015, setiap orang dimungkinkan bersaing secara bebas untuk mencari pekerjaan di negara-negara Asia. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan untuk bisa berbahasa Inggris sesuai dengan bidang-bidang profesi yang digeluti oleh para

tenaga kerja. Kemampuan bahasa Inggris merupakan aset yang meningkatkan kredibilitas suatu profesi dan untuk mengembangkan karir. Jadi, saat ini peluang yang paling potensial adalah wirausaha penyedia paket-paket kursus khusus untuk bidang-bidang profesi karena yang seperti ini belum banyak tersedia. Meskipun ada, biasanya disediakan oleh lembaga-lembaga kursus yang sudah established dengan harga paket yang tinggi (Luh Putu Artini, Ni Nyoman Padmadewi, P.K. Nitiasih, 2016).

Fenomena tersebut mengkonfirmasi terkait masih terbukanya peluang yang lebar untuk memulai wirausaha berbasis lembaga kursus Bahasa Inggris, di samping karena permintaan pasar yang tinggi atas tenaga kerja yang mahir berbahasa Inggris. Selain itu, juga karena popularitas jurusan Pendidikan Bahasa Inggris sangat tinggi sehingga memiliki kemudahan untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap kualitas keilmuan yang dimiliki lulusan. Oleh sebab itu, jika kesempatan untuk berbisnis kursus bahasa Inggris bisa dikelola dengan manajemen bisnis yang profesional, maka bukan tidak mungkin akan menjadi bisnis pendidikan yang sangat potensial dan menjanjikan. Jika melihat kenyataannya masih banyaknya sarjana tamatan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris yang belum dilengkapi dengan keterampilan untuk mengelola kursus secara profesional, maka pendidikan bahasa Inggris me-

lalui jalur Pendidikan Luar Sekolah bisa menjadi alternatif sehingga perlu diupayakan adanya pelatihan yang bisa menyiapkan mereka untuk menjadi wirausaha muda sesuai dengan bidang keilmuannya yang banyak memberikan keuntungan finansial dan bisa menjadi profesi utama dalam hidup mereka. Di samping itu, kesempatan ini dapat membuka peluang bagi mereka untuk mampu memperkerjakan orang lain, sehingga program pelatihan ini memiliki dampak terhadap pemberdayaan masyarakat secara umum.

Namun di tengah semakin maraknya lembaga kursus yang ada saat ini, jika ingin memilih wirausaha kursus Bahasa Inggris perlu diperhitungkan dengan baik dan matang terkait nilai-nilai keunggulan yang ingin ditonjolkan. Nilai-nilai tersebut bisa mengacu kepada fungsi, sasaran peserta, program yang ditawarkan, metode yang dipakai, atau tujuan dari kursus Bahasa Inggris.

a) Fungsi Kursus

Berdasarkan fungsinya, kursus dapat dikategorikan pada tiga jenis. Pertama, bimbingan tes yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar melalui pelajaran tambahan. Kedua, kursus keterampilan yang bertujuan memberikan atau meningkatkan keterampilan seperti mengetik, kecantikan, bahasa asing, montir, dan lain-lain dengan sasaran para

lulusan SMP dan SMA yang memerlukan sertifikat keterampilan untuk mencari kerja. Ketiga, gabungan kedua jenis kursus di atas dengan beragam motivasi pendirian.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (2010) membagi jenis-jenis kursus menjadi lima yaitu:

- 1) Kursus Para-Profesi (KPP). Program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup (PKH) yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu seperti operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sebagai bekal untuk bekerja.
- 2) Kursus Wirausaha Perkotaan (KWK). Yaitu program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat di bidang usaha yang berspektrum perkotaan guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, menumbuhkan berkembang sikap mental berwirausaha, dalam mengelola diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha.
- 3) Kursus Wirausaha Pedesaan (KWD). Yaitu program pendidikan kecakapan hidup yang di-

selenggarakan oleh lembaga yang bergerak dibidang pendidikan nonformal dan informal untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan menumbuh kembangkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha atau bekerja.

- 4) Kursus Wirausaha Pedesaan (KWD) bagi daerah tertinggal. Yaitu program pelayanan pendidikan berupa kursus dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kawasan daerah tertinggal agar memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap mental kreatif) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha.
- 5) Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi lembaga kursus dan pelatihan (PKH-LKP). PKH-LKP adalah program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat agar memperoleh pengetahuan, ke-

terampilan dan menumbuhkan kembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan atau berwirausaha dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya.

b) Sasaran peserta

Jika membuka wirausaha kursus bahasa Inggris untuk semua kalangan dianggap berisiko—khususnya bagi wirausahawan pemula, maka pembatasan sasaran peserta kursus bisa menjadi alternatif yang bisa diambil. Misalnya kursus bahasa Inggris untuk pelajar SD, SMP, atau SMA.

Tidak sedikit lembaga kursus bimbingan tes yang menyelenggarakan bimbingan khusus untuk pelajar tingkat tertentu misalnya kelas 9 SMP yang akan ujian atau kelas 12 SMA, kursus bahasa Inggris untuk yang akan mengikuti tes SBMPTN, kursus bahasa Inggris untuk yang akan mengikuti tes wawancara, dan lain sebagainya.

Selain mampu mengurangi risiko kegagalan, pembatasan sasaran peserta kursus bagi seorang wira-

usahawan—khususnya pemula—juga bisa menjadi senjata promosi karena memiliki fokus materi yang ditawarkan.

c) Program yang Ditawarkan

Program kursus bahasa Inggris ditawarkan di berbagai lembaga kursus umumnya terbagi ke dalam 4 level program, yaitu:

- ❖ *Basic level* adalah tahapan belajar di bulan pertama dengan mempelajari Dasar bahasa inggris hingga mampu berbicara dengan sederhana.
- ❖ *Pre-Intermediate level* adalah tahapan kedua dengan target bisa berbicara dengan lebih lancar dan 100% telah mampu menggunakan bahasa inggris dalam keseharian.
- ❖ *Intermediate level* adalah tingkat ketiga yang akan difokuskan kepada pendalaman bahasa inggris dengan lebih baik lagi sehingga bisa lebih mampu mengembangkan ide-ide dalam berbicara menggunakan teknik berbicara yang benar.
- ❖ *Advanced level* adalah tingkat terakhir yang mana di tingkat ini siswa akan diajari bahasa inggris yang akademik, formal, terstruktur dengan menguji seluruh kemampuan dalam bahasa

inggris dengan target mampu mengajarkan kembali materi belajar yang telah dipelajarinya juga akan mempelajari tentang TOEFL.

d) Metode yang Dipakai

Kemampuan bahasa Inggris, terutama dalam berkomunikasi, telah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikuasai masyarakat guna menghadapi era globalisasi yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Usaha dari setiap individu untuk mengembangkan kemampuan ini dapat tercermin dari masyarakat kita yang sudah cukup aktif menggunakan bahasa Inggris dalam dunia kerja dan sekolah.

Sayangnya minat masyarakat dan para pekerja profesional untuk belajar bahasa Inggris yang cukup tinggi itu ternyata diikuti dengan tingkat kesibukan yang relatif padat dan ditambah kemacetan di kota besar yang semakin menjadi. Hal ini tentu saja ibarat lingkaran setan bagi para profesional yang sudah terlanjur terlambat untuk belajar bahasa Inggris.

Berangkat dari permasalahan tersebut, salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam konteks wirausaha kursus bahasa Inggris adalah metode pembelajaran

bahasa Inggris yang fleksibel, di mana peserta didik dapat memilih untuk belajar di kelas melalui kelas tatap muka dengan guru *native*, belajar secara online, atau kombinasi antara keduanya.

Metode pembelajaran lainnya yang juga bisa digunakan dalam kursus pembelajaran bahasa Inggris adalah metode *Communicative Language Teaching* (CLT) atau yang biasa disebut dengan metode pembelajaran komunikatif. Metode ini mencakup beberapa kemampuan berbahasa yaitu reading, listening, conversation, dan grammar (Adila Rara Cynthia dan Ade Cahyana, 2014). Dengan demikian, tujuan pengajaran bahasa adalah mengembangkan kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Dalam konteks wirausaha bidang bahasa Inggris, agar program kursus dapat berjalan lancar, pemilihan metode menjadi hal yang krusial karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari masing-masing peserta didik.

e) Tujuan Kursus

Salah satu program yang ditawarkan dalam kursus bahasa Inggris adalah kursus yang dimaksudkan un-

tuk tujuan khusus/ tertentu atau yang kita kenal dengan *English for Specific Purpose (ESP)*. *English For Specific Purposes (ESP)* adalah pendekatan dalam pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan profesi pengguna bahasa Inggris yang bersangkutan. Bidang ilmu dan profesi tersebut misalnya *english for policemen, english for public relation, english for secretary, english for banking, english for tourism and tour guide, english for food and beverage, english for artshop attendance and sellers, english for paramedics*, dan lain lain. Program ESP biasanya meyasar kaum profesional, pekerja di sektor nonformal dan formal karena sebagian besar dari mereka memang memerlukan kemampuan berbahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan menjadi tenaga kerja yang profesional.

Dudley-Evans & St. John sebagaimana dikutip Momtazur Rahman (2015) menjabarkan tiga karakteristik tetap dari definisi pembelajaran ESP. Pertama, pembelajaran ESP didesain untuk mengakomodasi kebutuhan khusus/spesifik dari pembelajar. Kedua, pembelajaran ESP menggunakan metodologi dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan

disiplin ilmu/profesi yang dijalankan oleh pembelajar. Ketiga, pembelajaran ESP berpusat pada bahasa (tata bahasa, kosakata, dan register), keterampilan, dan genre yang spesifik sesuai dengan kegiatan dalam disiplin ilmu atau profesi pembelajar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep *English for Specific Purpose* (ESP) adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik dengan materi ajar dan metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dari pembelajar. Pembelajaran dilakukan melalui indentifikasi kebutuhan dari peserta didik (*need assessment*) dengan cara melihat background peserta didik dan kemudian disesuaikan dengan materi dan metode yang akan diajarkan. Dalam lingkup pendidikan luar sekolah, konsep seperti ini sangat cocok digunakan yaitu dengan metode *Student Centre Learning* (SCL) atau metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Menjalankan usaha kursus bahasa Inggris tentu saja bukan tanpa kendala sama sekali. Salah satu kendala yang biasanya muncul adalah tenaga pengajar, di mana tidak sedikit tenaga pengajar yang keluar setelah mendapat pengalaman kerja untuk mencari gaji yang lebih tinggi.

Selain itu, usaha kursus bahasa Inggris juga harus memiliki sistem yang jelas. Apalagi mengingat biaya atau investasi untuk terjun ke bisnis seperti ini tidak kecil. Karenanya untuk dapat berkembang, usaha kursus bahasa Inggris harus mencari lokasi yang strategis karena mayoritas konsumen kursus bahasa Inggris merupakan kelas menengah ke atas.

2. Pelatihan TOEFL, IELTS, dan TOEIC

Sasaran dari pelatihan TOEFL, IELTS, dan TOEIC adalah mereka yang memiliki rencana untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Seperti kita ketahui, selain visa, ada hal yang penting yang perlu diperhatikan yaitu hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang tercermin dari tiga macam tes kemampuan bahasa Inggris yang diakui oleh perguruan tinggi di luar negeri tersebut dan dibuktikan dalam bentuk sertifikat.

Berikut ini adalah di antara beberapa manfaat dari sertifikat TOEFL, IELTS, dan TOEIC:

- ❖ Digunakan untuk pendaftaran program *short course* dan *non-degree* program di negara-negara berbahasa Inggris.
- ❖ Digunakan untuk pendaftaran ke program sarjana (S1) dan master bagi yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
- ❖ Digunakan untuk pendaftaran dan penempatan dalam

program kolaborasi internasional yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.

- ❖ Untuk mendaftar program beasiswa ke berbagai negara.
- ❖ Untuk tes masuk program berbahasa Inggris yang membutuhkan bukti kemampuan bahasa Inggris akademik di level sarjana (S1) atau diploma.
- ❖ Untuk memonitor perkembangan kemampuan bahasa Inggris khususnya yang memerlukan kecakapan/ keahlian dalam bahasa Inggris akademik.
- ❖ Untuk mendapatkan beasiswa pendidikan.
- ❖ Sebagai prasyarat (*admission requirements*) untuk mendaftar ke SMA dan Universitas di dalam dan luar negeri.
- ❖ TOEFL bagi para pelamar kerja.
- ❖ Untuk kenaikan jabatan atau promosi.

Adapun ketiga jenis tes kemampuan bahasa Inggris yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*)

TOEFL adalah ujian kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendaftar masuk ke universitas di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara bagian Amerika utara. Di Indonesia, TOEFL juga digunakan untuk mengetahui profisiensi bahasa Inggris di ber-

bagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik di universitas, institut, sekolah tinggi maupun politeknik dengan standar skor yang bervariasi di setiap perguruan tinggi.

Tes TOEFL sendiri terdiri dari 4 bagian yaitu, *listening comprehension*, *grammar structure and written expression*, *reading comprehension*, dan *writing* dengan lima jenis tes, yaitu: *Prediction test*, *Internet based test* (IBT), *Computer Based Test* (CBT), *Paper based test* (PBT), dan *Institutional Testing Program* (ITP).

b) IELTS (*International English Language Testing System*)

IELTS adalah ujian kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendaftar masuk ke universitas di negara sekitar Eropa, Inggris, New Zealand, dan Australia. Ada dua bentuk ujian IELTS, yaitu versi *academic* dan versi *general training*. Versi *academic* diperuntukan untuk mendaftar ke perguruan tinggi atau untuk keperluan akademis. Sedangkan versi *general training* diperlukan untuk kegiatan non akademis seperti bekerja atau tinggal ke luar negeri. Ujian IELTS terdiri dari tiga bagian; 40 menit digunakan untuk bagian *listening* (mendengar), 60 menit

untuk *reading* (membaca), dan 60 menit lagi untuk *writing* (menulis). Hasil dari nilai IELTS diurutkan dengan *9-band scoring system*. Nilai tertinggi yaitu 9 akan dinyatakan sebagai *Expert User*, sedangkan nilai terendah yaitu 1 dinyatakan sebagai *Non User*.

c) TOEIC (*Test of English for International Communication*)

TOEIC ditujukan untuk mengukur kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sistem poin yang digunakan untuk ujian ini adalah 10 – 990 untuk yang tertinggi. TOEIC terdiri dari dua bagian yaitu *listening* dan *reading*.

3. Kampung Inggris



Siapa yang tak kenal Kampung Inggris yang berlokasi di Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur? Kampung Inggris yang berdiri sejak 37 tahun yang lalu itu awalnya berasal dari upaya seorang pria dari Kutai, Kalimantan Timur yang bernama Kolend Olsen yang mendirikan BEC (Basics English Course) pada tahun 1977 untuk melatih mahasiswa mengembangkan kemampuan bahasa inggris. Berkat ketekunannya dari tahun ke tahun BEC semakin berkembang dan menjadikan alumnus-alumnus yang mahir berbahasa Inggris.

Kolend Olsen berpesan kepada semua murid yang telah lulus dari BEC untuk mendirikan tempat belajar bahasa Inggris yang baru di sekitar kampung seperti Desa Tulungrejo dan Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sejak itu secara perlahan kampung ini dikenal menjadi pusat belajar para ahli bahasa Inggris. Hingga saat ini tercatat sekitar 300 tempat belajar bahasa Inggris yang ada di Pare. Begitu kentalnya daerah yang banyak kawasannya berisi tempat-tempat kursus Bahasa Inggris sehingga disebut Kampung Inggris.

Kegiatan pelatihan bahasa Inggris seperti yang berlaku di Kampung Inggris Pare ini bisa menjadi motivasi sekaligus percontohan bagi wirausahawan lainnya yang ingin membuka wirausaha bidang bahasa Inggris. Selain mampu

menjadi usaha bagi wirausahawan, kegiatan pelatihan semacam ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat lokal terhadap bahasa Inggris. Tidak hanya itu, jika bisa dilakukan di berbagai wilayah, kegiatan pelatihan bahasa Inggris ala Kampung Inggris Pare juga bisa mendekatkan calon peserta pelatihan di luar kota Pare yang ingin belajar bahasa Inggris ala Kampung Inggris sehingga tidak perlu pergi ke Pare dan sekaligus juga mampu mendongkrak roda perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pelatihan.

4. Bimbel Bahasa Inggris Online

Dewasa ini bimbingan belajar (bimbel) berbasis online sudah menjamur di Indonesia. Konsep bimbel online adalah tidak mengharuskan siswa siswi untuk duduk dan belajar di kelas, melainkan belajar di mana saja asalkan dapat mengakses internet. Karena praktis dan harganya yang lebih terjangkau dibanding bimbel konvensional, banyak orang yang berminat menggunakan layanan ini.

Di sisi lain, perkembangan era 4.0 telah membuka beragam peluang usaha baru yang terkadang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Berbagai start-up yang bergerak di bidang teknologi edukasi (*edu-tech*) terus muncul dengan berbagai tawaran keunggulannya masing-masing.

Pertumbuhan dunia digital yang pesat memang telah membawa banyak tren baru dalam masyarakat. Tidak hanya

sebatas media sosial untuk eksistensi diri saja. Teknologi digital juga dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, belajar online telah menjadi tren yang menjamur di kalangan masyarakat. Kemudahan akses internet di tanah air benar-benar telah dimanfaatkan sebagai lahan usaha yang membuat pertumbuhan start-up bidang pendidikan semakin menjamur.

Beberapa *start-up* berikut ini bisa menjadi gambaran bagi para wirausahawan bidang bahasa Inggris betapa usaha bimbingan belajar berbasis online masih memiliki peluang yang lebar untuk dijalankan.

a) *Cakap*

Cakap merupakan salah satu *star-up* bimbingan bahasa yang bertujuan untuk meng-upgrade kecakapan berbahasa asing secara online. Selain bahasa Inggris, platform ini juga menawarkan kursus untuk bahasa Mandarin, Jepang, dan Indonesia bagi para ekspatriat. Beberapa metode *online learning* yang ditawarkan antara lain *Private Class* (belajar bahasa asing secara privat) dan *Corporate Class* (pelatihan bahasa kepada perusahaan untuk mengembangkan skill karyawannya).

b) *Kelas.com*

Kelas.com menyediakan suatu platform edukasi online di mana siapa saja dapat belajar materi pembelajaran

apapun yang mereka inginkan bukan hanya dari seseorang yang pandai di suatu bidang, tetapi dari para ahlinya langsung, yaitu mentor-mentor terbaik di Indonesia dengan sajian materi yang juga beragam. Di sini, peserta didik bisa belajar berbagai skill dari para mentor yang handal di bidangnya seperti belajar fotografi dari Darwis Triadi dan Rio Motret, belajar make up dari Ryan Ogilvy, mendalami teknik memasak dari Chef Juna, dan lain-lain.

c) *Purwadhika*

Purwadhika yang didirikan oleh Purwa Hartono—seorang Entrepreneur dan Software Engineer—adalah sebuah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Startup dan Coding. Jenis course yang ditawarkan dalam *Purwadhika* juga beragam, mulai dari Job Connector, Digital Marketing, Data Science, UX Design, dan masih banyak lagi.

d) *Musiq.id*

Musiq.id adalah platform yang fokus pada les musik berbasis online. Berbagai instrumen musik mulai dari gitar, piano, saxophone, bass, dan drum bisa dipelajari melalui video tutorial yang tersedia dan dimentori oleh musisi favorit.

e) *Ruang Guru*

Ruang Guru adalah satu dari sedikit *start-up ed-tech* di Asia Tenggara yang telah memperoleh tahap pendanaan Seri-A. *Ruang Guru* mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les privat, serta konten-konten pendidikan lainnya.

5. Jasa penerjemah

Bahasa adalah alat komunikasi manusia. Komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik bila ada pemahaman. Pemahaman muncul karena bahasa yang digunakan sama. Tetapi kadangkala ketidakpahaman terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan bahasa yang dipergunakan. Untuk mengatasi ketidakpahaman bahasa tersebut, diperlukan sebuah “jembatan”. Jembatan tersebut adalah penerjemah yang bisa menghubungkan antara bahasa satu dengan bahasa yang lain.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, penerjemah telah dan masih memberi banyak kontribusi berharga. Kemampuan pengalihbahasakan yang mereka miliki, sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam kegiatan penerjemahan, obyek penerjemahan terbagi menjadi dua, yaitu penerjemahan teks dan penerjemahan lisan atau interpreter.

a) Penerjemahan Teks

Penerjemahan teks adalah menerjemahkan sebuah teks yang tertulis, baik dalam bentuk buku, artikel ilmiah jurnal dan lain lain. Dalam penerjemahan teks, penerjemah menerjemahkan beragam kalimat untuk kemudian dialihkan kedalam bahasa lain. Dalam proses menerjemahkan, mereka menggunakan perkakas, lazimnya disebut sebagai perkakas penerjemahan. Adapun perkakas penerjemahan adalah, kertas, pensil atau bullpen, serta kamus.

b) Penerjemahan Lisan

Penerjemah lisan adalah penerjemahan yang dilakukan dengan berbicara. Penerjemahan ini memiliki bahasa sendiri. Di dalam bahasa Inggris, penerjemahan tulis disebut sebagai *translation*, sedangkan terjemahan lisan disebut sebagai *interpretation*. Di Indonesia, ahli penerjemah lisan dikenal sebagai *interpreter*.

Seorang interpreter biasanya memiliki ketrampilan yang lebih dari penerjemah teks. Mereka tidak hanya bisa memahami ujaran pembicara tetapi juga terampil dalam membuat catatan dan mengungkapkan hasil pemahaman dan catatannya kedalam bahasa sasaran secara lisan.

Selain beberapa jenis usaha bidang bahasa Inggris di atas, wirausaha bidang bahasa Inggris juga bisa menyasar bidang industri media dan jurnalisme seperti menjadi seorang *news researcher*, *news anchor*, *script writer*, *content writer*, hingga reporter. Sementara dalam bidang pariwisata, jenis usaha lain yang bisa digeluti antara lain bisnis biro perjalanan khusus wisatawan asing yang bertamasya ke Indonesia atau bisnis penerjemahan pribadi.

Untuk semakin menarik minat calon peserta, selain memilih nilai-nilai keunggulan yang ingin ditonjolkan dari masing-masing jenis usaha, juga bisa ditambahkan berbagai fasilitas yang bisa diberikan seperti: program gratis mengulang, program garansi uang kembali 100%, gratis sertifikat, kebebasan *request* waktu dan tempat belajar, dan lain-lain.



Analisis Peluang Usaha

Ditengah pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi ini, maka mau tidak mau para wirausahawan atau calon wirausahawan perlu melakukan kajian atau analisis secara mendalam terkait usaha yang telah atau akan mereka jalankan. Lantas pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan agar usaha yang dilakukan bisa *survive*—dan lebih jauh semakin bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas?

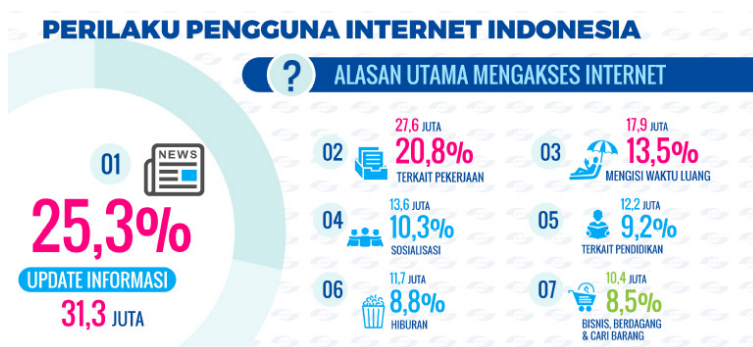
A. Kemajuan Teknologi versus Tuntutan Globalisasi

Tak dapat dimungkiri bahwa saat ini teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan pelaku usaha di Indonesia. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha, mau tidak mau para pelaku usaha membutuhkan dukungan teknologi agar usahanya bisa berkembang di tengah semakin ketatnya persaingan pasar.



Diagram Tantangan Kewirausahaan di Era Globalisasi

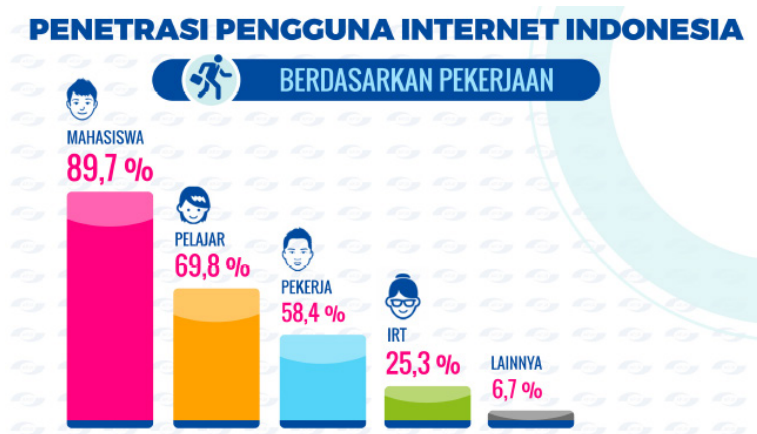
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016 menyebutkan bahwa internet telah menjangkau lebih dari 51,8% populasi Indonesia, di mana alasan terbesar dalam mengakses internet adalah berkaitan dengan pekerjaan:

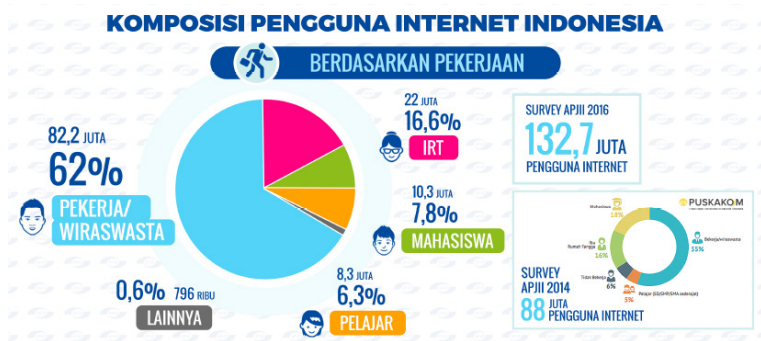


Infografis persentase alasan penggunaan internet

Pada tahun 2030, APJII memperkirakan 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih (net income) di atas USD 3.600. Serta terdapat tren permintaan produk-produk digital di pasar global yang meningkat.

Dari hasil survei infografis yang dilakukan APJII, dapat kita lihat bahwa pesatnya kemajuan teknologi telah mengakibatkan perkembangan dan perubahan bisnis yang signifikan dan lebih jauh sekaligus turut berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan para wirausahawan di Indonesia.





Infografis penetrasi dan komposisi pengguna internet di Indonesia berdasarkan pekerjaan

Di sisi lain, pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang. Dengan potensi yang begitu besar, pemerintah menargetkan bisa tercipta 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar USD 10 miliar dan nilai e-commerce mencapai USD 130 miliar pada 2020.

Mengacu pada uraian di atas, dapat kita katakan bahwa kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini telah membuka peluang yang luas bagi siapa saja untuk berbisnis atau membuka usaha melalui berbagai media tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga dengan berbagai faktor yang semakin

kompleks, jika pelaku usaha tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan baik, maka bukan tidak mungkin usaha yang baru dirintis atau sedang dikembangkan akan semakin jauh tertinggal dan terpuruk.

Karenanya untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibutuhkan SDM yang berkualitas, kreatif, dan inovatif (baik masyarakat maupun kalangan dunia usaha) agar dapat memainkan peran sebagai pelaku aktif yang dapat bersaing atau bahkan keluar sebagai pemenang dalam persaingan global. Sumber daya manusia yang berkualitas juga sudah menjadi tuntutan dan keharusan untuk dapat menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam memperebutkan lapangan pekerjaan yang semakin sempit.

Bagaimanapun, kita tidak bisa menolak atau menghindari dari globalisasi karena ia hadir seiring dengan perkembangan peradaban manusia, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, yang paling mungkin dilakukan oleh para wirausahawan adalah terus mengasah diri untuk menghadapi dan menjalaninya, turut serta berperan dalam setiap tantangan dan peluang yang tersedia. Para wirausahawan harus “melek teknologi” agar dapat mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk tujuan kemaslahatan umat manusia.

Di sisi yang lain—jika dilihat dan ditanggapi secara bijak—kemajuan teknologi di era globalisasi juga bisa menjadi ‘berkah’ bagi pelaku usaha/industri kecil dan menengah untuk berubah

menjadi usaha/industri multinasional. Di mana kondisi ini memberi kesempatan yang lebih tinggi bagi para pemula untuk bisa terlahir secara global karena proses digitalisasi memungkinkan siapapun dan dengan model usaha apapun untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas dengan cepat. Hal ini nampak dari banyaknya usaha kecil dan menengah di berbagai penjuru dunia yang telah berubah menjadi usaha besar, bergabung dengan pasar *e-commerce*, dan bahkan turut bersaing dengan usaha-usaha besar multinasional.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, para wirausahawan dituntut untuk mengasah diri agar mampu menghadapi beragam perubahan yang terjadi:

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia; Perkembangan sebuah usaha tidak bisa dilepaskan dari adanya persaingan. Maka ditengah ketatnya persaingan antarusaha tersebut, peningkatan mutu SDM menjadi langkah awal yang harus dilakukan jika usaha yang dijalankan ingin bertahan. Siapa-pun yang terlibat dalam usaha yang sedang dijalankan harus mau meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya masing-masing sehingga usaha yang sedang dijalankan bisa tetap bertahan di berbagai kondisi.
2. Cepat tanggap; Responsivitas terhadap perubahan yang terjadi secara mendadak hanya bisa dihadapi jika para pelaku usaha memiliki SDM yang berkualitas dan tangguh. Kejelian pelaku usaha dalam melihat berbagai peluang

yang ada, kecepatan dalam menangani keluhan para konsumen, dan tanggap terhadap beragam serangan dari kompetitor merupakan sedikit contoh responsivitas yang perlu dimiliki oleh setiap wirausahawan. Setiap kesalahan yang dilakukan saat ada peluang atau dalam menangani keluhan konsumen, akan mengurangi tingkat kepuasan konsumen sehingga mereka akan beralih ke kompetitor.

3. Evaluasi; Dalam sebuah usaha, evaluasi mutlak dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah berjalan dengan baik atau belum. Dengan melakukan evaluasi, sistem manajemen usaha akan semakin baik. Dengan sistem manajemen usaha yang baik dan terukur, maka usaha yang dijalankan bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai bentuk perubahan.
4. Upgrade teknologi dan akses informasi; Agar dapat mendukung laju usaha yang dijalankan, perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak boleh diabaikan oleh para wirausahawan. Hal ini karena—diakui atau tidak—teknologi telah menjadi sarana yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat memudahkan proses usaha. Karenanya, upgrade teknologi menjadi hal yang penting dilakukan oleh setiap wirausahawan demi mendukung laju usahanya.

Di sisi lain, informasi juga merupakan hal yang penting bagi proses berjalannya sebuah usaha. Keterbatasan kepada akses informasi akan membuat usaha menjadi ketinggalan

jaman. Karenanya, seorang wirausahawan perlu terus meningkatkan akses informasi terkait segala hal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Jika sebelumnya hanya memanfaatkan media elektronik (televisi) atau media cetak (surat kabar) sebagai rujukan informasi, maka saat ini internet dan sosial media bisa digunakan secara maksimal untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Yang juga tidak kalah penting dan tidak boleh diabaikan oleh seorang wirausahawan adalah mengaskes informasi melalui individu-individu yang berkompeten di setiap bidangnya. Memperluas koneksi dan membangun relasi dengan mereka yang memiliki pengalaman lebih kaya di bidang-bidang tertentu akan semakin memperluas wawasan dan wacana tentang kunci-kunci sukses kewirausahaan.

Sekali lagi, kita sebagai pelaku atau calon wirausahawan tidak akan mampu melawan arus globalisasi dan kemajuan iptek seperti saat ini. Kita juga perlu menyadari sepenuhnya bahwa arus globalisasi telah membuat dan membawa persaingan ke arah yang semakin terbuka. Seiring dengan hal itu, tantangan dan persaingan yang harus dihadapi juga semakin banyak dan luas karena pola persaingan sudah berada dilevel lintas negara (pasar bebas). Maka jika usaha yang akan atau telah dijalankan ingin survive, kita membutuhkan lebih banyak sumber daya

manusia yang kreatif dan inovatif karena sumber daya yang unggul yang akan menang dalam persaingan pasar bebas.

B. Analisis Kelayakan Usaha (*Analyzing business feasibility*)

Siapa pun yang sedang atau baru akan memulai usaha, tentu ingin usahanya bisa sukses dan sekaligus tidak menghendaki kegagalan. Sayangnya ditengah kondisi dan situasi di masa depan yang penuh dengan berbagai ketidakpastian, tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin dan memprediksi apakah usaha yang sedang atau telah kita rintis akan selalu berjalan mulus atau bahkan berhenti ditengah jalan. Dalam kondisi yang demikian, maka mau tidak mau seorang pengusaha dituntut untuk selalu berhati-hati dalam memulai atau mengembangkan usahanya. Pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif, kalkulasi yang matang, dan prediksi di berbagai aspek perlu dilakukan dan menjadi perhatian.

Berbagai pertimbangan itu dapat diperoleh melalui studi atau analisis terhadap beragam aspek kelayakan bisnis yang akan dijalankan, sehingga hasil dari studi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah usaha atau bisnis yang dianalisis layak untuk dijalankan, ditunda, atau bahkan dibatalkan dan diganti dengan jenis usaha yang lain. Lebih jauh, jika hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa usaha tersebut memang layak untuk dijalankan, maka

pertimbangan selanjutnya adalah apakah usaha itu mampu mendatangkan penghasilan (*benefit*)— baik *financial benefit* maupun *social benefit*—dan kepuasan bagi pelakunya, mampu mensejahterakan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sebagainya.

Serangkaian studi atau penelitian secara komprehensif dan sistematis terkait variabel strategis apa saja yang kiranya menjadi penentu kelayakan sebuah usaha untuk dijalankan itulah yang dikenal dengan istilah Analisis Kelayakan Usaha (*analyzing business feasibility*). Salah satu tujuan dilakukan analisis kelayakan usaha adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalisasi hambatan dan risiko yang mungkin akan timbul di masa mendatang yang penuh dengan ketidakpastian.

Kasmir dan Jakfar (2013)—sebagaimana dikutip A. Rusdiana (2018)—menjelaskan bahwa analisis kelayakan bisnis/usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Layak dalam konteks ini dimaknai dengan memberikan keuntungan tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas.

Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa suatu kegiatan usaha dapat dikatakan layak jika dapat memenuhi persyaratan tertentu. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha diperlukan perhitungan dan asumsi-asumsi sehingga dapat di-

tarik kesimpulan bahwa dari segi keuangan perusahaan ini layak untuk dijalankan. Dengan kata lain, analisis kelayakan usaha dilakukan untuk mengidentifikasi masalah di masa mendatang sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan melesetnya hasil yang sudah ditargetkan untuk dicapai. Pendek kata, dalam analisis kelayakan usaha diperhitungkan antara lain hambatan atau peluang dari investasi yang akan dijalankan.

Melakukan analisis kelayakan usaha secara mendalam berarti meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian mengukur, menghitung, dan menganalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan serangkaian metode tertentu.

Dalam buku *Studi Kelayakan Bisnis* (Suliyanto, 2010)—sebagaimana dikutip Akhmad Rizqul Karim, disebutkan bahwa secara umum aspek yang menjadi objek analisis kelayakan usaha antara lain: (1) Aspek hukum; (2) Aspek lingkungan; (3) Aspek pasar dan pemasaran; (4) Aspek teknis dan teknologi; (5) Aspek manajemen dan sumber daya manusia; dan (6) Aspek keuangan.

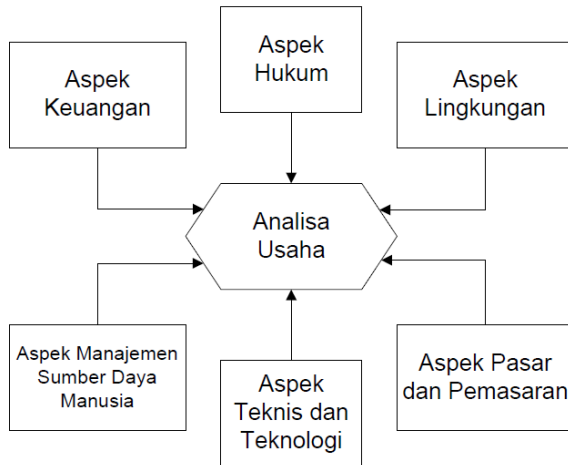


Diagram Aspek Analisis Kelayakan Usaha

Mengacu pada gambar di atas, bagi wirausahawan pemula atau masih dalam tahap merintis suatu usaha, aspek manajemen dan SDM, aspek hukum, serta aspek lingkungan belum begitu urgen untuk diperhitungkan pada tahap awal—namun bukan berarti tidak perlu untuk dilakukan. Aspek manajemen dan SDM dikatakan belum begitu urgen karena usaha yang baru dirintis belum membutuhkan banyak tenaga kerja.

Dari aspek hukum, usaha dengan skala kecil yang baru dirintis biasanya belum melibatkan banyak koneksi dengan pihak luar dan badan hukum terkait pengurusan perizinan (izin lokasi maupun izin usaha) sehingga aspek legalitas usaha masih dipandang belum perlu mendapat perhatian. Sementara keter-

batasan wilayah operasional dari usaha yang baru dirintis menjadikan analisis aspek lingkungan belum begitu diperlukan—tentu saja hal ini menjadi pengecualian jika usaha yang akan dirintis sudah sejak awal berpotensi menghasilkan limbah.

Adapun aspek yang perlu diperhatikan dan dianalisis oleh calon wirausahawan pada tahap awal adalah aspek teknis dan teknologi, aspek pasar dan pemasaran, serta aspek keuangan. Aspek teknis dan teknologi perlu dianalisis untuk mengetahui apakah secara teknis usaha yang akan dilakukan dapat dijalankan dan teknologi yang diperlukan sudah tersedia dan mendukung. Dengan kata lain, aspek teknis dan teknologi ini berkaitan dengan kesiapan calon wirausahawan dalam menjalankan usahanya, meliputi pemilihan lokasi, jenis, dan skala usaha, peralatan yang sesuai dengan kapasitas usaha, serta ketepatan pemilihan dan penentuan teknologi yang akan digunakan dalam menjalankan usaha. Seperti kita ketahui bersama, teknologi telah dan masih akan terus berkembang dari masa ke masa. Namun demikian, tidak semua teknologi yang baru hadir pasti akan cocok jika diaplikasikan pada proses usaha yang sedang dirintis. Untuk itu, pemilihan teknologi yang tepat perlu untuk dilakukan dalam rangka memudahkan proses usaha yang sedang dijalankan. Jangan sampai pemakaian teknologi yang maju justru membuat usaha yang sedang dijalankan menjadi mundur.

Adapun analisis yang perlu dilakukan dari aspek pasar dan pemasaran berkaitan dengan ada-tidaknya peluang pasar untuk

produk yang akan ditawarkan oleh usaha tersebut. Salah satu tujuan dari pemasaran sebuah produk adalah untuk memenuhi permintaan konsumen. Karena itu dibutuhkan riset pasar untuk menemukan ceruk pasar yang cocok dengan produk yang akan dipasarkan, mencari teknik pemasaran yang relevan, dan merencanakan sasaran yang realistis. Di antara aspek yang masuk dalam kategori ini meliputi potensi pasar, pangsa pasar atau kondisi persaingan usaha sejenis, marketshare, dan strategi pemasaran yang akan dipilih dan diterapkan.

Sementara aspek keuangan berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh, biaya-biaya yang mungkin timbul (investasi dan modal kerja), serta proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana dari usaha yang akan dijalankan.

Selain ketiga aspek di atas, aspek lain yang kiranya penting dimasukkan dalam studi analisis kelayakan usaha adalah aspek sosial ekonomi dan budaya. Aspek ini berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat karena adanya usaha tersebut. Sebagaimana telah disinggung dalam bab terdahulu, berbicara tentang kewirausahaan tidak semata berbicara soal profit atau kalkulasi laba-rugi usaha. Lebih jauh dan lebih penting dari itu adalah bagaimana kewirausahaan mampu memberikan solusi dan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha, baik itu peningkatan kesejahteraan maupun pengurangan tingkat pengangguran. Atas dasar itulah

aspek sosial ekonomi dan budaya penting untuk dimasukkan dalam tahap awal analisis kelayakan usaha.

Di antara poin-poin yang bisa menjadi materi analisis dari aspek ini antara lain apakah keberadaan usaha mampu menyumbang kemanfaatan edukatif bagi masyarakat luas, apakah keberadaan usaha turut berkontribusi dalam mengubah atau mengurangi income per capita, apakah keberadaan usaha berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas, dan lain-lain.

Jika dirangkum, maka tahapan dari sebuah analisis kelayakan usaha dapat digambarkan dalam diagram berikut:

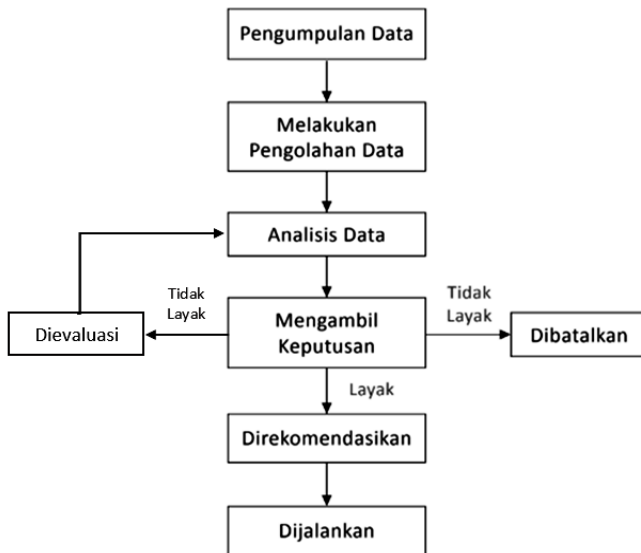


Diagram tahapan Analisis Kelayakan Usaha

Tujuan dan Manfaat Analisis Kelayakan Usaha

Sebuah analisis kelayakan usaha penting untuk dilakukan para pelaku usaha agar usaha yang akan dijalankan tidak menjadi sia-sia atau membuang-buang biaya, tenaga, dan pikiran secara percuma saja serta tidak menimbulkan masalah di masa mendatang. Melalui analisis kelayakan usaha akan diperoleh kesimpulan apakah sebuah ide usaha layak untuk direalisasikan atau tidak.

Mengutip dari Kasmir dan Jakfar (2013), paling tidak terdapat lima tujuan dari dilakukannya analisis kelayakan usaha, yaitu:

1. Menghindari risiko kerugian

Analisis kelayakan usaha bertujuan untuk menghindari risiko kerugian di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi analisis kelayakan adalah untuk meminimalisasi risiko yang tidak diinginkan baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

2. Memudahkan perencanaan

Prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan dapat mempermudah pelaku usaha dalam melakukan perencanaan, seperti berapa jumlah dana yang dibutuhkan, kapan usaha akan mulai dijalankan, di mana lokasi usaha

akan dipilih, siapa yang akan menjalankannya, bagaimana pelaksanaannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, bagaimana mekanisme pengawasan yang akan diambil jika terjadi penyimpangan, dan lain sebagainya.

3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan

Setelah dilakukan proses analisis akan diperoleh gambaran terkait rencana apa saja yang akan disusun dan dijalankan sehingga hal ini akan memudahkan pelaksanaan usaha. Karena pelaku usaha telah memiliki pedoman-pedoman yang harus dikerjakan, maka pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematis sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun inilah yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan.

4. Memudahkan pengawasan

Manakala usaha sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sejak awal, maka akan pelaku usaha akan semakin mudah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Pelaku usaha bisa bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena merasa ada yang mengawasi sehingga tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu.

5. Memudahkan pengendalian

Dengan adanya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pelaku usaha dapat mendeteksi jika suatu saat terjadi suatu penyimpangan sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng sehingga tujuan perusahaan akan tercapai.

C. Rencana Usaha (*Business Plan*)



Di tengah semakin ketatnya persaingan di dunia usaha, kita telah sama-sama melihat tidak sedikit pelaku usaha yang kandas di awal meniti karir hanya karena kurang mempersiapkan dan kurang memahami tahap perencanaan usaha, sehingga apa yang dilakukan tidak didasarkan pada perhitungan awal. Padahal membuka usaha baru tidak mungkin tanpa ada rencana

sebelumnya. Belum lagi hal ini ditambah dengan minimnya wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dunia usaha/bisnis.

Jika wirausaha cenderung hanya dilaksanakan apa adanya dan menganggapnya sebagai proses trial and error atau coba-coba, maka jika usaha yang dilakukan gagal pelakunya akan beralih ke usaha yang lain. Jika sudah gagal beberapa kali, maka ia akan berhenti melakukan usaha dan menyerah begitu saja tanpa melakukan evaluasi tentang apa yang membuatnya gagal. Pemikiran wirausaha semacam ini tidak sedikit kita jumpai di tengah masyarakat kita dan hal ini tentu akan membuat usaha tidak bisa bertahan lama.

Berangkat dari hal itu, agar usaha yang dijalankan bisa sesuai dengan yang diharapkan, seorang wirausaha harus memiliki perencanaan dalam membangun usaha atau business plan yang matang sejak awal. Business plan merupakan kumpulan dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis/usaha untuk menjual barang ataupun jasa dengan menghasilkan keuntungan yang tinggi dan menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya kepada usaha yang dijalankan. Dengan kata lain, business plan merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan—baik internal maupun eksternal—mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isi dari

business plan sering merupakan perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan, manufacturing, dan sumber daya manusia.

Sesederhana apapun, sebuah rencana perlu untuk disusun secara tertulis jika menghendaki usahanya bisa terukur dan sukses. Berbagai aspek penting yang berkaitan dengan usaha seperti usaha apa yang akan pilih dan dijalankan, dimana usaha itu akan dijalankan, siapa sasaran/ konsumennya, berapa modal yang dibutuhkan, berapa perkiraan keuntungan yang akan diperoleh, dan lain sebagainya haruslah dibuat secara tertulis sejak awal dan tidak hanya mengendap di dalam pikiran.

Membuat sebuah rencana kerja secara tertulis ini sangat berguna dalam menjalankan sebuah usaha—apalagi yang masih dalam tahap rintisan—agar kendali dan fokus usaha dapat terjaga dari penyimpangan. Jika rencana kerja tertulis ini sudah berlaku di berbagai negara maju, maka lain halnya dengan yang terjadi di negara kita di mana pada sebagian besar wirausahawan baru masih menyimpannya di dalam memori. Padahal seorang pengusaha minimal harus memiliki catatan-catatan tertentu secara tertulis yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaannya sekaligus dijadikan sebagai acuan evaluasi.

Selain menyusun perencanaan, yang penting juga untuk dicatat adalah dalam memulai usaha baru sebaiknya dimulai dari skala kecil terlebih dahulu. Salah satu urgensi memulai usaha dari skala kecil ini adalah sang wirausahawan baru akan men-

dapatkan banyak pengalaman dalam pengelolaan usahanya seiring dengan laju dan jatuh-bangunnya usaha yang dijalaninya.

Di antara beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam perancangan business plan adalah sebagai berikut (Supriyanto, 2009): business plan harus dapat diterima oleh semua pihak; business plan harus fleksibel dan realistis; business plan harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha; business plan harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien.

Sementara berbagai manfaat yang akan diperoleh dari pembuatan business plan di antaranya:

- a) Membimbing jalannya kegiatan usaha.
- b) Mengamankan kelangsungan hidup usaha.
- c) Mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha.
- d) Sebagai pedoman/petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya.
- e) Mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha.
- f) Sebagai alat berkomunikasi dalam usaha.
- g) Sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha.
- h) Memperbesar peluang untuk mencapai laba.
- i) Memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank
- j) Sebagai pedoman di dalam pengawasan.

Lantas apa saja poin dari sebuah business plan yang sekiranya harus dipertimbangkan oleh seorang wirausahawan? Secara umum, pokok-pokok yang termuat di dalam sebuah

business plan antara lain sebagai berikut (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010):

1. Nama Usaha; Pemilihan nama perusahaan harus dipikirkan secara matang karena berdampak jangka panjang. Selain berorientasi ke depan, faktor *marketable*-tidaknya dan mengandung duplikasi-tidaknya nama usaha yang akan dipakai juga harus menjadi bahan pertimbangan.
2. Lokasi; Pemilihan lokasi usaha perlu direncanakan karena berkait erat dengan sumber daya (*resources*) yang akan digunakan seperti bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. Pemilihan lokasi ini juga berkaitan dengan aspek pemasaran yang kelak akan dijalankan seperti apakah konsumen di lokasi yang dipilih cukup untuk menyerap hasil produksi atau tidak, seberapa besar serapan masyarakat terhadap produk usaha, seberapa besar kompetitor dengan usaha yang sama di lokasi tersebut, dan lain sebagainya.
3. Barang/ Jasa yang dipasarkan; Memuat gambaran terkait barang/jasa apa yang akan diproduksi atau dipasarkan, apa alasan barang/jasa tersebut diproduksi, dan manfaat apa yang akan diperoleh konsumen atas barang/jasa tersebut.
4. Sasaran Konsumen; Melakukan pemetaan terhadap calon konsumen yang akan menggunakan produk yang dibuat juga penting karena untuk merekalah subjek utama dari

produk yang kita buat. Pemetaan sasaran konsumen ini bisa didasarkan pada bentuk usaha dan juga jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh jika dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan.

5. Pasar yang akan dimasuki; Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar (*market leader*), penantang pasar (*market challenger*), pengikut pasar (*market follower*), atau perelung pasar (*market nicher*).
6. Partner yang Akan Menjadi Mitra; *Partnership*—baik general maupun *limited*—adalah asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha yang mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba. Dengan menjalin sebuah *partnership*, beberapa kelemahan yang ada dalam bentuk usaha perseorangan dapat diatasi dengan lebih mudah.
7. Personil yang akan menjalankan usaha; Penting untuk memilih seseorang yang akan menjalankan perusahaan dengan melihat aspek kejujurannya agar di kemudian hari tidak terjadi masalah yang tak diharapkan.
8. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia; Umumnya saat seseorang hendak mendirikan usaha, jumlah

modal yang tersedia untuk membuka usaha sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha awal sangat kecil dapat dilakukan kerjasama dengan partner, yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Modal awal ini harus tetap dicari sampai memenuhi/mencukupi untuk membuka usaha yang masih baru.

9. Peralatan yang perlu disediakan; Peralatan yang perlu disediakan harus disesuaikan dengan kepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan, akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Pada saat pertama kali membuka usaha, pikirkan peralatan yang paling diperlukan. Peralatan yang tidak begitu diperlukan penggunaannya sebaiknya tidak dibeli terlebih dahulu, sebab akan mengganggu uang kas. Ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan yaitu aspek ekonomis dan prestise.
10. Penyebaran promosi; Sebuah usaha yang baru dirintis tentu belum dikenal oleh masyarakat, karenanya harus direncanakan apakah usaha tersebut perlu diperkenalkan/dipromosikan atau tidak. Jika akan dipromosikan, maka harus direncanakan bentuk promosi, tempat/media promosi, keunggulan apa yang akan ditampilkan, apakah akan menonjolkan harga murah, kualitas prima, lokasi strategis, dan lain sebagainya.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan, dipikirkan, dan ditentukan dalam membuat *business plan* (Supriyanto, 2009):

- 1. Apa yang akan dikerjakan di dalam usaha?**
- 2. Kapan pekerjaan usaha itu akan dilaksanakan?**
- 3. Bagaimana cara mengerjakan pekerjaan usaha?**
- 4. Siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha?**
- 5. Di mana pekerjaan usaha akan dilaksanakan dan mengapa harus dikerjakan?**

Business plan seperti sebuah peta dan kompas untuk menjalankan usaha. Dengan membuat sebuah *business plan*, kita akan mampu menjalankan suatu usaha dengan lebih terstruktur dan terarah. Ibarat orang yang sedang berjalan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan karena sudah memiliki pedoman kerja yang jelas. *Business plan* juga dibutuhkan agar para wirausahawan memiliki materi yang dapat dikomunikasikan manakala harus berhubungan dengan berbagai pihak—baik internal maupun eksternal, seperti saat ingin mencari pinjaman dana, mencari investor, dan lain sebagainya.



Senarai Pustaka

- A. Rusdiana. 2018. *Kewirausahaan: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Malik dan Sungkowo Edy Mulyono, “Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat” dalam *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, Volume 1 (1): 87-101, Juni 2017*.
- Adila Rara Cynthia dan Ade Cahyana, “Efektivitas Metode Communicative Language Teaching (CLT) Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Berbahasa Inggris Peserta Kursus di PQEC Institute” dalam *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol 10, No 2 (2014)*.
- Akhmad Rizqul Karim, “Analisis Kelayakan Usaha” dalam <https://www.academia.edu/11645968/> *ANALISIS_KELAYAKAN_USAHA*. Diakses pada 20 Februari 2020.

- Alice Y. Kolb dan David A. Kolb, “Experiential Learning Theory: A Dynamic, Holistic Approach to Management Learning, Education and Development” dalam Steven J. Armstrong & Cynthia V. Fukami (ed.). 2009. *The SAGE Handbook of Management Learning, Education and Development*. London: Sage Publication.
- Alim Harun Pamungkas, “Rancangan Pengembangan Program Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Pendidikan Luar Sekolah” dalam Zulkarnain, dkk. 2017. *Buku Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu: Optimalisasi Peningkatan Mutu & Kemandirian Dalam Menciptakan Lapangan Kerja Lulusan Prodi PNF Menghadapi MEA & Bonus Demographi 2045*. Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP Universitas Bengkulu.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2016. *Survey Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*.
- Babari, “Latihan Ketrampilan dan Teknik Pengelolaannya” dalam *ANALISA, Tahun XV, NO. 5, MEI 1986*.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019*.
- Buchari Alma. 2006. *Kewirausahaan*, Edisi kesepuluh. Bandung: Alfabeta.

- _____. 2009. *Kewirausahaan: Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Claus Rerup, "Learning from Past Experience: Footnotes on Mindfulness and Habitual Entrepreneurship" dalam *Scand. J. Mgmt.* 21 (2005) 451–472.
- Daniel Yar Hamidi, Karl Wennberg, Henrik Berglund, "Creativity in entrepreneurship education" dalam *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 15 No. 2 (2008), hlm. 304-320.
- David Crystal. 2000. *The Cambridge Encyclopedia of Language*, 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dedy Suryadi. 2018. "Peran dan Strategi Perkembangan Kewirausahaan dan Tantangannya Dalam Menghadapi Per-ekonomian di Masa Yang Akan Datang", dalam <https://doi.org/10.31227/osf.io/8dkru>, diakses pada 10 Februari 2020.
- Dedy Takdir, dkk. 2015. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: Wijana Mahadi Karya.
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 2010. *Bahan Pelatihan untuk Calon Wirausaha: Buku 3 – Konsep Dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

- _____. 2010. *Bahan Pelatihan untuk Calon Wirausaha: Buku 6 – Perencanaan Usaha*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
- _____. 2010. *Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat Melalui Kursus dan Pelatihan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
- Einar A. Rasmussen dan Roger Sørheim, “Action-based Entrepreneurship Education” dalam *Technovation 26 (2006)*, hlm. 185-194.
- F.J. Monks, A.M.P. Knoers, dan Siti Rahayu Haditono. 2019. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Feddy Rangkuti. 2000. *Business Plan: Teknik Membuat Perencanaan Bisnis dan Analisis Kasus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- FX. Sudarsono, “Peran Pendidikan Luar Sekolah di Daerah Tertinggal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, Kemelaratan, Kebodohan, Kemalasan dan Kepasrahan pada Situasi yang tidak Menguntungkan Bagi Warganya” dalam *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 1, No. 1 (1993)*.
- Haris Budiyono dan Rianti Setyawasih, “Faktor pribadi, Lingkungan, dan Sosiologi Pada Tahap Inisiasi Proses Kewirausahaan Ikan Hias di Kota Bekasi” dalam *OPTIMAL:*

- Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2, September 2016.
- Ibnu Syamsi, "Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya Dalam Masyarakat" dalam *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2010.
- Imam Santosa, "Masalah dan Tantangan Pengembangan Kewirausahaan Pada Kalangan Mahasiswa di Indonesia" dalam *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Volume 3 No. 3, September 2014.
- Indra Widjaja, "Peningkatan Kreativitas Bagi Pengembangan Kewirausahaan" dalam *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis IV 2014 Universitas Tarumanagara*.
- Irta Fitriana, "Menguasai Bahasa Inggris: Bekal Potensial Dalam Pengembangan Wirausaha" dalam *Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage*, Vol 1, No 2 (2012).
- J. Winardi. 2003. *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana.
- James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, dan Mircea Malitza. 1984. *No Limits To Learning: Bridging The Gaps*. Oxford. Pergamon Press.
- Jamil Latief. 2017. "Buku Ajar Kewirausahaan: Kiat Sukses Menjadi Wirausaha" dalam <https://bahanajar.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/2.-BUKU-AJAR-KEWIRAUSAHAAN.pdf>.

- Jared D. Harris, Harry J. Sapienza & Norman E. Bowie, "Ethics and Entrepreneurship" dalam *Journal of Ethics and Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 1, 2011.
- K. Bertens. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kasmir dan Jakfar. 2013. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2016. *Laporan Tahunan: Membangun Koperasi dan UMKM Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Kementerian PPN/ Bappenas. 2019. *Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Lilis Sulastri. 2016. *Studi Kelayakan Bisnis Untuk Wirausaha*. Bandung: LGM-LaGood's Publishing.
- Linda Pinson. 2003. *Panduan Lengkap Menyusun Proposal dan Rencana Bisnis*. Jakarta: Canary.
- Luh Putu Artini, Ni Nyoman Padmadewi, P.K. Nitiasih, "Penyiapan Alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Menjadi Wirausahawan Kursus" dalam *INOTEKS: Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni*, Volume 20, Nomor 1, Februari 2016.
- Maman Hilman. 2008. "Pendidikan Kesehatan Pemukiman Masyarakat" dalam <http://file.upi.edu/browse>.

php?dir=Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/194612161973041-MAMAN_HILMAN/PLS/

Mansyur Srisudarso, “Pengembangan Kewirausahaan Jasa Penerjemahan Melalui Magang Kemahasiswaan” dalam Zulkarnain, dkk. 2017. *Buku Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu: Optimalisasi Peningkatan Mutu & Kemandirian Dalam Menciptakan Lapangan Kerja Lulusan Prodi PNF Menghadapi MEA & Bonus Demographi 2045*. Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP Universitas Bengkulu.

Martien Herna Susanti, “Model Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Entrepreneur Muda Kreatif dan Inovatif di Kota Semarang” dalam *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 41 No. 1 Juni 2014.

Maruji Pakpahan. 2013. *Materi Kuliah Kewirausahaan*. Jakarta: Universitas Budi Luhur.

Momtazur Rahman, “English for Specific Purposes (ESP): A Holistic Review” dalam *Universal Journal of Educational Research* 3(1): 24-31, 2015. Diakses dari <https://eric.ed.gov/?id=EJ1053934>.

Munjiati Munawaroh, Hasnah Rimiyati, dan Fajarwati. 2016. *Kewirausahaan: Untuk Program Strata 1*. Yogyakarta: LP3M UMY.

Neng Nisa A. Firdani, Ace Suryadi, Iip Saripah, “Kemandirian Berwirausaha Pemuda Produktif Melalui Program Pendidikan

Kecakapan Hidup (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Kecimpring Binaan PKBM Ash-Shoddiq Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)”, dalam *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Volume 1 nomor 1 April 2017*.

Nur Agustiningsih dan Satriyo Pamungkas, “Peranan Pendidikan Luar Sekolah Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia” dalam *ISTORIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari, Vol. 1, No. 1, September 2017*.

Nurdin Bramono, “Kompetensi Penerjemahan (Penerjemah Sebagai Bentuk Wirausaha)” dalam *Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage, Vol 1, No 2 (2012)*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12. Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019.

Philip H. Coombs. 1973. *The World of Educational Crisis: A System Analysis*. New York: Oxford University Press.

Raja Bongsu Hutagalung dan Syafrizal Helmi Situmorang. 2008. *Pengantar kewirausahaan*. Medan: USU Press.

RirinGusti,dkk., “Kewirausahaan Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Enterpreneur Pada Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Untuk Menghadapi Abad 21” dalam Zulkarnain, dkk. 2017. *Buku Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*

Nonformal FKIP Universitas Bengkulu: Optimalisasi Peningkatan Mutu & Kemandirian Dalam Menciptakan Lapangan Kerja Lulusan Prodi PNF Menghadapi MEA & Bonus Demographi 2045. Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP Universitas Bengkulu.

Ronald Nangoi, "Pendidikan dalam Dunia Usaha" dalam *ANALISA, Tahun XV, NO. 5, MEI 1986*.

Russell J. Kleis, dkk. 1973. *Non-Formal Education: The Definitional Problem*. Michigan: Michigan State University.

Rusydi Ananda dan Tien Rafida. 2016. *Pengantar Kewirausahaan: Rekayasa Akademik Melahirkan Enterpreneurship*. Medan: Perdana Publishing.

Santoso S. Hamijoyo. 1997. *Pengembangan PLS dan Perubahan Sikap*. Bandung: PLS IKIP.

Sri Yuliatwati, "Kajian Implementasi Tri Dharma Perburuan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia" dalam *WIDYA, Tahun 29 Nomor 318 Maret 2012*.

Suadi Sapta Putra & Wahyu Triono KS. 2018. "Undang-undang Kewirausahaan" dalam [https://www.kompasiana.com/wahyu-triono2010/5bd7f2c2aebe108425a7623/ undang-undang-kewirausahaan?page=all](https://www.kompasiana.com/wahyu-triono2010/5bd7f2c2aebe108425a7623/undang-undang-kewirausahaan?page=all), diakses pada 20 Februari 2020.

Sudarmiatin, ""Wirausaha Beretika" Tantangan Pendidikan Kewirausahaan dalam Era Persaingan Global" dalam Yuli Agustina, dkk (ed.). 2015. *Prosiding Seminar Nasional dan*

- Call For Papers Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bisnis dan Manajemen*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Suharyono, "Sikap dan Perilaku Wirausaha" dalam *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40, No.56, Mei 2017.
- Supriyanto, "Business Plan Sebagai Langkah Awal Memulai Usaha", dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 6 Nomor 1, April 2009.
- Suryana. 2004. *Modul 1: Memahami Karakteristik Kewirausahaan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan-Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah-Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. 2004. *Modul 2: Evaluasi dan Pengembangan Usaha*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan-Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah-Departemen Pendidikan Nasional.
- Susilaningsih, "Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi: Pentingkah Untuk Semua Profesi?" dalam *Jurnal Economia*, Volume 11, Nomor 1, April 2015.
- Suzanne Kindervatter. 1979. *Nonformal Education as an Empowering Process United States with Case Studies From Indonesia and Thailand*. Amherst: University of Massachusetts.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Yulia Ayriza, "Mewujudkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif" dalam *Paradigma: Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, No. 02 Th. I, Juli 2006.
- Yulizar Kasih, "Mewujudkan Pendidikan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi Melalui Proses Pembelajaran yang Berkelanjutan" dalam *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan: Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 2 No. 2 Maret 2013.
- Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto. 2003. *Translation: Bahasan Teori & Penuntun Praktis Menerjemahkan*. Yogyakarta: Kanisius.



Tentang Penulis

Dr. H. Saraka, M.Pd. adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman Samarinda. Lulusan Universitas Negeri Makassar dan Universitas Pendidikan Indonesia ini pernah menjadi ketua Tim Persiapan Pembentukan UP Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman. Selain aktif mengajar dan menjadi dosen tetap, penulis buku *From Paragraph To Essay: Concepts and Practices* dan artikel di berbagai jurnal nasional serta internasional ini juga diamanahi sebagai ketua Program Doktor (S-3) Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman.

